

**IMPLEMENTASI PROGRAM
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR DALAM PROSES
PENGHIJAUAN KAWASAN *BARRIER* INDUSTRI
UNTUK MENGANTISIPASI PENCEMARAN
KEGIATAN PRODUKSI PERUSAHAAN**

(Studi Pada Kelurahan Guntung Kota Bontang Sebagai Kawasan Buffer Zone PT.
Pupuk Kalimantan Timur)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**Rochmat Sudiarjo
NIM. 125030100111100**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2016**

**IMPLEMENTASI PROGRAM
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR DALAM PROSES
PENGHIJAUAN KAWASAN BARRIER INDUSTRI
UNTUK MENGANTISIPASI PENCEMARAN
KEGIATAN PRODUKSI PERUSAHAAN**

(Studi Pada Kelurahan Guntung Kota Bontang Sebagai Kawasan Buffer Zone PT.
Pupuk Kalimantan Timur)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Rochmat Sudiarjo
NIM. 125030100111100



Dosen Pembimbing:

1. Dr. Mochamad Rozikin, M.AP.
2. Andhyka Muttaqin, S.AP, M.PA.

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2016**

MOTTO

*“Berdoa, Berusaha, Menerima, dan Tidak Mudah
Putus Asa”*

(Penulis, 2016)

*Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada
keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai
(mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada
Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)*

“Be The Best and Do Your Best, Always”

“Just Do It!! ”

(NIKE, 2011)

KATA PERSEMBAHAN

Ya Allah terima kasih atas semangat yang telah Engkau berikan kepadaku, semangat yang begitu besar, semangat yang begitu membara dalam menyelesaikan Skripsi ini. Tentang bagaimana Engkau menunjukkan gambaran masa depan yang membangkitkan gairahku sebagai manusia terdidik dan seorang muslim. Tanpa bantuan dan petunjukmu kesuksesan ini tidak akan pernah datang menghampiriku, tanpa kehendakmu kesuksesan ini akan berpindah kepada mereka yang mau lebih berusaha dan mendekatkan dirinya kepadamu. Cahaya yang terang telah Engkau berikan di dalam perjalananku, pahit dan sakitnya kehidupan yang Engkau ajarkan dan jadikan itu sebagai kenikmatan dan manisnya kehidupan saat diriku mampu menjadikan Engkau sebagai tempatku bersandar dan mengeluarkan segala keluh kesahku.

Ku persembahkan Skripsi ini untuk kedua Orang Tuaku yaitu Ibunda dan Ayahanda tercinta. Terima kasih Ibundaku yang telah bersedia menemani dan membimbingku menjadi orang yang selalu bersemangat dan kuat dalam menghadapi segala macam masalah dan tantangan yang menghadang. Tak pernah Engkau lelah mengajariku tentang bagaimana mencapai sesuatu yang selama ini aku impikan. Terima kasih Ayahanda atas banyak pengalaman yang Engkau tunjukkan kepadaku sehingga aku tahu apa yang harus aku lakukan untuk diriku sendiri dan keluarga saat ini hingga di masa depan nanti. Terima kasih keluarga besarku yang juga selalu mampu menyediakan waktunya untuk memberikan nasihat dan dorongan agar aku mampu melakukan segala sesuatu lebih baik dan mampu memberikan manfaat bagi orang-orang dilingkunganku.

Dan tak lupa ku ucapkan Terima kasih kepada Pupuk Kaltim yang telah bersedia membantu dan mengajariku tentang berbagai macam ilmu dan membagikan pengalaman secara langsung di dalam setiap programnya. Dan juga terima kasih atas support dari para sahabat-sahabat karibku yang tidak mampu aku sebutkan satu persatu. Berkat kalian semua aku mampu menyelesaikan seluruh kegiatan perkuliahan dan kewajibanku sebagai manusia sosial dan terpelajar.

Penulis, April 2016

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam Proses Penghijauan Kawasan *Barrier* Industri untuk Mengantisipasi Pencemaran Kegiatan Produksi Perusahaan

Disusun oleh : Rochmat Sudiarjo

NIM : 125030100111100

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

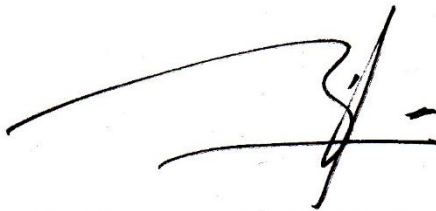
Konsentrasi :-

Malang, 7 April 2016

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Mochamad Rozikin M.AP
NIP. 19630503 198802 1 001



Andhyka Muttakin, S.AP., M.AP
NIP. 20110785 04211001

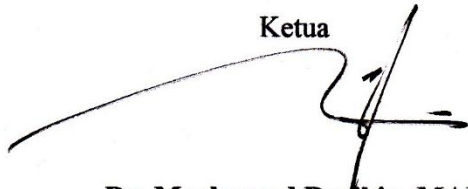
TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan mejelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Mei 2016
Jam : 08.00 WIB
Skripsi atas nama : Rochmat Sudiarjo
Judul : Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Pupuk Kaltim dalam Proses Penghijauan Kawasan *Barrier* Industri Untuk Mengantisipasi Pencemaran Kegiatan Produksi Perusahaan. (Studi Pada Kelurahan Guntung Kota Bontang Sebagai Kawasan *Buffer Zone* PT. Pupuk Kaltim)

MAJELIS PENGUJI

Ketua



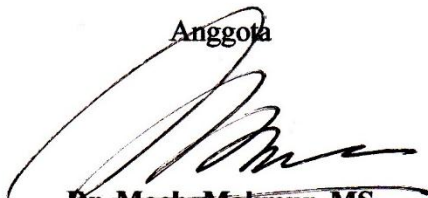
Dr. Mochamad Rozikin, MAP
NIP. 19630503 198802 1 001

Anggota



Andhyka Muttaqin, S.AP, M.PA.
NIK. 20110785 04211001

Anggota



Dr. Moch. Makmur, MS
NIP. 19511028 198003 1 002

Anggota



M. Chazienul Ulum, S.Sos, M.PA
NIP. 19740614 200501 1 001

PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 7 April 2016
Mahasiswa,



Rochmat Sudiarjo
NIM. 125030100111100

RINGKASAN

Rochmat Sudiarjo, 2016, **Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pupuk Kalimantan Timur Dalam Proses Penghijauan Kawasan *Barrier* Industri Untuk Mengantisipasi Pencemaran Kegiatan Produksi Perusahaan** (Studi Pada Kelurahan Guntung Kota Bontang Sebagai Kawasan *Buffer Zone* PT. Pupuk Kalimantan Timur), Dr. Mochamad Rozikin, M.AP., Andhyka Muttaqin, S.AP, M.PA., 222 Hal + xviii

Penelitian ini dilakukan atas dasar banyaknya keluhan masyarakat yang bertempat tinggal dan hidup di sekitar kawasan industri PT. Pupuk Kalimantan Timur tentang berbagai macam dampak maupun pencemaran yang muncul karena proses kegiatan produksi industri seperti bau amoniak dan bunyi bising. Keluhan-keluhan tersebut apabila tidak dapat segera diatasi dan dicari solusinya maka akan berdampak pada potensi munculnya konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Dengan adanya kejadian tersebut yang kemudian menjadi sebuah isu penting yang perlu diselesaikan baik bagi perusahaan industri yang ada, pemerintah, dan juga masyarakat untuk duduk bersama-sama mencari solusi yang diharapkan atas permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Kegiatan industri yang dijalankan oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur telah menghasilkan berbagai macam dampak positif namun juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan disekelilingnya. Dampak positif yang muncul karena adanya proses industrialisasi ini adalah terbukanya lapangan kerja baru yang kemudian juga berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat di sekitar perusahaan, selain itu kegiatan industri PT. Pupuk Kalimantan Timur juga mampu meningkatkan eksodus ekspor, dan tercukupinya kebutuhan pupuk nasional. Namun disisi lain proses dari kegiatan produksi yang dijalankan juga mengakibatkan munculnya dampak negatif yaitu potensi pencemaran lingkungan seperti bau amoniak dan bunyi bising.

Berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi dasar munculnya kebijakan yang mengharuskan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan atas dampak yang dihasilkan dari kegiatan industrinya, PT. Pupuk Kalimantan Timur membuat program-program CSR yang bertujuan untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Dari hasil penelitian yang diperoleh didapatkan bahwa program CSR yang dilaksanakan masih belum memiliki manfaat yang begitu besar bagi sebagian masyarakat apabila dilihat dari sisi lingkungan. Namun, jika dilihat dari sisi ekonomi, sosial, dan politik program ini telah cukup banyak membantu dalam menyediakan lapangan kerja baru yang kemudian berdampak pada turunya jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan juga membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bontang.

Kata Kunci: Implementasi Program, *Corporate Social Responsibility*, PT. Pupuk Kalimantan Timur

SUMMARY

Rochmat Sudiarjo, 2016, **The Program Implementation of PT. Pupuk Kalimantan Timur Corporate Social Responsibility in Reforesting of Industrial Barrier Zone to Anticipate Company's Production Pollution. Study in Kelurahan Guntung, Kota Bontang as a Buffer Zone Area Companies**, Dr. Mochamad Rozikin, M.AP., Andhyka Muttaqin, S.AP, M.PA., 222 pages + xviii

This research was conducted on the basis of the number of complaints people living in around the industrial area of PT. Pupuk Kalimantan Timur about any kind of impact or pollution arising from industrial production activities such as ammonia odor and noises. These complaints when they can't be overcome and find a solution it will have an impact on the potential for conflicts between companies and communities. Given these events which later became an important issue that needs to be good for existing industrial companies, governments, and communities of sit together to find a solution that is expected of the issues involved.

PT. Pupuk Kalimantan Timur's industrial activities has produced a wide range of positive effects, but also negative affect the life in around. The positive impacts that arise because of the industrialization process are opening new jobs then also have an impact on the growing economy of the surrounding community, besides the industrial activity of PT. Pupuk Kalimantan Timur was also able to increase exports exodus, and provide for the national fertilizer. On the other hand the process of the company production run activities also resulted in the emergence the negative impacts potential of environmental pollution such as ammonia odors and noises.

Under 2007 No. 40 Act of Incorporated Company is the basis of the emergence of a policy that requires the company to carry out activities of social and environmental responsibility for the impact resulting from industrial activities, PT. Pupuk Kalimantan Timur makes CSR programs aimed at tackling things that are not desired. From the research results obtained showed that CSR programs implemented have not had such great benefits for some people when seen from the environmental aspect. However, when viewed from the aspect of economic, social, and political, this program has been quite a lot of help in providing new jobs that have an impact on reducing the sheer number of Poor Households and also help local governments to increase green open space in Bontang.

Keyword: Implementation Program, *Corporate Social Responsibility*, PT. Pupuk Kalimantan Timur

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pupuk Kalimantan Timur Dalam Proses Penghijauan Kawasan *Barrier* Industri Untuk Mengantisipasi Pencemaran Kegiatan Produksi Perusahaan** (Studi Pada Kelurahan Guntung Kota Bontang Sebagai Kawasan *Buffer Zone* PT. Pupuk Kalimantan Timur).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang
3. Bapak Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang
4. Bapak Dr. Mochamad Rozikin M.AP selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah bersedia membimbing, memberi arahan, dan nasehat-nasehat yang membangun penulis sejak awal proses pengajuan judul skripsi hingga sidang skripsi dilaksanakan.
5. Bapak Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah bersedia membimbing, memberi arahan, dan nasehat-nasehat yang membangun penulis sejak awal proses pengajuan judul skripsi hingga sidang skripsi dilaksanakan.

6. Ibunda Dra. Sulistinah selaku Ibu Kandung penulis yang menjadi semangat utama penulis dalam melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Sri Djuwani Ekowati selaku Manager Departemen Lingkungan Hidup PT. Pupuk Kalimantan Timur yang bersedia membagi informasi dan pengalaman terhadap objek penelitian penulis.
8. Ibu Esti Yuli, Mas Arwin, Pak Mujab, Mas Rendy selaku Staf Karyawan Departemen Lingkungan Hidup PT. Pupuk Kalimantan Timur yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama pengambilan data di lapangan
9. Bapak Zaenal selaku Staf Kesekretariatan Perusahaan PT. Pupuk Kalimantan Timur yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjelaskan dan memberikan informasi terkait penelitian penulis.
10. Bapak Wahyudi, S.Sos selaku Manager Departemen Humas PT. Pupuk Kalimantan Timur yang bersedia membagi informasi dan pengalaman terhadap objek penelitian penulis.
11. Bapak Ramli selaku Kabag Eksternal Departemen Humas dan Mas Khusnul Abidin selaku Staf Karyawan Bagian Eksternal dan informan penelitian di PT. Pupuk Kalimantan Timur
12. Ibu Ir. Lola Karmila selaku Manager Departemen Diklat dan Manajemen Pengetahuan PT. Pupuk Kaltim
13. Bapak Mas'ud, Bapak Siin, Mbak Suzan, dan Mas Arya selaku Staf Karyawan Departemen Diklat dan Manajemen Pengetahuan PT. Pupuk Kaltim yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan alur selama melaksanakan riset di dalam perusahaan.
14. Bapak Baslan selaku Lurah Kelurahan Guntung yang mau menyempatkan diri untuk berinteraksi dan bertukar pikiran terkait pelaksanaan program sebagai objek penelitian.
15. Bapak Rahmat Haryono selaku Ketua LPM dan salah satu tokoh masyarakat Guntung yang telah berkenan membagi ilmu dan informasi implementasi program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur.

16. Ayahanda Purwadi selaku Ayah Kandung penulis yang telah membantu dalam dukungan doa dan biaya selama proses skripsi dikerjakan.
17. Bapak M. Baharudin, Ibu Dwi Ernawati, Mbak Qoriatul Fitriyah, Mas Jumanil, dan Zakiyah Hamizan yang telah memberikan bantuan moril, tenaga, waktu, tempat, dan selalu memompa semangat penulis selama melaksanakan penelitian di Kota Bontang.
18. Saudara Harits Muhammad Parlan selaku partner riset yang telah membantu dan tak pernah mengenal lelah dalam mengumpulkan informasi dan data penelitian sebagai bahan pengolahan data skripsi.
19. Saudari Vilayati Al Fitri yang mampu mengajarkan saya tentang apa arti pengorbanan dan perjuangan.
20. Bapak Sugeng, Ibu Yunaningsih, dan Dek Gresela Youniga yang telah memberikan bantuan dalam materi literatur bacaan beserta dukungan moril dan semangat selama proses menyelesaikan skripsi.
21. Bro Surya Perdana Hadi, Ian Maulana Zaky, Febriyan Dhanar Lasena, Ericko Lazuardi sebagai sahabat yang selalu menjadi motivator dan guru yang sangat berguna.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan

Malang, April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
KATA PERSEMBAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan.....	14
1. Definisi Administrasi Publik	14
2. Administrasi Pembangunan.....	14
3. Pembangunan Berkelanjutan	18
B. <i>Good Corporate Governance</i> dalam Administrasi Publik.....	19
1. Konsep <i>Governance</i>	19
a. <i>Good Governance</i>	20
b. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	22
c. <i>Stakeholder</i>	24
2. <i>Good Corporate Governance</i>	26
3. Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	28
C. <i>Corporate Social Responsibility</i>	31
1. Definisi dan Konsep <i>Corporate Social Responsibility</i>	31
2. <i>Corporate Social Responsibility</i> di Indonesia	33
3. Pilar dan Bentuk <i>Corporate Social Responsibility</i>	34

D.	Implementasi Program.....	38
E.	Pencemaran Produksi Perusahaan	44
F.	Kerangka Konseptual	55
BAB III	METODE PENELITIAN.....	58
A.	Jenis Penelitian	58
B.	Fokus Penelitian	59
C.	Lokasi dan Situs Penelitian	61
D.	Jenis dan Sumber Data	62
E.	Teknik Pengumpulan Data	64
F.	Instrumen Penelitian.....	65
G.	Metode Analisis.....	67
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	72
A.	Gambaran Umum	72
1.	Kota Bontang.....	72
2.	Kelurahan Guntung	75
3.	PT. Pupuk Kalimantan Timur.....	90
B.	Penyajian Data dan Fokus Penelitian	97
1.	Implementasi Program CSR Penghijauan Kawasan <i>Barrier</i> PT. Pupuk Kalimantan Timur.....	97
a.	Keterkaitan Program CSR Penghijauan Kawasan <i>Barrier</i> PT. Pupuk Kalimantan Timur dengan kehidupan Masyarakat Guntung	101
b.	Peran dan Pola Hubungan <i>Stakeholder</i>	114
c.	Bentuk kegiatan dan proses Program CSR Penghijauan Kawasan <i>Barrier</i> PT. Pupuk Kalimantan Timur.....	121
2.	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Program CSR Penghijauan Kawasan <i>Barrier</i> PT. Pupuk Kalimantan Timur.....	144
a.	Faktor Pendukung.....	144
b.	Faktor Penghambat.....	151
C.	Analisis Data	155
1.	Implementasi Program CSR Penghijauan Kawasan <i>Barrier</i> PT. Pupuk Kalimantan Timur.....	155
a.	Keterkaitan Program CSR Penghijauan Kawasan <i>Barrier</i> PT. Pupuk Kalimantan Timur dengan kehidupan Masyarakat Guntung	157
b.	Peran dan Pola Hubungan <i>Stakeholder</i>	164
c.	Bentuk kegiatan dan proses Program CSR Penghijauan Kawasan <i>Barrier</i> PT. Pupuk Kalimantan Timur.....	171
2.	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam	

Implementasi Program CSR Penghijauan Kawasan <i>Barrier</i>	
PT. Pupuk Kalimantan Timur.....	184
a. Faktor Pendukung.....	184
b. Faktor Penghambat.....	187
BAB V PENUTUP	196
A. Kesimpulan.....	196
B. Saran	201
DAFTAR PUSTAKA	204
LAMPIRAN.....	209

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Batas Kebisingan Maksimum	49
Tabel 2. Tingkat Baku Kebauan	53
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	76
Tabel 4. Jarak Antara Kelurahan dengan Ibu Kota	78
Tabel 5. Jumlah Kelompok Rentan di Kelurahan Guntung	82
Tabel 6. Peran dan Posisi Sosial Aktor Institusi di Kelurahan Guntung	85
Tabel 7. Peran dan Posisi Sosial Aktor Individu Kelurahan Guntung	86
Tabel 8. Jumlah Rumah Tangga Miskin Kelurahan Guntung	105
Tabel 9. Rencana Kegiatan Program Penghijauan Kawasan <i>Barrier</i> PT. Pupuk Kalimantan Timur	128
Tabel 10. Daftar Tanaman Langka dan Khas Kalimantan PT. Pupuk Kalimantan Timur	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. PROPER 2015.....	4
Gambar 2. Peran <i>Stakeholder</i> dalam <i>Good Governance</i>	24
Gambar 3. Model Kesesuaian Implementasi Program.....	40
Gambar 4. Kerangka Konseptual	55
Gambar 5. Analisis Data Penelitian Kualitatif Creswell.....	69
Gambar 6. Peta Administratif Kota Bontang	74
Gambar 7. Data Pemeluk Agama Masyarakat Guntung	76
Gambar 8. Profesi Masyarakat Guntung.....	77
Gambar 9. Presentase Kemiskinan Kelurahan Guntung	80
Gambar 10. Struktur Pemerintahan Kelurahan Guntung	84
Gambar 11. Hubungan Individu, Kelompok, dan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan Guntung	89
Gambar 12. Pembagian Zona pada Kawasan <i>barrier</i> PT. Pupuk Kalimantan Timur	133
Gambar 13. Struktur Organisasi Program Penghijauan Kawasan <i>barrier</i> PT. Pupuk Kalimantan Timur.....	150
Gambar 14. Gambar Penurunan Jumlah RTM dan Pengangguran di Kelurahan Guntung	161
Gambar 15. Pola Hubungan <i>Stakeholder</i> di dalam Implementasi Program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam Proses Penghijauan Kawasan <i>Barrier</i>	170
Gambar 16. Proses dan bentuk kegiatan dalam Implementasi Program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam proses penghijauan kawasan <i>barrier</i> perusahaan.....	182
Gambar 17. Kontruksi Implementasi Program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam proses penghijauan kawasan <i>barrier</i> industri untuk mengantisipasi pencemaran produksi perusahaan.....	192
Gambar 18. Kondisi Kawasan Barrier PT. Pupuk Kalimantan Timur Zona 1...	217
Gambar 19. Kondisi Kawasan Barrier PT. Pupuk Kalimantan Timur Zona 2 ..	217
Gambar 20. Kondisi Kawasan Barrier PT. Pupuk Kalimantan Timur Zona 3 ..	218
Gambar 21. Foto penghijauan kawasan <i>barrier</i> PT. Pupuk Kalimantan Timur	218
Gambar 22. Foto penghijauan kawasan <i>barrier</i> PT. Pupuk Kalimantan Timur Zona 1 dengan penanaman Bambu Kuning.....	219
Gambar 23. Foto penghijauan kawasan <i>barrier</i> PT. Pupuk Kalimantan Timur Zona 3 dengan penanaman Pohon Trembesi dan Pohon Mahoni ..	219
Gambar 24. Foto kawasan <i>barrier</i> PT. Pupuk Kalimantan Timur Zona 3 setelah dilakukan penghijauan selama 2 tahun dengan penanaman Pohon Trembesi dan Pohon Mahoni	220
Gambar 25. Bibit Tanaman Mahoni dan Trembesi dari Program CSR	

	PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam Proses Penghijauan Kawasan <i>Barrier</i> Industri	220
Gambar 26.	Bibit Tanaman Bambu Kuning dari Program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam Proses Penghijauan Kawasan <i>Barrier</i> Industri	221
Gambar 27.	Kondisi lingkungan di beberapa area zona 3 kawasan <i>barrier</i> PT. Pupuk Kalimantan Timur dilihat ke arah pemukiman penduduk yang berbatasan langsung dengan lingkungan masyarakat Guntung	221
Gambar 28.	Kondisi lingkungan di beberapa area zona 3 kawasan <i>barrier</i> PT. Pupuk Kalimantan Timu dilihat ke arah perusahaan yang berbatasan langsung dengan pemukiman masyarakat Guntung	222
Gambar 29.	Foto peneliti bersama masyarakat, ketua LPM Guntung dan salah satu pegawai lapangan program penghijauan kawasan <i>barrier</i> industri PT. Pupuk Kalimantan Timur	222

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Riset... ..	209
Lampiran 2. Daftar Wawancara Penelitian... ..	212
Lampiran 3. Kebijakan CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur.....	214
Lampiran 4. Struktur Komite CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur.....	215
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian.....	217

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

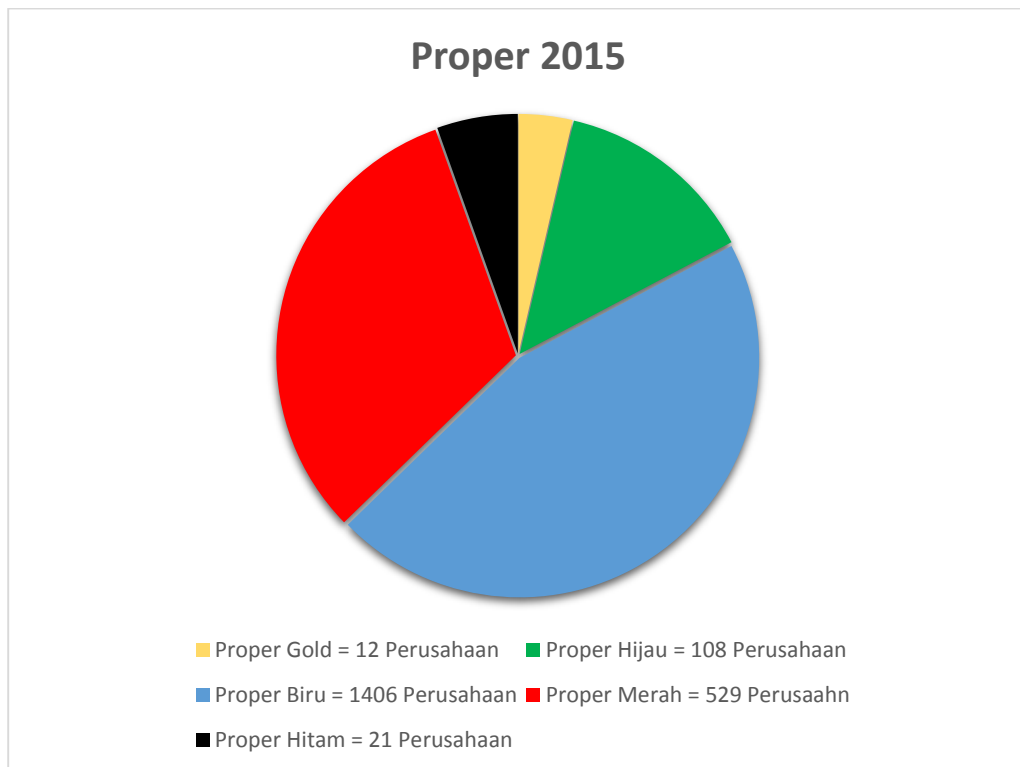
Perkembangan dunia industri merupakan salah satu perwujudan dari revolusi suatu Negara. Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945 dan masuk pada masa reformasi di awal tahun 2000-an, dunia Industri terus berkembang. Industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan masyarakat yang berfokus pada kegiatan ekonomi, meliputi pekerjaan yang semakin beragam (spesialisasi), gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi yang mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Terdapat perubahan filosofi manusia dalam industrialisasi bahwa manusia mengubah pandangan lingkungan sosialnya menjadi lebih kepada rasionalitas (tindakan didasarkan atas pertimbangan, efisiensi, dan perhitungan, tidak lagi mengacu kepada moral, emosi, kebiasaan atau tradisi) (Dumairy, 1996).

Perkembangan dunia industri di Indonesia tidak dapat dipungkiri bahwa munculnya era industrialisasi yang ditandai dengan berdirinya pabrik-pabrik yang memproduksi berbagai macam kebutuhan manusia, telah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adanya perkembangan industri yang begitu pesat juga telah memberikan banyak pengaruh pada pembangunan. Namun perkembangan tersebut

memiliki beberapa dampak positif dan dampak negatif yang setiap harinya semakin mengawatirkan. Dampak positif yang muncul karena perkembangan dunia industri di Indonesia salah satunya adalah terciptanya keanekaragaman kehidupan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dampak negatif yang muncul mengakibatkan pengaruh secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat maupun lingkungan. Pengaruh secara langsung muncul akibat perkembangan industri yang terjadi antara lain berkurangnya lahan untuk pertanian, berkurangnya sumber daya alam, dan munculnya berbagai macam polusi. Namun disisi lain industri juga memiliki pengaruh tidak langsung yang berdampak pada munculnya kesenjangan sosial dan bergesernya budaya lokal kepada budaya yang lebih modern karena munculnya banyak pendatang baru. (Usman, 2002).

Namun dalam banyak hal terkadang perkembangan dunia industri tidak memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar kawasan industri. Fokus utama dalam dunia industri yang sebagian besar terletak pada kegiatan bisnis dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan sebesar-besarnya menjadi titik lemah bagi dunia industri yang kemudian memunculkan berbagai dampak kerusakan lingkungan. Kondisi dan keadaan lingkungan disekitar dunia industri yang semakin berkurang dan menurun kualitasnya karena berbagai macam polusi. Sehingga dampak pembangunan industri terhadap lingkungan dapat juga memberi pengaruh negatif terhadap kelangsungan hidup baik masyarakat maupun makhluk hidup yang tinggal disekitarnya (Mawardi, 2012).

Permasalahan lingkungan yang muncul akibat perkembangan dunia industri yang begitu cepat telah menjadikan lingkungan hidup seperti terjangkit suatu penyakit kronis yang sulit untuk dipulihkan. Selama 20 tahun terakhir pembangunan ekonomi Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Hingga tahun 2015 terdapat kurang lebih 2138 perusahaan industri besar yang bergerak dalam bidang agroindustri, manufaktur, prasarana dan jasa, pertambangan, energi dan migas yang telah terdaftar secara resmi dan beroperasi di Indonesia (www.menlh.go.id). Pada tahun 2015 melalui Program Penilaian Peningkatan Kinerja Perusahaan (PROPER) yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.557/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2014-2015 dijelaskan bahwa terdapat 529 perusahaan industri dengan kategori “Merah” dan 21 perusahaan industri dengan kategori “Hitam” sebagai mana ditunjukkan oleh diagram berikut:



Gambar 1. Hasil Penilaian Proper tahun 2015

Sumber: Proper Kementerian Lingkungan Hidup 2015

Kategori merah adalah penilaian bagi perusahaan yang melakukan penanggung jawaban usaha dan kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidupnya dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan serta kebijakan perundang-undangan yang berlaku. Kategori “Hitam” adalah penilaian bagi perusahaan yang - melakukan penanggung jawaban usaha dan kegiatan dengan sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data penilaian yang dilakukan oleh pemerintah tersebut telah cukup menggambarkan besarnya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh proses produksi industri di Indonesia. Data yang ada tersebut masih belum

ditambah lagi dengan berbagai macam kegiatan industri yang ilegal atau belum terdaftar secara resmi dalam situs pemerintah Indonesia. Pencemaran air, udara, tanah dan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan persoalan yang harus dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri. Pada praktiknya di Indonesia pencemaran lingkungan juga telah diantisipasi melalui penetapan kebijakan melalui undang-undang yang mengatur tentang penanggulangan pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan perindustrian. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di dalamnya menjelaskan bahwa undang-undang ini mengatur melalui Pasal 1 ayat 2 yang berisi :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Kemudian Undang-undang ini juga diperkuat lagi dalam tata kelola penanggulangan pencemaran lingkungan hidup menggunakan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menjadi dasar atau landasan utama perusahaan dalam skala nasional atau multi-nasional yang berdiri dan beroperasi di Indonesia wajib melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang kemudian disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)* seperti ketentuan dalam pasal 74 ayat 1: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Ketentuan perundang-undangan ini

adalah sebagai komitmen korporasi terutama perseroan terbatas untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pengertian CSR sendiri menurut Steiner dan Steiner dalam Lako (2011:212) adalah tanggung jawab dari suatu korporasi untuk menghasilkan kekayaan dengan cara-cara yang tidak membahayakan, dan lebih berorientasi pada perlindungan atau meningkatkan aset-aset sosial (*societal assets*). Sesuai dengan pengertian tersebut di Indonesia, CSR telah menjadi salah satu fokus pemerintah yang ditekankan kepada setiap korporasi bahwa CSR telah menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan swasta maupun non-swasta di Indonesia dengan dasar Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagai manifestasi perusahaan akan kepeduliannya terhadap kondisi sosial dan lingkungan yang berada disekitarnya.

Sebagai manifestasi tersebut di Indonesia terutama di Pulau Kalimantan yang terkenal merupakan pulau yang kaya akan sumber daya mineral baik gas, minyak, batubara, hingga mineral lainnya yang memiliki nilai jual cukup tinggi di dunia menjadi fokus dan perhatian utama pemerintah akan kegiatan perindustriannya dan dampak yang terjadi terhadap lingkungannya. Pulau Kalimantan terdapat salah satu perusahaan industri terbesar pengolahan gas menjadi ammonia yang kemudian dijadikan sebagai pupuk pertanian dan perkebunan yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur yang terdapat di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur. PT. Pupuk Kalimantan Timur yang merupakan anak

perusahaan dari Pupuk Indonesia *Holding Company* (PIHC) menyadari bahwa kegiatan perindustrian di Kalimantan Timur pada khususnya perlu mendapatkan perhatian lebih dari seluruh *stakeholder* dan pemangku kepentingan yang ada dalam penanggulangan pencemaran lingkungan (Annual Report PT. Pupuk Kaltim, 2014). Kondisi lingkungan yang kini dialami telah mencapai tahap paling mengkhawatirkan serta sikap masyarakat sekitar yang semakin kritis terhadap kondisi lingkungan yang semakin terdegradasi. Sejak awal PT. Pupuk Kalimantan Timur yang berdiri di tahun 1977 telah merancang kegiatan bisnis dan produksinya dengan tanggung jawab sosial yang tinggi serta kepedulian terhadap masyarakat terutama di Kota Bontang. PT Pupuk Kalimantan Timur juga telah berusaha dan mengantisipasi kritik-kritik dari masyarakat yang ada disekitarnya dengan melaksanakan berbagai macam solusi program.

Dari tahun ke tahun, PT. Pupuk Kalimantan Timur juga selalu melakukan pencegahan dan pengendalian pencemaran dalam pengoperasian pabrik, serta melakukan upaya-upaya pendekatan persuasif, sosialisasi serta turut aktif berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program CSR yang berbasis kemasyarakatan dan pelestarian lingkungan. Namun kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan sebagai manifestasi CSR yang peduli pada kondisi lingkungan hidup belum terlalu dirasakan oleh masyarakat sekitar. Terutama pada beberapa kasus tertentu seperti munculnya bau amoniak (NH₃) dan bunyi bising di lingkungan pemukiman warga yang berbatasan langsung dengan perusahaan (*buffer zone*) terutama masyarakat yang berada di Kelurahan Guntung. Kasus munculnya bau amoniak dan bunyi bising ini yang kemudian menjadi salah satu

bentuk pencemaran udara yang dapat mengganggu pernafasan dan gangguan kesehatan lainnya bagi masyarakat sekitar. Pencemaran amoniak ditingkat lanjut yaitu 400-700ppm dapat mengakibatkan iritasi pernapasan, tenggorokan dan mata, sedangkan pencemaran yang lebih tinggi yang berada 700-5000 dapat mengakibatkan kematian (Juanda : 2011). Selain itu kebisingan juga dapat berpotensi untuk mempengaruhi kondisi kesehatan manusia apabila manusia terpapar arus suara dalam suatu periode yang lama dan terus-menerus, yang suatu saat akan melewati suatu batas di mana paparan kebisingan tersebut akan menyebabkan hilangnya pendengaran seseorang (Sasongko dkk, 2000). Selain bisa menimbulkan Tinnitus, ketulian sementara, dan ketulian permanen, kebisingan juga bisa menimbulkan gangguan komunikasi, efek pada pekerjaan, dan reaksi masyarakat (Annie, Yusuf, 2000). Dengan munculnya potensi pencemaran yang dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat *bufferzone* tersebut berbagai bentuk program dan kegiatan CSR telah dilakukan oleh pihak perusahaan dengan salah satu programnya adalah program penghijauan kawasan *barrier* industri perusahaan namun dari segi hasil masih belum bisa dirasakan. Hal ini dapat di lihat dari data keluhan masyarakat kepada perusahaan yang masuk dalam daftar keluhan masyarakat terhadap aktivitas perusahaan tahun 2014-2015 yang sebagian besar mengeluhkan bau amoniak dan bunyi bising yang terkadang mengganggu aktivitas masyarakat.

Jika dilihat dari anggaran yang disediakan oleh perusahaan dalam pelaksanaan seluruh program CSR setiap tahunnya cukup besar. Anggaran CSR perusahaan diikutsertakan dalam anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) perusahaan sebesar 26,5 Miliar (Annual Report PT. Pupuk Kaltim, 2014). Dan khusus untuk program CSR perusahaan dalam proses

penghijauan kawasan *barrier* industri untuk mengantisipasi pencemaran dari kegiatan produksi perusahaan, anggaran yang di alokasikan pada setiap tahap pelaksanaannya sebesar 75 juta (Renstra CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur, 2014). Jumlah yang cukup besar apabila dilihat dari nominal anggaran yang dialokasikan perusahaan terhadap program CSR-nya perlu dipertanyakan tentang hasil dan manfaat yang di terima oleh masyarakat sekitar perusahaan yang belum begitu maksimal.

Keadaan perusahaan yang memiliki dana alokasi atau anggaran yang cukup besar terhadap program-program CSR tersebut seharusnya sudah dapat di lihat dan dirasakan efek dari proses antisipasi terjadinya pencemaran yang muncul dari kegiatan produksi perusahaan. Namun kenyataan yang ada di dalam pelaksanaannya, kegiatan CSR perusahaan melalui program penghijauan lingkungan kawasan *barrier* industri yang dilakukan masih belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat yang tinggal dalam kawasan *bufferzone* , atas dasar tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pupuk Kaltim dalam Proses Penghijauan Kawasan Barrier Industri Untuk Mengantisipasi Pencemaran Kegiatan Produksi Perusahaan**” studi dilakukan pada kawasan Kelurahan Guntung sebagai kawasan *Buffer Zone* PT. Pupuk Kalimantan Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam Implementasi program CSR yang ada, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi program CSR Penghijauan Kawasan *Barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam upaya mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan terhadap masyarakat *buffer zone* ?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program CSR Penghijauan Kawasan *Barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam upaya mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan terhadap masyarakat *buffer zone* ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program CSR Penghijauan Kawasan *Barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam upaya mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan terhadap masyarakat *buffer zone*.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program CSR Penghijauan Kawasan *Barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam upaya mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan terhadap masyarakat *buffer zone*.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi dalam penelitian ini adalah:

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kepustakaan yang membahas tentang implementasi program-program tanggung jawab sosial perusahaan terutama dalam bidang penanganan lingkungan yang masih jarang diteliti di Indonesia.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dan mampu memberi masukan dan informasi lebih bagi perusahaan maupun *stakeholder* yang ada dalam menyusun kebijakan-kebijakan maupun program-program dalam melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial baik kepada masyarakat maupun lingkungan disekitarnya agar lebih baik dan bermanfaat.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab, masing-masing bab memberikan pokok bahasan yang saling terkait yang tersusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan mengurai tentang latar belakang dari penulisan skripsi ini yaitu implementasi program CSR Penghijauan Kawasan *Barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam upaya mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan terhadap masyarakat *buffer zone* dengan studi di Kelurahan Guntung Kota Bontang. Bab ini juga berisikan

rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan tinjauan pustaka yang akan dijadikan sebagai acuan dasar dalam penelitian yang berisi landasan teori dan pernyataan dari para pakar. Terdapat juga beberapa teori yang berhubungan dengan tema penulisan skripsi, antara lain teori yang berkaitan dengan teori implementasi, *corporate social responsibility*, dan lingkungan hidup.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan mengenai metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian. Metode penelitian tersebut meliputi : Jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian meliputi penyajian data dan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Hasil temuan-temuan dari proses identifikasi mengenai implementasi program yang diangkat oleh peneliti dan juga menjadikan data tersebut sebagai jawaban dari pertanyaan dalam perumusan masalah dengan alternatif penyelesaiannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan dan hasil selama penelitian. Pada bab ini juga akan

diuraikan tentang saran-saran yang sesuai dengan kesimpulan guna melaksanakan perbaikan di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan

1. Definisi Administrasi Publik

Banyak definisi tentang administrasi publik yang diungkapkan oleh para ahli, beberapa ahli yang memberikan pemahaman dan batasan-batasan mengenai administrasi publik. Menurut Syafiie (2003:32-33) menjelaskan bahwa:

“Administrasi Negara adalah administrasi dari Negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan (Prajudi Atmosudirjo). Administrasi Negara adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dan politik Negara (arifinn Abdulrachman). Administrasi Negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisasi, diperlengkapi, dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakan, dan dipimpin (Edward H.Litcfield). Administrasi Negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah (Dwight Waldo).

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik atau Negara merupakan segala kegiatan dan urusan yang dilakukan oleh pemerintah atau Negara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan Negara dan memenuhi kebutuhan publik beserta kepentingan masyarakatnya.

2. Administrasi Pembangunan

Istilah pembangunan adalah istilah yang selalu menjadi fokus utama dalam kegiatan bernegara dan telah menjadi sesuatu yang dapat memotivasi untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan dalam setiap aspek kehidupan. Pembangunan sering

diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Menurut Siagian (2001:4) pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara dan bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).

Pembangunan merupakan sebuah konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika dipahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri. Pembangunan adalah proses multidimensional yang menyangkut reorganisasi dan reorientasi sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Di samping untuk peningkatan suatu pendapatan atau *output* pembangunan menyangkut perubahan radikal dalam struktur kelembagaan, struktur sosial, administrasi, perubahan sikap, dan perubahan adat serta kepercayaan (Todaro, 2003).

Jika diambil secara garis besar pembangunan adalah sebuah usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang telah direncanakan dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa. Secara umum, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia dan pembangunan seluruh masyarakat. Hakikat pembangunan ini mengandung banyak makna yang menjelaskan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mendapatkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kemajuan lahir dan kepuasan batin. Pembangunan yang berkesinambungan diarahkan untuk meningkatkan

kualitas hidup manusia sehingga senantiasa mampu mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan hidup lahir dan batin Pembangunan nasional, manusia merupakan titik *central* yang mana secara keseluruhan kegiatan pembangunan harus diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa sehingga pembangunan didefinisikan sebagai proses untuk melakukan perubahan.

Administrasi Pembangunan telah berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun. Oleh karena itu, karakteristik utama administrasi pembangunan adalah memberikan pelayanan dan pengabdian yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Administrasi pembangunan sendiri memiliki dua kegiatan yang dirangkum dalam satu pengertian yaitu administrasi dan pembangunan. Menurut Siagian (2001:4) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara atau bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).

Administrasi pembangunan menurut Afiffudin (2010:62) adalah suatu ilmu administrasi publik yang mengerjakan urusan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan menyeluruh. Lebih lanjut lagi dalam Tjokroamidjojo (1995:222) mendefinisikan administrasi pembangunan tidak hanya kemampuan untuk menetapkan strategi pembangunan yang baik dan diperinci melalui rencana-rencana dan diterjemahkan dalam kegiatan nyata secara efektif dalam menangani urusan pemerintah, tetapi juga terkait dengan respon dan kerjasama seluruh rakyat

dalam proses pembangunan. Sementara itu Siagian (2001:10-11) mengemukakan tentang beberapa ciri administrasi pembangunan. Antara lain:

- a. Administrasi pembanguan memiliki peran aktif dan kepentingan (*committed*) terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaannya yang efektif. Bahkan administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan-tujuan sosial, ekonomi, dan lain-lain yang dirumuskan kebijakaannya melalui proses politik.
- b. Berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan (inovasi) ke arah pada keadaan yang dianggap lebih baik untuk masyarakat di masa yang akan datang.
- c. Lebih berorientasi kepada pembangunan (*development functions*) dari pemerintah. Hal ini untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan dan pelaksanaannya yang efektif seperti telah disebutkan seperti yang terdahulu. Yang terakhir juga dapat disebutkan sebagai kemampuan dan pengendalian instrumen-instrumen bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Administrasi pembangunan lebih bersikap sebagai *development agent*.
- d. Administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain, dengan kata lain administrasi dari kebijakan dan isi program-program pembangunan.

- e. Pada administrasi pembangunan, administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan (*change agents*).
- f. Lebih berdekatan dengan lingkungan (*ecological approach*), berorientasi pada kegiatan (*action oriented*) dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*).

Pemaparan di atas menjelaskan bahwa administrasi pembangunan dapat disimpulkan sebagai seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara dan bangsa untuk tumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan dalam bernegara dan berbangsa yang menyangkut langsung kepada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. **Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara memanfaatkan sumber daya pendukungnya. Pembangunan biasanya diupayakan dengan pertumbuhan ekonomi guna mendukung peningkatan kesejahteraan. Mencapai pertumbuhan ekonomi seringkali menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan. Dampak tersebut berupa pencemaran lingkungan dan kemerosotan kualitas sumber daya alam serta munculnya kesenjangan sosial. Oleh karena itu, munculah paradigma atau pemikiran baru tentang pembanguana guna meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh rakyat yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Pembangunan berkelanjutan bermula dari permasalahan lingkungan yang diangkat oleh komisi Brundland (*World Commision on Environment and Development*) (dalam Konferensi Stockholm, 1972) mengenai pentingnya

pembangunan yang memperhatikan faktor lingkungan. Menurut Komisi Brundland sebagaimana dikutip dan diterjemahkan oleh Sutikno dan Maryunani (2006:223), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mencukupi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan. Soemarwoto (2004:29) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial sehingga masyarakat bergantung padanya.

Jakobs sebagaimana dikutip dan diterjemahkan oleh Hadi (2011:43) mengemukakan empat prinsip pencapaian pembangunan berkelanjutan, yaitu pemenuhan kebutuhan manusia (*fulfillment of human needs*), memelihara integritas ekologi (*maintenance of ecological integrity*), keadilan sosial (*social equity*), dan kesempatan menentukan nasib sendiri (*self determinations*). Pembangunan berkelanjutan umumnya dilakukan di negara-negara berkembang dengan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai pilarnya. Tujuan sosial dapat berorientasi pada pengentasan kemiskinan, pengakuan jati diri, dan pengembangan masyarakat. Tujuan ekonomi dapat diorientasikan kepada pertumbuhan, stabilitas, dan efisiensi. Terakhir tujuan yang diambil dari aspek lingkungan dapat diorientasikan kepada pembenahan sanitasi lingkungan, industri yang bersih, dan kelestarian sumber daya alam.

B. *Good Corporate Governance* dalam Administrasi Publik

1. Konsep *Governance*

Governance adalah salah satu paradigma dari administrasi publik (Cheema, 2007:34). Konsep ini masuk ke Indonesia melalui program *good governance* yang

dipelopori oleh lembaga donor seperti Bank Dunia, UNDP, IMF, ADB, dan lain-lain pada akhir 1990-an. Salah satu adalah program kerja sama dengan UNDP pada tahun 1998 yang dikenal dengan nama “*Partnership to support Governance Reform in Indonesia*” (Indradi, 2006:3). Pandangan ini muncul karena peran pemerintah dinilai terlalu besar dan terlalu berkuasa, sehingga masyarakat tidak memiliki keleluasaan dan ruang untuk berkembang (Basuki dan Shofwan, 2006:8). Pemerintah telah merasa menjadi institusi yang paling mengerti yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga banyak kebijakan yang dibuat tanpa diwacanakan terlebih dahulu kepada masyarakat. Hal ini akhirnya membuat kebijakan bersifat *top down* dan masyarakat menjadikan dukungan pemerintah dari masyarakat menurun.

Istilah *governance* menurut Kooiman dalam (Sedarmayanti, 2004:2) adalah:

“...serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut”.

Istilah *governance* bukan hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan saja, melainkan juga mengacu kepada arti kepengurusan, pengarahan, pengelolaan, dan pembinaan penyelenggaraan. Dari sini dapat dipahami bahwa keterlibatan masyarakat dalam sistem pemerintahan merupakan semangat yang terdapat dalam konsep *good governance*.

a. Good Governance

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengemukakan bahwa wujud *good governance* yaitu penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan efektif, serta solid dan bertanggung jawab, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif

diantara domain-domain Negara, sektor swasta, dan masyarakat (Basuki dan Shofwan, 2006:9). Jadi, secara garis besar LAN mengelompokkan *good governance* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Negara: Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan yang melibatkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta melibatkan peran sektor swasta dan masyarakat dalam mengelola Negara.
2. Sektor Swasta: Aktor sektor swasta terdiri dari perusahaan swasta aktif dalam interaksi sistem pasar seperti industri pengolahan, perdagangan, perbankan, koperasi, hingga sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL).
3. Masyarakat: Dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara pemerintah dan perserorangan, yang mencakup baik perserorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, maupun ekonomi.

United Nation Development Programme (UNDP) dalam Sedarmayanti (2004:3) mendefinisikan *governance* sebagai berikut:

“Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country’s affair at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population”.

Governance adalah pelaksanaan kewenangan di bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara di semua tingkat dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong kepaduan sosial, integrasi, dan menjamin kesejahteraan masyarakat.

b. Prinsip-prinsip *Good Governance*

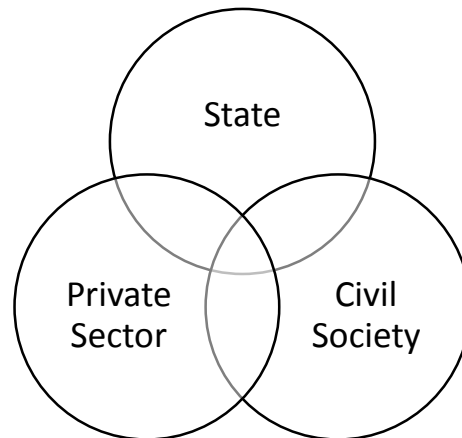
Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik maupun buruk sebuah pemerintahan dapat dinilai bila telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu prinsip dalam menjalankan *good governance* dikemukakan oleh Giddens yang menjelaskan secara spesifik langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam kerangka *good governance*, antara lain:

- 1) Menyediakan sarana untuk perwakilan kepentingan masyarakat yang beragam, menawarkan sebuah forum untuk rekonsiliasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.
- 2) Menciptakan dan melindungi ruang publik yang terbuka yang debat bebas mengenai isu-isu kebijakan bisa dilanjutkan.
- 3) Menyediakan beragam hal untuk memenuhi kebutuhan warga negara termasuk bentuk-bentuk keamanan dan kesejahteraan kolektif, mengatur pasar menurut keputusan publik dan menjaga persaingan pasar ketika monopoli mengancam, menjaga keamanan sosial melalui kontrol sarana kekerasan.
- 4) Mendukung perkembangan sumber daya manusia melalui sistem pendidikan, menopang sistem hukum yang efektif, yang menjamin perselisihan ditangan secara adil atau tidak diskriminatif.
- 5) Memainkan peran ekonomi secara langsung, yaitu sebagai pemberi kerja dalam intervensi makro maupun mikro ekonomi, ditambah menyediakan infrastruktur.
- 6) Melaksanakan sistem administrasi yang efektif dan efisien, yaitu mempertahankan pelayanan kualitas tinggi kepada warga negara, memproteksi lingkungan agar tidak dieksploitasi secara sembarangan dan mendorong aliansi regional dan transnasional serta meraih sasaran-sasaran global. (Gideens, 2000)

Pendapat lain tentang prinsip-prinsip dalam menjalankan *good governance* dikemukakan UNDP dalam (EROPA, 2000) yang menyatakan dalam praktik pemerintahan harus adanya sepuluh prinsip untuk terselenggaranya *good governance*, yaitu:

- 1) Partisipasi masyarakat. Mendorong setiap warga negara untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai subyek dalam program pembangunan.
- 2) Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
- 3) Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat.
- 4) Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
- 5) Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali.
- 6) Wawasan kedepan. Membangun daerah berdasarkan visi, misi, dan strategi yang jelas serta mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan.
- 7) Akuntabilitas. Meningkatkan tanggung gugat para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
- 8) Pengawasan. Meningkatkan kepengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat.
- 9) Efisiensi dan efektifitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan publik dengan menggunakan sumber daya secara optimal dan bertanggung jawab.
- 10) Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral pelayanan publik agar dapat memberikan pelayanan yang cepat, murah, dan memuaskan.

Prinsip *good governance* di atas dapat diketahui sesungguhnya *good governance* merupakan upaya mengubah watak dan perilaku pemerintah untuk tidak bekerja sendiri tanpa memperhatikan kepentingan atau aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik efektif dalam perspektif *good governance* ini adalah produk interaksional yang sinergi dari beragam *stakeholder*.



Gambar 2. Peran *Stakeholder* dalam *Good Governance*
 Sumber: (UNDP dalam EROPA, 2000)

Gambar diatas menerangkan bahwa terdapat urusan yang membutuhkan jalinan kemitraan diantara ketiganya. Didalam mengurus urusan ini, kondisi-kondisi yang menjadi syarat terciptanya sinergi dalam hubungan antar *stakeholder* haruslah menjadi fokus utama. Setiap *stakeholder* juga harus mampu mengolaborasikan tujuan-tujuan mereka menjadi sebuah tujuan bersama dimana tujuan tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masing-masing *stakeholder*.

c. *Stakeholder*

Stakeholder adalah semua pihak, internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (Hadi, 2011 : 93). Lebih lanjut lagi, Biset dalam Nawawi (1998) mendefinisikan *Stakeholder* sebagai orang atau kelompok orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada suatu pemasalahan. Lembaga-lembaga publik telah menggunakan secara luas istilah *stakeholder* ke dalam proses-proses pengambilan dan implementasi sebuah keputusan.

Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh *stakeholder* terhadap suatu isu. *Stakeholder* dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok, yaitu:

- a. *Stakeholder* utama (primer). *Stakeholder* utama merupakan *stakeholder* yang memiliki kaitan penting secara langsung dalam suatu kebijakan, program, dan proyek. *Stakeholder* utama harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan, seperti tokoh masyarakat yang akan menjadi obyek kebijakan atau program, pimpinan instansi pemerintah yang bertanggungjawab secara langsung dalam pengambilan atau implementasi program, ataupun pimpinan perusahaan yang menjadi mitra pemerintah dalam mendanai implementasi program maupun sebagai perumus dan pembuatan suatu program yang berkaitan dengan *stakeholder* disekitar perusahaan.
- b. *Stakeholder* pendukung (sekunder). *Stakeholder* pendukung adalah *stakeholder* yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan maupun program, namun memiliki kepedulian dan perhatian lebih terhadap suatu permasalahan tertentu sehingga *stakeholder* turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Sebagai contoh adalah lembaga pemerintah dalam suatu wilayah namun tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab secara langsung, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan perguruan Tinggi.
- c. *Stakeholder* Kunci. *Stakeholder* kunci adalah *stakeholder* yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan.

Stakeholder kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sebagai tingkatannya, legislatif, dan instansi yang memiliki kewenangan untuk menjalankan program. Sebagai contoh adalah *stakeholder* kunci untuk suatu keputusan program dalam level kabupaten yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, dan Dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan.

Pengategorian tipe *stakeholder* ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing *stakeholder* dalam sebuah usaha kerjasama yang mereka bentuk, baik di dalam proses penyusunan maupun implementasi suatu program. Usaha kerjasama yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mengantisipasi pencemaran lingkungan yang mungkin terjadi akibat kegiatan proses produksi perusahaan di Kota Bontang terhadap masyarakat sekitar.

2. *Good Corporate Governace*

Secara umum istilah *governance* lebih ditunjukkan untuk sistem pengendalian dan pengaturan sebuah lembaga yang memiliki struktur organisasi. *Governance* di dalam sebuah korporasi memiliki artian lebih ditunjukkan pada tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para *stakeholder*. Tata kelola perusahaan yang baik yang kemudian di sebut *Good Corporate Governance* (GCG) memang menyangkut kepada orang (moralitas), etika kerja, dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Istilah GCG merupakan suatu sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definision*),

maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dalam mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*). Pengertian *corporate governance* menurut Turnbull Report di Inggris (1999) dalam Effendi (2009:1) adalah sebagai berikut:

“Corporate governance is company’s system of internal control, which has as its principal aim the management of risks that are significant to the fulfillment of its business objectives, with a view to safeguarding the company’s assets and enhancing over time the value of the shareholders investment”

Berdasarkan pengertian di atas, *corporate governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Komite Cadbury dalam Surya dan Yustiavandana (2006) mendefinisikan GCG sebagai berikut:

“GCG adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensi dan pertanggungjawaban kepada stakeholder. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya”

Menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam Khairandy dan Malik (2007:63-64) GCG adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan, dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur untuk membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut. Konsep ini juga menyangkut hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan tersebut, mulai dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, komisaris, juga

mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dri struktur perseroan yang unsur-unsurnya berada diluar perseroan yang pada hakikatnya merupakan *stakeholder* dari perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan peroleh pajak dari perseroan yang bersangkutan dan masyarakat luas yang meliputi investor publik dari perseroan (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditur, dan calon kreditur perseroan.

Pengertian-pengertian mengenai GCG di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa GCG merupakan tata kelola perusahaan yang baik dan memiliki tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh *stakeholder* perusahaan. Jika perusahaan dikelola dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip GCG maka perusahaan dapat menyeimbangkan hubungan dengan masyarakat sekitar perusahaan, konsumen, *supplier*, dan *stakeholder* lainnya. Jadi tidak ada standar formula GCG yang dapat diterapkan secara efektif karena penerapan sistem GCG akan disesuaikan dengan keadaan masing-masing perusahaan. Maka perusahaan perlu merumuskan standar GCG sendiri dengan dasar kebutuhan dan keadaan perusahaan mereka masing-masing dan tetap mengacu pada standar GCG yang berlaku di negara yang bersangkutan maupun dengan standar Internasional.

3. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Pelaksanaan GCG baik untuk tujuan internal maupun eksternal perusahaan perlu memperhatikan prinsi-prinsi GCG dengan baik dan cermat. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) merupakan alat untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan akuntabilitas publik. Meskipun GCG adalah sebuah istilah yang relatif baru digunakan untuk suatu konsep lama yaitu kewajiban industri dari

penanggung jawab yang mengontrol perusahaan untuk bertindak bagi kepentingan seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, menjadi sebuah harapan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan investor. Beberapa prinsip GCG yang ada di Indonesia tertuang dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meliputi:

- 1) *Transparansi*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.
- 2) Kemandirian, yaitu suatu keadaan pada saat perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 3) Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksana, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- 4) Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 5) *Fairness* (kewajaran), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pieris dan Wiryawan (2008:141) prinsip dasar *corporate governance* meliputi empat aspek, yaitu:

- 1) *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan dengan menyiapkan Laporan Keuangan pada waktu dan cara yang tepat, mengembangkan komite audit, mengembangkan, dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit.
- 2) *Fairness* (kewajaran), yaitu perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutam kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Prinsip ini diwujudkan dengan *corporate conduct* (pedoman perilaku perusahaan), kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, *self dealing*, dan konflik kepentingan.
- 3) *Transparancy* (keterbukaan), yaitu pengungkapan yang dilakukan tepat pada waktunya serta terbuka mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta *stakeholder*. Prinsip ini dapat diwujudkan antara lain dengan mengembangkan *accounting system*, *information technology*, dan *management information system*.
- 4) *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Prinsip-prinsip GCG yang telah dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa GCG bukan hanya tentang persoalan membentuk organ-organ perusahaan seperti komisaris independen dan komite audit, tetapi GCG adalah tentang cara menciptakan pengelolaan perusahaan yang profesional melalui penerapan sistem *accounting* dan keuangan yang memenuhi standar, cara manajemen dilengkapi dengan sistem teknologi informasi yang mendukung operasional perusahaan, dan tentang penerapan asas pertanggungjawaban sosial yang dilakukan atas dasar kepedulian perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan maupun produksi perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility*.

C. Corporate Social Responsibility

1. Definisi dan Konsep Corporate Social Respon

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan konsep yang sulit diartikan secara khusus dan lebih dalam. Hal inilah yang membuat definisi CSR sangatlah luas dan bervariasi. Pengertian CSR menurut Lord Holme dan Richard Watt, dalam Hadi (2011:46)

“CSR adalah komitmen berkelanjutan dari perusahaan yang berjalan secara etis dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka, dan juga komunitas lokal serta masyarakat luas”

Pengertian CSR menurut Johnson dan Johnson, dalam Nor Hadi (2011:46) menyatakan bahwa : “*CSR is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact to society*”. Definisi ini pada dasarnya berangkat dari filosofi cara mengelola perusahaan baik sebagian maupun keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungannya. Jadi perusahaan harus mampu mengelola operasi bisnisnya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Ghana dalam Elvinaro dan Dindin (2011:37) mendefinisikan CSR sebagai berikut: “*CSR is about capacity building for sustainable likelihood. It respect cultural differences and finds the bussines opportunities in building the skill of employees, the community and the government*”. Definisi ini memberikan penjelasan secara lebih dalam bahwa sesungguhnya CSR membangun kapasitas yang kemungkinan berkelanjutan. CSR menghargai perbedaan budaya dan menemukan peluang-peluang bisnis dalam membangun keterampilan, komunitas, dan pemerintah.

Pengertian CSR menurut Steiner dan Steiner (2009) dalam Andreas (2011:212) CSR adalah tanggungjawab dari suatu korporasi untuk menghasilkan kekayaan dengan cara-cara yang tidak membahayakan, melindungi atau meningkatkan aset-aset sosial (*societal assets*). Pengertian CSR menurut Anne dan James (2011:45) adalah: “*Corporate social responsibility is the idea that businesses interact with the organization’s stakeholders for social good while they pursue economic goals*”. Pengertian lain dari konsep CSR yang berkaitan dengan ekonomi dari maksimalisasi nilai pasar, dengan menggunakan pendekatan definisi ,shareholder model yang dikemukakan oleh Friedman dan Hemphill dalam Daniri (2008) yang menyatakan bahwa :

“The Responsibility of a corporation is to conduct the bussines in accordance with (ownwers or shareholders) desires, which generally will be to make as much money as possible while conforming to the basic rules of society, both those embodied in law and those embodied in ethical custom”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi baik dalam jangka panjang terhadap suatu isu tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Hal ini perlu dibedakan antara program CSR dengan *charity*. Kegiatan *charity* hanya berlangsung sekali atau sementara waktu dan biasanya justru menimbulkan ketergantungan publik terhadap perusahaan. Sementara, program CSR merupakan program yang berkelanjutan dan bertujuan untuk menciptakan kemandirian publik.

2. *Corporate Social Responsibility* di Indonesia

Indonesia dalam praktiknya *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah diatur dalam beberapa kebijakan pemerintah melalui undang-undang (UU) maupun peraturan pemerintah seperti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan dalam Pasal 74 ayat (1) bahwa: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Selain melalui UU kegiatan CSR di Indonesia juga diperkuat lagi melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam PP tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan CSR dan sistem anggaran yang diperuntukan bagi kegiatan CSR perusahaan. PP tersebut juga menjelaskan bahwa perseroan wajib melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan. Apabila dalam pelaksanaannya sebuah perusahaan tidak melaksanakan akan dikenakan hukuman pidana sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan CSR di Indonesia dalam bidang lingkungan didasarkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seperti yang tertuang dalam pasal 1 bahwa setiap orang atau korporasi wajib ikut serta menjaga dan tidak melakukan pencemaran maupun pengrusakan lingkungan hidup. UU ini juga menjelaskan bahwa setiap orang atau korporasi wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pengawasan lingkungan hidup. Secara khusus dalam UU UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menyinggung tentang

konservasi sumber daya alam atau pengelolaan sumberdaya alam secara bijaksana serta berkesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

Pelaksanaan CSR di Indonesia ditujukan sebagai komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial di mana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan. Namun, masih ada perusahaan yang mempersepsi CSR sebagai bagian dari biaya atau tindakan reaktif untuk mengantisipasi penolakan masyarakat dan lingkungan. Beberapa perusahaan memang mampu mengangkat status CSR ke tingkat yang lebih tinggi dengan menjadikannya sebagai bagian dari upaya *brand building* dan peningkatan *corporate image*. Namun upaya-upaya CSR tersebut masih jarang yang dijadikan sebagai bagian dari perencanaan strategis perusahaan. Masyarakat kini telah semakin *well informed*, dan kritis serta mampu melakukan filterisasi terhadap dunia usaha yang tengah berkembang. Hal ini menuntut para pengusaha untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggung-jawab. Pengusaha tidak hanya dituntut untuk memperoleh *capital gain* atau *profit* dari kegiatan usahanya, melainkan juga diminta untuk memberikan kontribusi baik materil maupun spirituil kepada masyarakat dan pemerintah sejalan dengan aturan yang berlaku.

3. Pilar dan Bentuk Program *Corporate Social Responsibility*

Secara teori CSR terdapat lima pilar aktivitas yang telah dijelaskan oleh *Prince of Wales International Bussines Forum* (Wibisono, 2007:119), yaitu:

- a) *Building Human Capital*. Secara internal, perusahaan dituntut untuk menciptakan SDM yang andal. Secara eksternal, perusahaan dituntut untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.
- b) *Strengthening Economies*. Perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin. Oleh karena itu, perusahaan harus memberdayakan ekonomi penduduk sekitar.
- c) *Assesing Social Cohesion*. Perusahaan dituntut untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan konflik.
- d) *Encouraging Good Governance*. Saat menjalankan bisnisnya, Perusahaan harus menjalankan tata kelola bisnis dengan baik.
- e) *Protecting The Environment*. Perusahaan dituntut untuk berupaya keras menjaga kelestarian lingkungan yang menjadi tempat perusahaan itu beroperasi atau tempat-tempat yang berpotensi terkena dampak negatif dari proses produksi perusahaan

Pilar-pilar yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan serta gerak implementasi program CSR tidak ditekankan pada kegiatan eksternal saja, melainkan juga dari internal perusahaan yang dimulai dari pengembangan kualitas sumber daya manusia perusahaan yang nanti akan berpengaruh dalam implementasi program CSR perusahaan. Selain dari pilar-pilar CSR juga terdapat klasifikasi program CSR yang dibagi dalam beberapa bentuk. Kotler dalam Siagian (2010) menyebutkan beberapa bentuk program CSR yang dapat dipilih, yaitu:

a) *Cause Promoting*

Cause promoting, perusahaan berusaha untuk meningkatkan *awareness* masyarakat mengenai suatu isu tertentu, isu tersebut tidak harus berhubungan atau berkaitan dengan lini bisnis perusahaan. *Cause promoting* dapat dilakukan dalam bentuk mengajak orang untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan acara tertentu seperti menandatangani petisi maupun mengajak masyarakat untuk mendalami isu tertentu dengan mengadakan seminar.

b) *Cause-Related Marketing*

Pada program ini, perusahaan akan mengajak masyarakat untuk membeli atau menggunakan produknya, baik itu barang maupun jasa, yang mana sebagian dari keuntungan yang didapatkan dari perusahaan akan didonasikan untuk membantu mengatasi atau mencegah masalah tertentu. Program *cause-related marketing* dapat berupa pengalokasian dana sekian persen dari setiap barang yang terjual untuk didonasikan kepada kelompok target program.

c) *Corporate Social Marketing*

Program *Corporate Social Marketing* (CSM), perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk merubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kampanye CSM lebih banyak terfokus untuk mendorong perubahan perilaku yang berkaitan dengan beberapa isu yakni isu kesehatan,

perlindungan terhadap kecelakaan/ kerugian, lingkungan serta keterlibatan masyarakat (Kotler dalam Solihin: 2009)

d) *Corporate Philanthropy*

Perusahaan dengan program *Corporate Philanthropy* memberikan kontribusi langsung secara cuma-cuma (*charity*) dalam bentuk hibah tunai, sumbangan dan sejenisnya, sebagaimana dikemukakan oleh Kotler (2005: 144) : “*Corporate Philanthropy is a direct contribution by a corporation to a charity or cause, most often in the form of cash grants, donations and or in kind services*”. *Corporate Philanthropy* adalah tindakan perusahaan untuk memberikan kembali kepada masyarakat sebagian dari kekayaannya sebagai ungkapan terimakasih atas kontribusi masyarakat, seperti yang ditulis oleh Kakabadse, Nada Kakabadse dan Rozuel (2000: 26): “*Corporate philanthropy refers to the firm giving back to society some of wealth it has created thanks to society’s input*”.

e) *Corporate Volunteering*

Melalui program *Community Volunteering*, perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, para pemegang *franchise* atau rekan pedagang eceran untuk menyisihkan waktu perusahaan secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program.

f) *Socially Responsible Bussiness*

Socially Responsible Business Practice (SRBP), menurut Kotler (2005:208) adalah: “*where the corporation adapts and conducts discretionary*

business practices and investments that support social causes to improve community well being and protect the environment". Yang dapat diartikan "praktek bisnis dimana perusahaan melakukan investasi yang mendukung pemecahan suatu masalah sosial untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas dan melindungi lingkungan". Perusahaan telah melakukan praktek bisnis melampaui standar etika yang telah ditetapkan berdasarkan regulasi. Komunitas yang dimaksud di atas di antaranya adalah karyawan perusahaan, pemasok, distributor, organisasi nirlaba dan sektor publik yang menjadi mitra perusahaan, serta masyarakat secara umum. kesejahteraan yang dimaksud adalah kesehatan, keselamatan, serta pemenuhan akan kebutuhan psikologis dan emosional.

D. Implementasi Program

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik pada suatu Negara. Implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan disahkan. Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan. Akan tetapi pada kenyataannya dapat dilihat bahwa seberapa hebatnya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak direalisasikan dengan baik dan benar, sehingga di sini membutuhkan pelaksanaan yang benar-benar jujur, memiliki kompetensi yang sesuai, komitmen yang tinggi untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuannya, dan benar-benar memperhatikan rambu-rambu pemerintah yang berlaku (Keban, 2004:72).

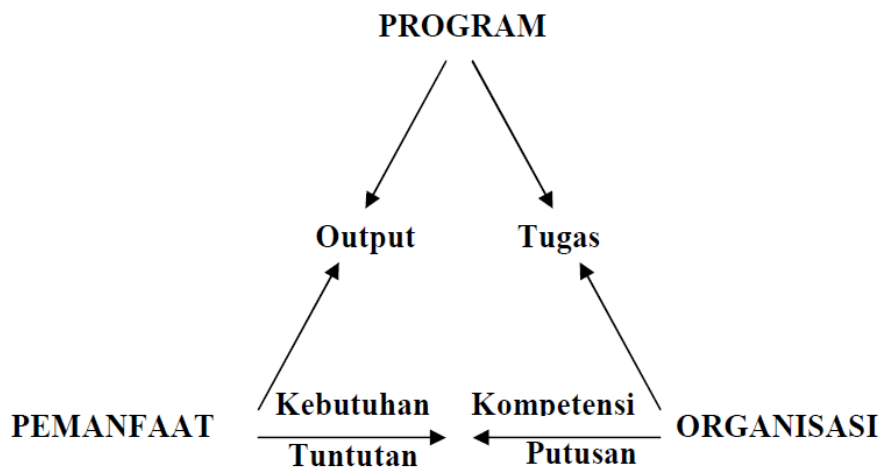
Menurut Syauckani (2004 : 295) implementasi merupakan rangkaian aktivitas dalam rangka menghatarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk sarana prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga cara menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Kemudian pengertian program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Jones dalam Rohman (2009: 101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones (Suryana, 2009: 28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

1. Pengorganisasian struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
2. Interpretasi para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3. Penerapan atau aplikasi perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3. Model Kesesuaian Implementasi Program

Sumber: Akib dan Tarigan (2000:11)

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu

kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (Akib dan Tarigan, 2000: 12).

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila *output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas *output* tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan *output* program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan *output* program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

George C. Edwards III dalam Winarno (2005:149-160) menjelaskan empat variabel implementasi yang dapat digunakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Keberhasilan implementasi disampaikan melalui proses komunikasi agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, yang menjadi tujuan dan sasaran

kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber daya

Sumber daya yang disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya peralatan. Tanpa sumber daya, kebijakan tidak akan berjalan efektif.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor apabila implementor memiliki disposisi baik, maka akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan para pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.

4. Struktur birokrasi bertugas mengimplementasikan kebijakan dan memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar atau SOP (*Standard Operating Procedures*). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Jika struktur organisasi terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape* yaitu prosedur birokrasi rumit dan kompleks, sehingga menimbulkan struktur yang tidak fleksibel.

Pada dasarnya para ahli telah mengemukakan pendapat mengenai model-model implementasi kebijakan. Seperti Edward III yang menjelaskan tentang 4 variabel yang dapat berpengaruh pada keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Demi mendapatkan implementasi yang lebih efektif maka diperlukan adanya tahapan-tahapan perumusan hingga implelementasi kebijakan yang kemudian dituangkan menjadi sebuah program, dalam Islamy (2003:102) membagi tahap implementasi ke dalam dua bentuk yaitu:

1. Bersifat *self-executing* yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan tersebut, maka program akan terimplementasi dengan sendirinya.
2. Bersifat *non-self-executing*, berarti bahwa suatu kebijakan yang telah ditentukan dan disahkan dalam pelaksanaannya perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tersebut tercapai.

Pada konteks ini, program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam usahanya mengantisipasi pencemaran lingkungan akibat proses industri lebih bersifat *non-self-executi* karena perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak agar tujuan dapat tercapai. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa proses implementasi tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menghasilkan sebuah langkah antisipatif yang maksimal dan ketaatan pada kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut kekuasaan politik, ekonomi dan sosial yang berlangsung atau tidak

langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh pada dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

E. Pencemaran Produksi Perusahaan

Di Indonesia pencemaran dari kegiatan produksi sebuah perusahaan telah menjadi sebuah isu yang cukup berkembang sejak zaman kemerdekaan. Salah satu wujud bahwa Indonesia yang terus berkembang terutama dalam bidang industri maka munculnya isu-isu pencemaran lingkungan patut mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah secara umum dan khususnya perusahaan itu sendiri. Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup menjelaskan pencemaran merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pencemaran sendiri terbagi menjadi tiga kategori yang berbeda yaitu pencemaran yang terjadi di air, pencemaran yang terjadi di darat, dan pencemaran yang terjadi di udara. Ketiga kategori pencemaran tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Pencemaran Air

Pencemaran adalah suatu penyimpangan dari keadaan normalnya jadi pencemaran air adalah suatu keadaan air tersebut telah mengalami penyimpangan dari keadaan normalnya. Keadaan normalnya masih tergantung pada faktor penentu, yaitu kegunaan air itu sendiri dan asal sumber air

Pencemar air dapat menentukan indikator yang terjadi pada air lingkungan.

Pencemar air dikelompokkan sebagai berikut:

a. Bahan buangan organik.

Bahan buangan organik pada umumnya berupa limbah yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme, sehingga hal ini dapat mengakibatkan semakin berkembangnya mikroorganisme dan mikroba patogen pun ikut juga berkembang biak di mana hal ini dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit.

b. Bahan buangan anorganik.

Bahan buangan anorganik pada umumnya berupa limbah yang tidak dapat membusuk dan sulit didegradasi oleh mikroorganisme. Apabila bahan buangan anorganik ini masuk ke air lingkungan maka akan terjadi peningkatan jumlah ion logam di dalam air, sehingga hal ini dapat mengakibatkan air menjadi bersifat sadah karena mengandung ion kalsium (Ca) dan ion magnesium (Mg). Selain itu ion-ion tersebut dapat bersifat racun seperti timbal (Pb), arsen (As) dan air raksa (Hg) yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia.

c. Bahan buangan zat kimia

Bahan buangan zat kimia banyak ragamnya seperti bahan pencemar air yang berupa sabun, bahan pemberantas hama, zat warna kimia, larutan penyamak kulit dan zat radioaktif. Zat kimia ini di air lingkungan merupakan racun yang mengganggu dan dapat mematikan hewan air, tanaman air dan mungkin juga manusia

Sumber-sumber Pencemaran Air dapat muncul dan timbul dari berbagai macam penyebab. Pencemaran air akibat kegiatan manusia tidak hanya disebabkan oleh limbah rumah tangga, tetapi juga oleh limbah pertanian dan limbah industri. Semakin meningkatnya perkembangan industri, dan pertanian saat ini, ternyata semakin memperparah tingkat pencemaran air, udara, dan tanah. Pencemaran itu disebabkan oleh hasil buangan dari kegiatan tersebut. Pencemaran air pada dasarnya terjadi karena air limbah langsung dibuang ke badan air ataupun ke tanah tanpa mengalami proses pengolahan terlebih dulu, atau proses pengolahan yang dilakukan belum memadai. Pengolahan limbah bertujuan memperkecil tingkat pencemaran yang ada agar tidak membahayakan lingkungan hidup.

2. Pencemaran Darat

Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Polusi tanah terjadi ketika ada penumpukan senyawa beracun yang terus-menerus, garam, bahan radioaktif, bahan kimia atau penyakit dalam tanah yang mempengaruhi manusia, hewan dan kesehatan tanaman. Polusi tanah terutama akibat aktivitas manusia maupun industri terutama dalam bidang pertanian maupun perkebunan, seperti aplikasi pestisida seperti atrazin, yang merupakan obat pembunuh rumput-rumputan yang populer, dan generasi limbah industri yang tidak diinginkan seperti arsenik. Polusi tanah perubahan komposisi tanah dan menciptakan lingkungan tanah patogen, menyebabkan penyebaran penyakit. Kanker Pestisida, benzena, kromium dan pembunuh gulma bersifat karsinogen

yang telah dibentuk untuk menyebabkan semua jenis kanker. Paparan jangka panjang benzena bertanggung jawab untuk siklus haid tidak teratur pada wanita, leukemia dan anemia. Tingkat tinggi paparan terhadap benzena adalah fatal. Benzene adalah cairan kimia yang ditemukan dalam minyak mentah, bensin dan asap rokok. Hal ini digunakan dalam sintesis kimia dan mengganggu fungsi seluler dengan mengurangi produksi sel darah merah, sel darah putih dan antibodi, sehingga mengorbankan imunitas tubuh. Dalam polusi tanah ini juga menimbulkan penyakit kanker yang disebabkan oleh polusi tanah.

3. Pencemaran Udara

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran udara dapat terjadi jika jumlah atau konsentrasi polutan (zat pencemar) di udara sudah melebihi baku mutu lingkungan. Untuk masing-masing polutan di udara mempunyai nilai baku mutu yang berbeda. Udara yang telah tercemar oleh polutan tertentu dapat menyebabkan turunnya mutu udara di lingkungan tersebut. Udara yang telah tercemar dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya secara langsung.

Dampak yang ditimbulkan terkait studi yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan pencemaran bau amoniak yang tercium di lingkungan masyarakat serta munculnya bunyi bising karena proses kegiatan produksi perusahaan pengolahan produksi. Berikut dampak pencemaran udara yang ditimbulkan akibat kegiatan produksi perusahaan:

a. Bunyi bising.

Menurut Sasongko, dkk (2000), kebisingan merupakan gangguan yang berpotensi mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan terutama berasal dari kegiatan operasional peralatan pabrik, sedangkan operator (karyawan yang mengoperasikan peralatan pabrik) merupakan komponen lingkungan yang terkena pengaruh yang diakibatkan adanya peningkatan kebisingan. Oleh sebab itu diperlukan upaya pengendalian bising di lingkungan pabrik yang mencakup pengendalian untuk karyawan dan juga untuk lingkungan sekitar pabrik.

Risiko kerusakan pendengaran (*Damage Risk on Hearing*) pada karyawan dapat disebabkan oleh paparan bising karena tingkat bising yang tinggi atau waktu kumulatif paparan yang berlebihan. Karyawan industri sangat rentan terhadap kerusakan pendengaran dalam bentuk pergeseran ambang dengar temporal (*Temporary Threshold Shift-TTS*) atau permanen (*Permanent Threshold Shift-PTS*). Kerusakan pendengaran ditandai dengan meningkatnya ambang dengar (*Threshold of Hearing*) atau menurunnya sensitivitas dengar (*Hearing Sensitivity*) secara temporer atau permanen (QuadrantUtama, 2002).

Kebisingan bisa mengganggu percakapan sehingga mempengaruhi komunikasi yang sedang berlangsung, selain itu dapat menimbulkan gangguan psikologis seperti kejengkelan, kecemasan, dan ketakutan. Gangguan psikologis

akibat kebisingan tergantung pada intensitas, frekuensi, perioda, saat dan lama kejadian, kompleksitas spektrum / kegaduhan dan ketidakteraturan kebisingan. Kebisingan dapat menimbulkan gangguan terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan seseorang melalui gangguan psikologi dan gangguan konsentrasi sehingga menurunkan produktivitas kerja (Sasongko dkk., 2000).

Kebisingan berpotensi untuk mengganggu kesehatan manusia apabila manusia terpapar aras suara dalam suatu periode yang lama dan terus-menerus, yang suatu saat akan melewati suatu batas di mana paparan kebisingan tersebut akan menyebabkan hilangnya pendengaran seseorang (Sasongko dkk, 2000). Selain bisa menimbulkan Tinnitus, ketulian sementara, dan ketulian permanen, kebisingan juga bisa menimbulkan gangguan komunikasi, efek pada pekerjaan, dan reaksi masyarakat (Annie, 2000).

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-51/MEN/1999, tentang Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan di tempat kerja, ditetapkan sebesar 85 dBA. Nilai ambang batas kebisingan di tempat kerja adalah intensitas tertinggi dan merupakan nilai rata-rata yang masih dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan hilangnya daya dengar yang tetap untuk waktu kerja secara terus menerus tidak lebih dari 8 jam sehari dan 40 jam seminggu (lihat tabel 1).

Tabel 1: Batas Kebisingan Maksimum

Lama kebisingan yang diperbolehkan /hari (jam)	Maksimum, dBA
8	85
4	88
2	91
1	94
0.5	97
0.25	100

Sumber: Menurut Kepmen No. 51/MEN/1999

Kegiatan operasional pabrik-pabrik PT. Pupuk Kaltim yang menggunakan peralatan-peralatan seperti turbin dan *compressor* serta pengaliran fluida dalam pipa-pipa, *valve*, *gas exhaust* merupakan sumber kebisingan, sampai 90 dBA. Peralatan-peralatan tersebut dalam kegiatan produksi diasumsikan sebagai sumber bising (PKT-UNDIP, 2004).

Berikut pengaruh yang dapat terjadi akibat terjadinya kebisingan menurut suma'mur (2009:118):

1) Gangguan Kesehatan

Gangguan yang berpotensi terjadi pada kesehatan adalah kerusakan kepada indera-indera pendengar yang menyebabkan tuli progresif. Awalnya efek kebisingan pada pendengaran adalah sementara dan pemulihan terjadi secara cepat sesudah dihentikan kerja ditempat bising. Kehilangan daya dengar yang menetap dan tidak pulih kembali dapat terjadi apabila tenaga kerja bekerja secara terusmenerus ditempat bising, biasanya dimulai pada frekwensi-frekwensi sekitar 4.000 Hz dan kemudian menghebat dan meluas ke frekwensi-frekwensi sekitarnya dan akhirnya mengenai frekwensi-frekwensi yang digunakan untuk percakapan.

2) Gangguan pada Daya Kerja

Kebisingan mempunyai efek merugikan kepada daya kerja yaitu mengganggu komunikasi pembicaraan. Tenaga kerja yang bekerja pada daerah bising maka komunikasi pembicaraannya harus dilakukan dengan berteriak, hal ini akan menyebabkan terganggunya pekerjaan, terutama bagi tenaga kerja baru.

3) Gangguan pada Pekerjaan

Kebisingan dapat mengganggu perhatian dan konsentrasi yang dicurahkan kepada pekerjaan. Tenaga kerja yang melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap suatu proses produksi atau hasil dapat menyebabkan terjadinya kesalahan yang merupakan akibat dari terganggunya konsentrasi. Kebisingan juga menyebabkan berkurangnya kenyamanan dalam bekerja dan menimbulkan kelelahan terhadap pekerjaan.

4) Gangguan Masyarakat

Kebisingan mempunyai pengaruh yang besar, apabila kebisingan akibat suatu proses produksi meningkat, sehingga masyarakat sekitar akan merasa terganggu.

b. Bau amoniak.

Amoniak adalah bahan baku pembuatan urea, dalam pabrik terdapat kelebihan amoniak yang kemudian di tampung dalam tanki khusus penyimpanan amoniak. Amoniak merupakan zat yang sangat volatilitas dengan titik didih normal -33°C pada tekanan atmosferis. Untuk mendapatkan amoniak dalam kondisi cair, dan mempermudah dalam penyimpanan dan pengangkutan, maka terhadap gas amoniak diberlakukan proses tekanan tinggi dengan suhu rendah melalui bantuan compressor, sehingga gas amoniak menjadi cair (susiyanto, 2007). Uap yang terbentuk akibat panas lingkungan dan uap yang terbawa dari saluran pemasukan berada di bagian atas dalam tanki diambil dan diproses pada compressor untuk dicairkan kembali. Amoniak sendiri merupakan bahan racun

yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata dan tenggorokan, sedangkan pada tingkat konsentrasi rendah (<25 ppm) paparan amoniak relative tidak berbahaya.

Amoniak yang merupakan gas tak berwarna dan berbau menyengat, mudah dicairkan dan kelarutannya di dalam air sangat tinggi, satu bagian volume air akan melarutkan 1,30 bagian volume NH₃. Pada suhu kamar dan tekanan 1 atm. Amoniak berbentuk uap dan pada temperature -33OC amoniak berbentuk cair. Gas amoniak merupakan gas yang *tokik* dengan nilai ambang batas di udara untuk 8 jam kerja adalah 25 ppm, sifat lain adalah merupakan gas yang higroskopis, mudah menyerap air dan mempunyai kelarutan terhadap air dengan semua komposisi didalam air, sebagian amoniak terionisasi menjadi ion NH₄ dan sebagian lagi masih berupa NH₃ bebas yang berada dalam keseimbangan dengan ionnya yaitu NH₄ dan OH. Adanya ion OH menjadikan pH perairan yang terpapar akan menjadi basa dan besarnya tergantung dari jumlah OH yang terbentuk, dimana semakin pekat dan banyak amoniak dalam air akan semakin tinggi OH nya dan semakin tinggi pula NH₃ bebasnya (susiyanto, 2007).

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-50/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebauan diatur dan ditentukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebauan adalah bau yang tidak diinginkan dalam kadar dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.

- b. Baku tingkat kebauan adalah batas maksimal bau dalam udara yang diperbolehkan yang tidak mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
- c. Zat odoran adalah zat yang dapat berupa zat tunggal maupun campuran berbagai macam senyawa.

Lebih lanjut dari isi peraturan tersebut dapat di kaji dari sisi hukum terhadap Kepmen LH No. KEP-50/MENLH/11/1996 bahwa batasan baku tingkat kebauan untuk odoran tunggal dan campuran, metoda pengukuran/pengujian dan peralatan adalah sebagaimana tersebut dalam table dibawah ini:

Tabel 2: Tingkat Baku Kebauan

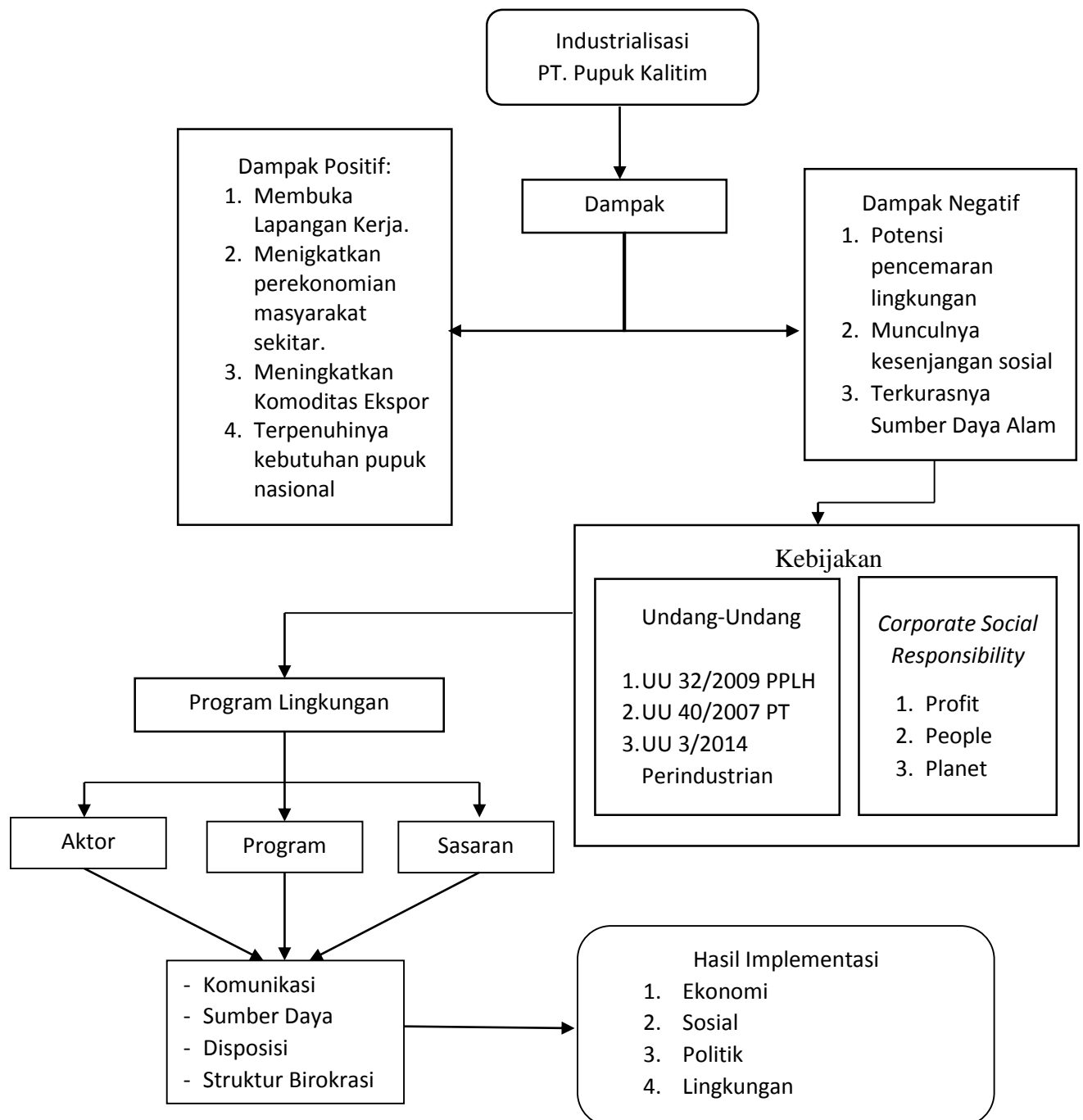
No.	Parameter	Satuan	Nilai Batas	Metoda Pengukuran	Peralatan
1.	Amoniak	ppm	2.0	Metoda Indofenol	Spektrofotometer
2.	Metil Merkaptan	ppm	0.0002	Absorpsi gas	Gas Khromatograf
3.	Hidrogen Sulfida	ppm	0.02	a. merkuri tiosianat b. Absorpsi gas	a. Spektrofotometer b. Gas Khromatograf
4.	Metil Sulfida	ppm	0.01	Absorpsi gas	Gas Khromatograf
5.	Stirena	ppm	0.1	Absorpsi gas	Gas Khromatograf

Sumber: Kepemen LH No. KEP-50/MENLH/11/1996

Dari tabel mengenai tingkat kebauan diatas setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib melaksanakan seluruh kegiatan yang sesuai dengan isi Pasal 5 Ayat (1) untuk mentaati baku tingkat kebauan yang telah dipersyaratkan, dapat mengendalikan sumber penyebab bau yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan, dan menyampaikan laporan hasil pemantauan tingkat kebauan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur, Menteri,

instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan dan instansi teknis yang membidangi kegiatan yang bersangkutan serta instansi lain dipandang perlu.

F. Kerangka Konseptual



Gambar 4: Kerangka konseptual implementasi program CSR Penghijauan Kawasan *Barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam upaya mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan terhadap masyarakat *buffer zone*.

Sumber : Data Olahan Peneliti

Kerangka konseptual pada gambar 3 (tiga) menjelaskan proses implementasi program CSR PT. Pupuk Kaltim dalam rangka penghijauan kawasan *barrier* perusahaan dalam upayanya mengantisipasi pencemaran lingkungan yang di akibatkan oleh proses produksi industrialisasi perusahaan. Pada kerangka konseptual tersebut digambarkan bagaimana proses industrialisasi menghasilkan dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan dilingkungan sekeliling perusahaan. Dampak positif yang munculnya akibat proses industrialisasi ini tersebut adalah terbukanya lapangan kerja baru, meningkatnya perekonomian masyarakat di sekitar perusahaan, mampu meningkatkan eksodus ekspor, dan tercukupinya kebutuhan pupuk nasional. Namun disisi lain proses industrialisasi ini juga mengakibatkan munculnya dampak negatif yaitu munculnya potensi pencemaran lingkungan, kesenjangan sosial, serta terkurasnya sumber daya alam.

Munculnya dampak industrialisasi tersebut maka munculah kebijakan melalui Undang-undang yang mengatur tentang CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan industri untuk melakukan berbagai macam upaya agar dampak negatif dapat diantisipasi dengan baik melalui program-program peduli lingkungan. Pelaksanaan program lingkungan ini dapat dilihat kesesuaian implementasi program yaitu aktor, program, dan sasaran. Pola kesesuaian implementasi tersebut kemudian dapat dilihat menggunakan empat variabel untuk memperoleh data atau informasi yang sesuai dengan tujuan peneliti yaitu; komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan kerangka pemikiran tersebut maka diharapkan mampu menunjukkan tentang hasil dari implementasi program CSR PT. Pupuk Kaltim dalam proses penghijauan kawasan *barrier* industri untuk

mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan melalui empat aspek antara lain aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik, dan aspek lingkungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Melakukan penelitian ilmiah diperlukan penggunaan metode yang benar, agar tujuan dari penelitian untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dapat tercapai dengan baik. Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis (Usaman dan Akbar, 2006). Penggunaan metode yang tepat dapat membantu dalam memperoleh data-data yang valid dan relevan sehingga dapat bermanfaat dalam mendiskripsikan, menginterpretasikan serta menganalisis data yang diperoleh.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yang dimaksud adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat pemerian (penyadaran) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu (Usman dan Akbar, 2006). Sedangkan metodologi kualitatif disini adalah sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2011:4). Penggunaan metodologi penelitian kualitatif ini dimana penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan. Penelitian kualitatif bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan

oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya (Sukmadinata, 2006: 94).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai implementasi program CSR penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kaltim dalam upaya mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan. Informasi yang digali lewat wawancara mendalam terhadap informan (internal maupun eksternal). Teknik kualitatif dipakai sebagai pendekatan dalam penelitian ini, karena teknik ini untuk memahami realitas rasional sebagai realitas subjektif khususnya implementasi program-program CSR perusahaan. Proses observasi dan wawancara mendalam bersifat sangat utama dalam pengumpulan data. Dari observasi diharapkan mampu menggali studi mengenai Implementasi program CSR penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kaltim.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah penempatan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian. Ditentukannya fokus penelitian yang jelas dan tepat dalam melakukan penelitian penting dilakukan. Penetapan penelitian sebagai objek yang menjadi titik pusat perhatian penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam suatu penelitian, memberikan batasan terhadap fenomena atas permasalahan yang telah ditentukan dalam penelitian agar penelitian yang dilakukan lebih terarah, tidak meluas serta relevan dengan objek penelitian

dan memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Maksud ditentukannya fokus penelitian adalah sebagai batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut sebagai fokus yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum (Sugiyono, 2008).

Dalam penelitian ini, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka fokus penelitian yang dibahas meliputi:

1. Implementasi program CSR Penghijauan Kawasan *Barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam upaya mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan terhadap masyarakat *buffer zone*. Melalui beberapa fokus yaitu:
 - a. Keterkaitan Implementasi yang dilihat dari beberapa aspek, yaitu:
Aspek Ekonomi, Aspek Sosial, Aspek Politik, dan Aspek Lingkungan
 - b. Peran dan Pola Hubungan *Stakeholder*:
 - 1) PT. Pupuk Kalimantan Timur
 - 2) Pemerintah Kota Bontang
 - 3) Masyarakat dan Pemangku Adat Kelurahan Guntung
 - c. Proses dan bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program CSR Penghijauan Kawasan *Barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam upaya mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan meliputi:
 - 1) Tahap perencanaan
 - 2) Tahap pelaksanaan
 - 3) Tahap monitoring dan evaluasi

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program CSR Penghijauan Kawasan *Barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam upaya mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan terhadap masyarakat *buffer zone* meliputi:
 - a. Komunikasi,
 - b. Sumber daya,
 - c. Disposisi
 - d. Struktur birokrasi

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini telah memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan tema penelitian, masalah dan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Lokasi penelitian yang dipilih berada di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur. Pemilihan lokasi dilakukan secara praktis dan metodologis. Alasan pemilihan lokasi secara praktis karena penelitian dilakukan untuk efisiensi waktu dan tempat serta ketertarikan peneliti terhadap objek penelitian. Sedangkan alasan secara metodologis adalah dikarenakan Kota Bontang merupakan salah satu kota dengan kegiatan perindustrian terbesar di Indonesia dengan berbagai macam perusahaan yang bergerak dalam bidang eksploitasi dan pengolahan sumber daya alam. Salah satu perusahaan besar yang ada di Kota Bontang tersebut adalah PT. Pupuk Kaltim yang bergerak dalam bidang pengolahan amoniak dan gas alam.

Sedangkan maksud dari situs penelitian adalah menunjukkan dimana sebenarnya untuk memperoleh data atau informasi yang tepat dan akurat serta dapat

diperlukan untuk menangkap keadaan sebenarnya dari objek penelitian. Adapun situs penelitian pada:

1. Kantor Pusat PT. Pupuk Kalimantan Timur
2. Kawasan *barrier* pabrik PT. Pupuk Kaltim.
3. Kawasan Pabrik PT. Pupuk Kaltim
4. Pemukiman *Buffer Zone* yang berada di Kelurahan Guntung
5. Kantor Kelurahan Guntung

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data atau informasi adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data penelitian yang dibutuhkan. Setiap peneliti upaya mempunyai hasil yang maksimal dan akurat serta sesuai dengan yang dikehendaki dalam penelitiannya, tentunya perlu ditunjang dengan data-data yang relevan dengan keadaan yang sebenarnya, baik dari segi jumlah maupun jenis-jenis data yang diperlukan. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan berkas-berkas lain yang dapat membantu dan menunjang penelitian (Moleong, 2011).

Sumber keberadaan data dapat dijadikan sebagai sumber informasi kajian untuk mengetahui apa yang diteliti. Data-datq yang didapatkan mampu memberikan dukungan atas analisis-analisis yang akan dilakukan terhadap objek dan sasaran penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Data Primer

Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan (Moleong,2011). Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang hasil dari Implementasi Program CSR dalam bidang lingkungan sebagai antisipasi pencemaran lingkungan. Data Primer dalam penelitian ini bersumber dari;

- a. Manajer Lingkungan Hidup PT. Pupuk Kalimantan Timur
- b. Manajer Hubungan Masyarakat PT. Pupuk Kaltim.
- c. Staf karyawan Hubungan Masyarakat PT. Pupuk Kaltim terkait program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kaltim
- d. Staf karyawan Keskretariat Perusahaan yang terkait dengan program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur.
- e. Ketua penanggung jawab program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kaltim
- f. Lurah kelurahan Guntung
- g. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Guntung
- h. Masyarakat *Buffer Zone* yang berada di Kelurahan Guntung

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber laporan bulanan maupun tahunan perusahaan yang melampirkan barisan-barisan data yang telah

dilaksanakan Perusahaan dalam hitungan bulanan maupun tahunan. Selain itu juga dapat digunakan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari media resmi perusahaan, buku harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah maupun komunitas/perkumpulan masyarakat. Data sekunder juga dapat berupa buletin, publikasi dari organisasi atau kelompok terkait objek penelitian, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementerian-kementerian, hasil-hasil studi, tesis, dan lain sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui berbagai macam teknik pengumpulan data kepada objek penelitian di PT. Pupuk Kaltim, masyarakat sekitar, maupun Pemerintah Kota Bontang.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi Langsung

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis tentang bagaimana implementasi program CSR Penghijauan Kawasan *Barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam upaya mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan terhadap masyarakat *buffer zone*.

2. Wawancara.

Tujuan penulis menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data secara jelas dan kongkret tentang bagaimana proses hingga hasil implementasi

program CSR Penghijauan Kawasan *Barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam upaya mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan terhadap masyarakat *buffer zone*. Selain itu wawancara kepada pejabat terkait dapat memberikan data mengenai maksud dan tujuan Program yang telah dilaksanakan. Laporan ini, wawancara dilakukan kepada masyarakat kelurahan Guntung Kota Bontang, pejabat RT dan Kelurahan Guntung, Manajer Departemen Lingkungan Hidup PT. Pupuk Kaltim, Manajer Departemen Humas PT. Pupuk Kaltim, dan beberapa pejabat PT. Pupuk Kaltim.

Dengan melaksanakan proses wawancara tanya jawab secara langsung dapat membantu peneliti memperoleh data yang lebih relevan sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Sehingga data-data yang diperoleh dapat digali lebih dalam dan mampu menghasilkan informasi yang berkualitas dan akurat.

3. Dokumentasi

Tujuan digunakan metode dokumentasi ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang bagaimana proses pelaksanaan implementasi program CSR Penghijauan Kawasan *Barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam upaya mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan terhadap masyarakat *buffer zone*. Selain itu dokumentasi juga dapat membantu memberika bukti dari hasil program yang telah dijalankan selama ini.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dan dipilih oleh peneliti dalam proses mengumpulkan data yang berwujud sarana atau benda. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri

Hal ini sesuai dengan metode penelitian kualitatif, dimana pengumpulan data tergantung dari diri peneliti sendiri dengan segenap aktivitasnya dalam menyerap dan mengambil data lapangan. Peneliti sebagai instrument utama (*instrument guide*) dengan menggunakan panca indera untuk mengamati fenomena yang terjadi dilapangan melalui observasi dan melakukan wawancara.

2. Instrumen pembantu terdiri dari:

- a. Pedoman wawancara (*interview guide*)

Digunakan sebagai kerangka atau dasar dalam wawancara berupa daftar pertanyaan yang diajukan pada informan terkait dengan penelitian. Hal ini berguna dalam mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data.

- b. Perangkat penunjang yang meliputi buku catatan lapangan (*field note*), alat tulis menulis dan alat pendokumentasian. Catatan ini merupakan hasil dari penelitian yang didengar, dilihat dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan ditunjang dengan pengambilan gambar (foto). Sebagai pelengkap dari catatan lapangan maka peneliti juga memanfaatkan *recorder*, agar mudah dalam mengulang ingatan tentang kondisi lapangan dan jalannya wawancara yang dilakukan.

G. Metode Analisis

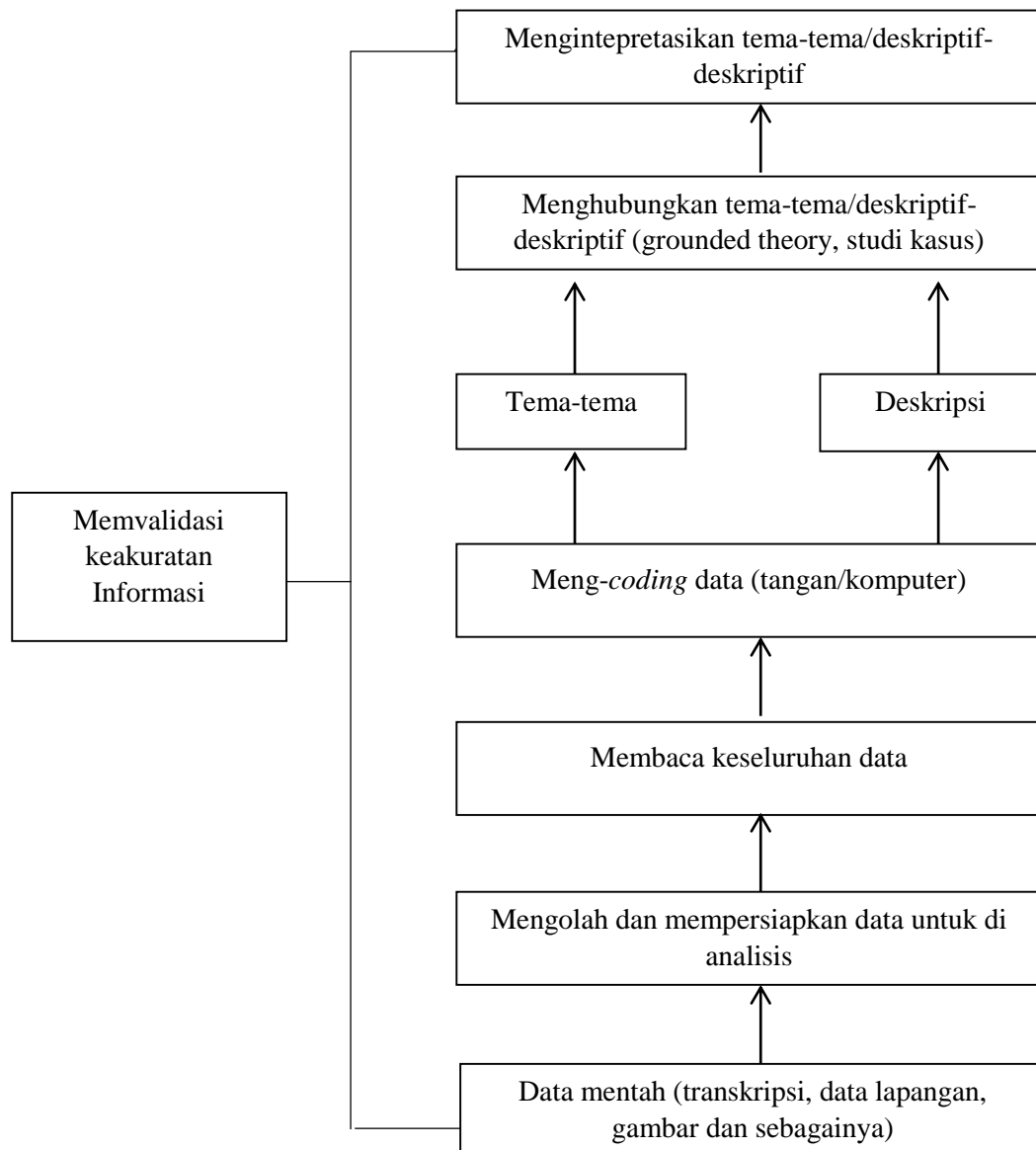
Prinsip utama dalam analisis data adalah mampu menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan kemudian dapat disajikan dalam bentuk uraian dan memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki manfaat ilmiah maupun teoritis.

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan, dan bahan – bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.” (Bogdan dalam Sugiyono, 2014:244).

Sedangkan menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2014:244) memaknai analisis data sebagai hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah menggunakan model analisis data Creswell. Menurut Creswell (2012:274) menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data untuk data-data yang bersifat kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkannya dengan kata-kata atau kalimat yang sesuai dengan hasil data yang diperoleh. Melalui penelitian kualitatif, data dapat didapatkan dengan berbagai macam dan dengan teknik pengumpulan data yang bervariasi seperti observasi, interview, dan dokumentasi. Data digali secara terus

menerus sehingga data terkumpul sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian kualitatif memberikan kelebihan pada peneliti untuk menentukan sendiri metode analisis data yang sesuai dengan penelitian untuk dikembangkan.

Penelitian ini menggunakan analisis data Creswell yang penulis anggap mampu menerjemahkan dengan mudah semua data yang ada menjadi sebuah informasi, selain itu juga dianggap sebagai teori baru. Model analisis kualitatif sangat banyak dan berbeda-beda, namun pada umumnya menggunakan prosedur yang umum dan langkah-langkah khusus dalam analisis data. Creswell (2012:27) memberikan pemahaman bahwa cara yang ideal adalah dengan mencampurkan prosedur umum tersebut dengan langkah-langkah khusus. Lebih jelasnya dijabarkan dalam gambar berikut ini :



Gambar 5: Analisis Data Penelitian Kualitatif Creswell (Creswell, 2012:27)

Pedekatan diatas dapat dijelaskan lebih mendalam dengan langkah-langkah analisis berikut ini:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi, wawancara, mengopi literatur, mengetik data lapangan, memilah dan menyusun data yang ada serta relevan yang

berkaitan dengan implementasi program CSR penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kaltim.

2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan informan, bagaimana inti gagasan-gagasan tersebut, bagaimana kesan yang timbul, kredibilitas dan penuturan informasi itu. Pada tahap ini peneliti menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh mengenai implementasi program CSR penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kaltim
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap yaitu mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat, paragraph, atau gambar tersebut kedalam kategori, kemudian melabeli kategori tersebut dengan istilah khusus yang sering kali didasarkan pada istilah/bahasa yang benar-benar berasal dari informan (disebut istilah *in vivo*). Penulis memilah data penelitian yang termasuk dalam implementasi program CSR penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kaltim
4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang, kategori, dan tema untuk kemudian dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa

dalam *setting* tertentu yang ada di dalam proses penelitian tentang implementasi program CSR penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk KaltimS

5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema ini tersajikan kembali dalam laporan penelitian sebagaimana penulis lakukan dalam analisis data.
6. Langkah terakhir adalah interpretasi data atau memaknai data.

Penulis menggunakan analisis Creswell karena pada analisis ini memungkinkan adanya langkah yang lebih fleksibel seperti gambar diatas. Peneliti dapat melakukan analisis data kemudian membagi sesuai tema yang sudah ditentukan pada fokus penelitian kemudian dapat dilakukan pendeskripsian atau penjelasan mengenai tema tersebut sehingga akan menghasilkan data hasil. Selain itu masing-masing data ini harus dilakukan secara berurutan agar mudah dalam pengidentifikasian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Bontang

Kota Bontang terletak antara 117°23' Bujur Timur – 117°38' Bujur Timur serta diantara 0°01' Lintang Utara - 0°012' Lintang Utara. Wilayah Kota Bontang didominasi oleh lautan. Kota Bontang memiliki wilayah daratan seluas 147,8 km² (29,70%), sedangkan luas wilayah seluruhnya 497,57 km², didukung dengan tata letak yang cukup strategis yaitu terletak pada jalan trans Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan Selat Makassar yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) dan Internasional sehingga menguntungkan dalam mendukung interaksi wilayah Kota Bontang dengan wilayah lain diluar Kota Bontang baik dalam skala nasional, regional maupun internasional.

a. Topografi Kota Bontang

Wilayah Kota Bontang berupa permukaan tanah yang datar, landai, berbukit dan bergelombang. Secara topografi kawasan Bontang memiliki ketinggian antara 0 – 120 meter diatas permukaan laut (mdpl) dengan kemiringan lereng yang bervariasi dan terdiri dari sebagian besar wilayah daratan dan beberapa wilayah berupa pulau-pulau kecil. Ditinjau dari kemiringan lerengnya, Kota Bontang memiliki kemiringan lereng yang bervariasi antara 0% - 2% mempunyai luasan 7.211 ha atau 48,79%, kemiringan lahan bergelombang antara 3% - 15% seluas 2.001 ha atau 27,07%, serta luas lahan dengan kemiringan curam antara 16% - 40%

hampir sama dengan luas bergelombang yaitu 24,14% atau 3.568 ha.

b. Administrasi Kota Bontang

Secara administrasi, semula Kota Bontang merupakan kota administratif sebagai bagian dari Kabupaten Kutai dan menjadi Daerah Otonom berdasarkan UU No. 47 tahun 1999, tentang pemekaran Propinsi dan Kabupaten, bersama-sama Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang No. 17 tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat, pada tanggal 16 Agustus 2002, Kota Bontang terbagi menjadi 3 Kecamatan Bontang Selata, Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Barat.

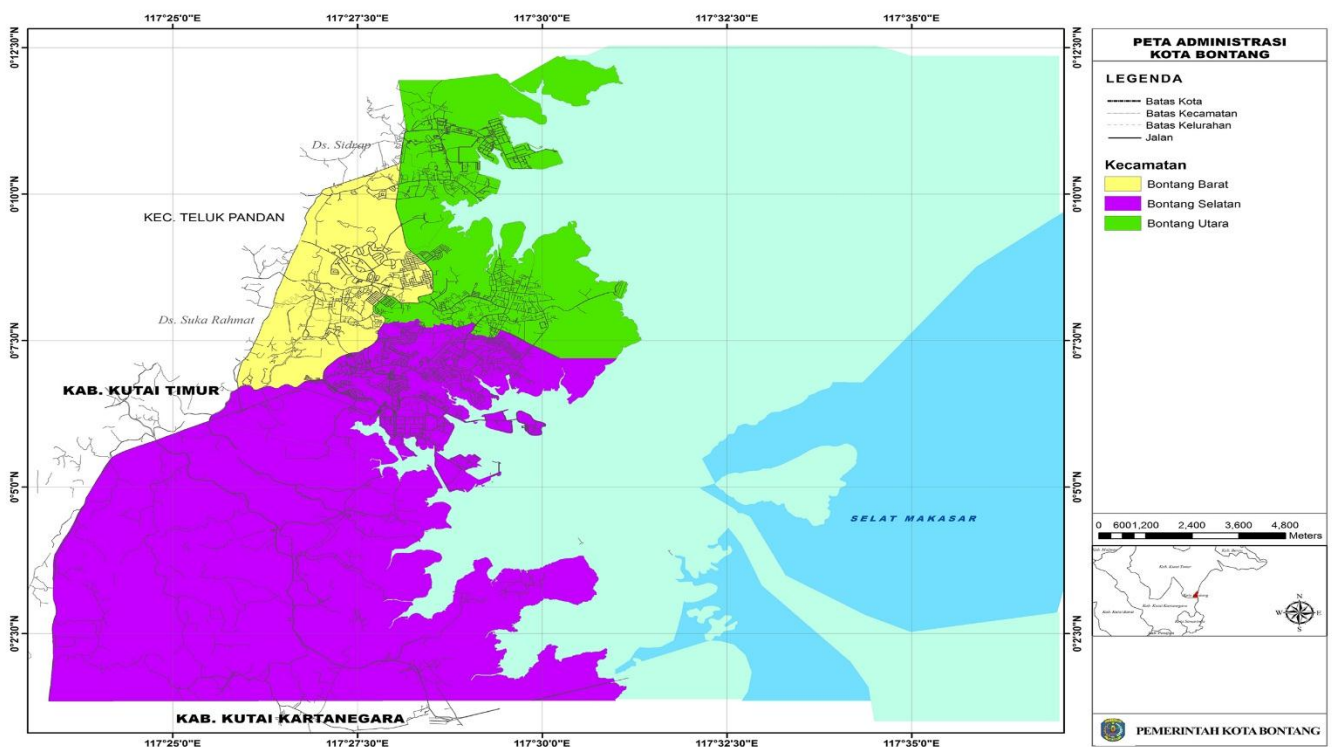
Adapun Kelurahan yang ada di tiap masing-masing Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Bontang Selatan terdiri dari 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Bontang Lestari, Kelurahan Satimpo, Kelurahan Berbas Pantai, Kelurahan Berbas Tengah, Kelurahan Tanjung Laut dan Kelurahan Tanjung Laut Indah.
2. Kecamatan Bontang Utara terdiri dari 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Api-APi, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Loktuan dan Kelurahan Guntung.
3. Kecamatan Bontang Barat terdiri dari 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Kanaan, Kelurahan Gunung Telihan dan Kelurahan Belimbing.

Luas dan batas wilayah, Kota Bontang dengan luas wilayah 49.757 ha yang didominasi oleh alutan, yaitu seluas 34.977 ha (70,30%) sedangkan wilayah

daratannya seluas 14.780 ha (29,70%). Luas masing-masing Kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Selatan seluas 10.440 ha, Kecamatan Bontang Bontang Utara seluas 2.620 ha, dan Bontang Barat seluas 1.720 ha. Kelurahan terluas yaitu Bontang lestari (8.092 ha).

Batas wilayah administratif Kota Bontang sebelah Barat adalah Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, sebelah Timur dibatasi oleh Selat Makassar, sebelah Selatan dengan Kecamatan Marah Kayu Kabupaten Kutai Kertanegara dan sebelah Utara dengan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Berikut peta administratif Kota Bontang:



Gambar 6. Peta Administratif Kota Bontang
Sumber: Bappeda Kota Bontang 2015

2. Kelurahan Guntung

Wilayah Kelurahan Guntung termasuk dalam kategori wilayah yang topografi daerahnya terdiri dari dataran rendah, rawa, gambut, dan pesisir pantai dengan ketinggian permukaan 2 m dpl. Kelurahan Guntung memiliki curah hujan sebesar 610 mm/tahun dan suhu maksimum 30°C dan suhu minimum sebesar 25°C. Secara keseluruhan Kelurahan Guntung memiliki luas wilayah 849 ha/m².

Batas-batas wilayah Kelurahan Guntung adalah sebagai berikut:

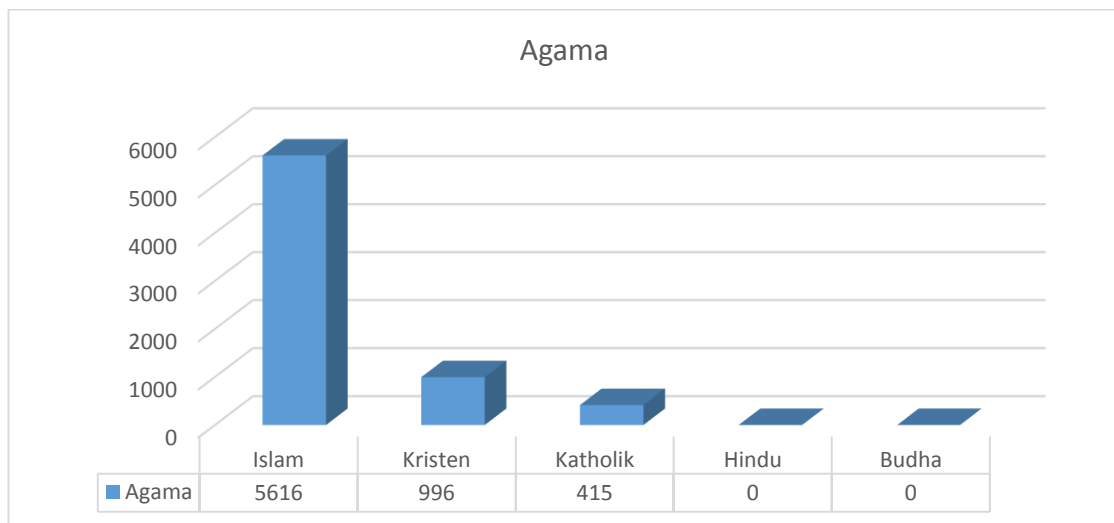
- Sebelah Utara : Selat Makassar
- Sebelah Selatan : Kelurahan Loktuan
- Sebelah Barat : Desa Martadinata
- Sebelah Timur : Selat Makassar

Wilayah Kelurahan Guntung memiliki orbitasi atau Jarak Pusat Pemerintahan Kelurahan sebagai berikut:

- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 10 Km
- Jarak dari Ibukota Kotamadya Daerah Tingkat II : 45 Km
- Jarak dari Ibukota Propinsi Dati I Kalimantan Timur : 125 Km

a. Komposisi Penduduk

Berdasarkan data dari Kantor Kelurahan Guntung, jumlah penduduk sebanyak 7.167 Jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 3.696 orang dan Perempuan sebanyak 3.471 orang dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2.366 KK. Dengan kepadatan penduduk 2.220 Per Km². Dari jumlah penduduk 7.167 jiwa tersebut sebagian besar beragama islam yaitu sebanyak 5.616 orang, dan agama kristen sebanyak 996 orang dan Katholik sebanyak 415 orang.



Gambar 7. Data pemeluk Agama Masyarakat Guntung

Sumber: Profil Kelurahan Guntung 2015

Dilihat menurut tingkat Pendidikan, jumlah penduduk terbanyak pada tingkat pendidikan SMU/SLTA sebanyak 3.557 orang, Tingkat pendidikan SMP/SLTP sebanyak 240 orang, rincian jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat kita lihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3: Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Tidak – Belum Sekolah	2.887 orang
2	Sekolah Dasar	2.040 orang
3	SMP/SLTP	240 orang
4	SMA/SLTA	3.557 orang
5	Diploma I, II	32 orang
6	Diploma III	62 orang
7	Sarjana (S1)	44 orang
8	Magister (S2)	1 orang
9	Doktor (S3)	- orang

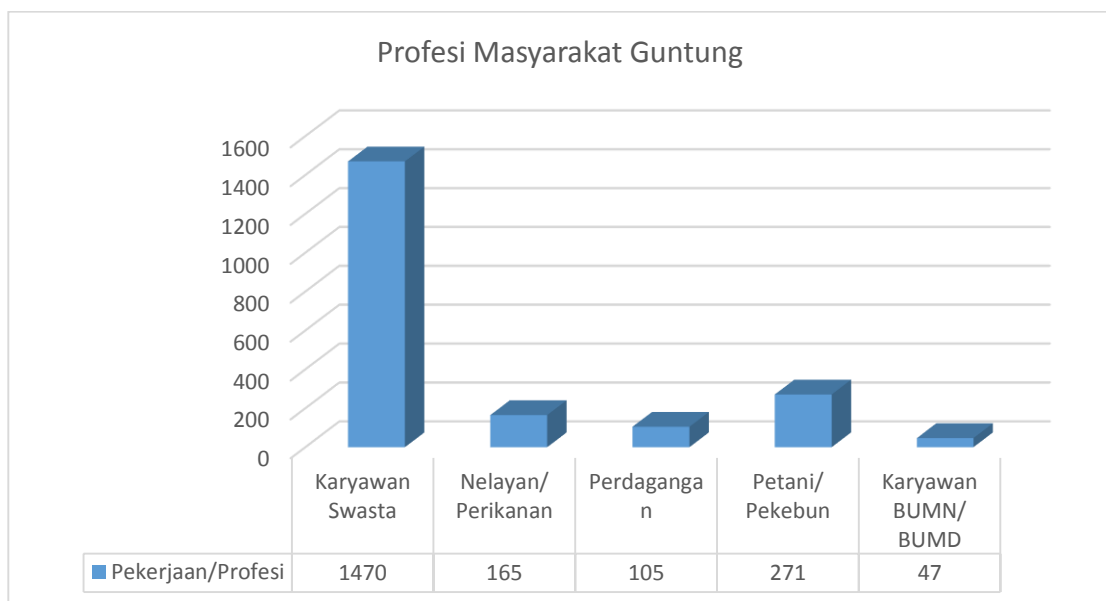
Sumber: Profil Kelurahan Guntung 2015

b. Profesi Masyarakat

Sebanyak 1.740 orang di kelurahan Guntung bermata pencaharian sebagai Karyawan Swasta, sebanyak 165 orang bekerja sebagai Nelayan/Perikanan, dan 271 orang bekerja sebagai Petani/pekebun. Profesi guru di kelurahan Guntung

sebanyak 10 orang, Dokter 2 orang, Bidan 1 orang dan Polisi 3 orang, pedagang sebanyak 105 orang, sementara itu masih terdapat penduduk kelurahan Guntung yang belum bekerja sebanyak 1320 orang.

Pada grafik di bawah ini tergambar 5 (lima) profesi yang paling banyak di geluti oleh masyarakat kelurahan Guntung.



Gambar 8: Profesi Masyarakat Guntung
Sumber: Profil Kelurahan Guntung 2015

c. Sumberdaya Alam

Kelurahan Guntung berbatasan langsung dengan selat Makasar di sebelah utara dan Sebelah Timur, Kelurahan Loktuan di sebelah Selatan dan Desa Martadinata kab.Kutim di sebelah Barat. Kelurahan Guntung memiliki luas 849 ha/m2 dengan rincian Luas Pemukiman 295 ha/m2, Luas Pemakaman 2 ha/m2, luas Pekarangan 12 ha/m2, Luas Perkantoran 493 ha/m2 , sementara Luas Prasarana Umum Lainnya lahan yang digunakan sebesar 5 ha/m2. Secara umum Topografi Kelurahan Guntung adalah Dataran Rendah, Rawa, Gambut Pesisir dengan ketinggian tanah dari permukaan laut setinggi 2 mdl, di lihat dari segi iklim suhu udara rata –

rata harian adalah 250 s.d 300 dengan curah hujan 610 Mni/Th serta jumlah bulan Hujan rata – rata 4 bulan.

Tabel 4: Jarak antara Kelurahan dengan Ibu Kota

KETERJANGKAUAN	JUMLAH
Jarak dari Ibu Kota Kabupaten	45 Km
Jarak dari Ibu Kota Kecamatan	10 Km
Jarak dari Ibu Kota Propinsi	125 Km

Sumber: Monografi Kelurahan Guntung 2015

d. Sumberdaya Air

Kondisi sumber daya air di kelurahan Guntung berasal dari air dalam dan air permukaan. Sumber air bersih yang di Kelurahan Guntung ini berasal dari air tanah yang berasal dari PDAM, sumur gali dan depot isi ulang. Sebanyak 468 Kepala keluarga yang memperoleh sumber air bersih berasal dari PDAM dan 70 Kepala keluarga berasal dari sumur gali dan bak penampungan. Dengan kualitas air minum yang baik.

e. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di kelurahan Guntung terbanyak untuk pemukima seluas 295 ha, sementara lahan basah yang terdapat di kelurahan Guntung berupa tanah rawa seluas 10 ha, pasang surut 8 ha dan lahan gambut seluas 10 ha, sementara lahan yang belum di kelola berupa hutan seluas 15 ha, mangrove seluas 10 ha dan lahan lain nya yang belum di kelola seluas 470 ha.

f. Sumberdaya Sosial

1) Klasifikasi Kesejahteraan

Ciri – ciri yang digunakan untuk membedakan klasifikasi antara masyarakat kaya, sedang dan miskin adalah pola makan, kondisi rumah, pekerjaan, pendidikan dan kondisi kesehatan, akses terhadap pelayanan publik dan kepemilikan sarana sanitasi yang baik. Karakteristik paling menonjol dari ekonomi komunitas adalah kondisi struktur ekonomi yang lebih gemuk pada golongan menengah, golongan kecil, kemudian golongan atas. Golongan menengah dicerminkan oleh karyawan dan pedagang, golongan atas dicerminkan oleh karyawan BUMN, dan golongan bawah dicerminkan oleh buruh dan petani. Dan Tingkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Guntung secara umum dapat di klasifikasi dalam kelas menengah

2) Hubungan Sosial Kemasyarakat

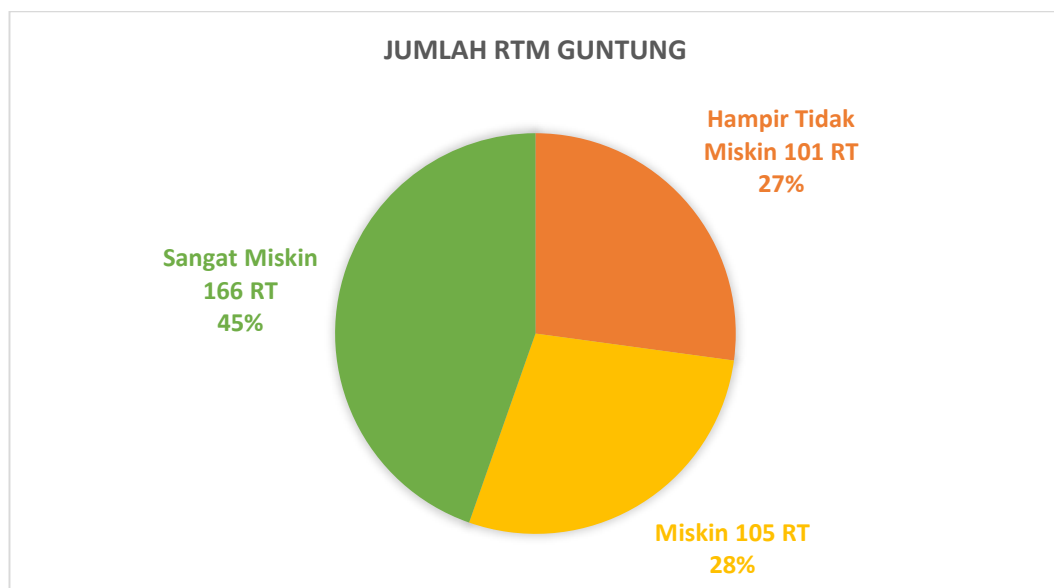
Kondisi dan karakteristik sosial individu masyarakat Kelurahan Guntung relatif cukup baik. Namun Kondisi dan karakteristik sosial komunitas masyarakat Kelurahan Guntung cenderung semakin lemah. Meski adat istiadat dan nilai dan norma masih dipegang teguh, namun kesetiakawanan dan kegotongroyongan sudah mulai diabaikan. Padahal, kesetiakawanan dan kegotongroyongan adalah cermin dari nilai-nilai sosial. Semakin tinggi kesetiakawanan dan kegotongroyongan diimplementasikan, maka semakin besar modal sosial yang dimiliki. Adat istiadat meski tetap dipegang teguh, namun cenderung hanya pada kelompok etnisnya. Misalnya adat Bugis pada kelompok etnis Bugis, atau adat Jawa yang hanya diimplementasikan pada kelompok etnis Jawa. Belum ditemukan adat istiadat yang

memang memerlukan waktu yang lebih panjang untuk wilayah yang terlalu didominasi oleh hanya satu atau dua etnis saja seperti di Kelurahan Guntung ini.

Demikian pula halnya dengan nilai-nilai dan norma, juga terpolarisasi hanya pada satu nilai dan norma agama, utamanya adalah nilai dan norma Agama Islam. Nilai dan norma Agama Islam masih sangat kuat, mengingat agama ini adalah agama mayoritas di Kelurahan Guntung. Nilai-nilai kebenaran dan kepatutan di Kelurahan Guntung, dengan demikian bagian terbesarnya adalah berdasarkan nilai dan ajaran Agama Islam. Fenomena ini dapat ditemui pada berbagai kegiatan sosial, dimana prosesi kegiatan lebih banyak mengadopsi ajaran Agama Islam.

3) Deskripsi Jenis – Jenis Kerentanan (*Vulnerability*) dan Kelompok Rentan

Secara umum tidak ada kerentanan dan kelompok rentan yang ada di kelurahan Guntung. Walaupun demikian masih ditemukan sejumlah KK miskin, namun jumlahnya relatif tidak signifikan. Jumlah KK miskin diklasifikasikan pada gambar berikut:



Gambar 9. Presentase Kemiskinan Kelurahan Guntung
 Sumber: Bappeda Kota Bontang 2014

Penduduk miskin di Kelurahan Guntung dideteksi dari kelompok masyarakat yang tergolong kedalam 30% Rumah Tangga (RT) dengan tingkat kesejahteraan terendah. Limit 30% kesejahteraan terendah memunculkan angka penduduk miskin sebanyak 372 RT. Ke 372 RT miskin ini kemudian dikelompokkan kembali menjadi tiga kelompok, yaitu; 10% terendah sebanyak 166 RT, 11-20% terendah sebanyak 105 RT, dan 21-30% terendah sebanyak 101 RT. Penduduk yang tingkat kesejahteraannya tergolong ke dalam 10% terendah untuk selanjutnya disebut sebagai kelompok RT sangat miskin. Kelompok 11-20% terendah disebut miskin, dan 21-30% terendah disebut sebagai hampir tidak miskin. Rumah Tangga (RT) miskin di Kelurahan Guntung didominasi oleh usia 41-50 Tahun, sebanyak 34.7% atau 129 RT. Usia 41-50 Tahun adalah usia paling produktif dalam siklus hidup manusia. Sebaran usia berdasarkan kelompok RT Miskin hampir menyerupai kecenderungan sebaran total RT miskin, kecuali RT hampir tidak miskin, yaitu didominasi usia produktif 31-40 Tahun. RT Sangat miskin dan miskin mayoritas diisi oleh kelompok usia 41-50 Tahun, masing-masing sebanyak 67 RT (40.4%), dan 31 RT (29.5%). Sementara RT hamper tidak miskin banyak diisi oleh RT dengan usia yang lebih muda, yaitu 150 RT 31 (38.9%). Kecenderungan ini mengisyaratkan bahwa usia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Semakin muda usia seseorang, maka cenderung akan semakin miskin.

Tabel 5: Jumlah Kelompok Rentan Kelurahan Guntung

No	Kelompok Rentan	Lokasi	Jumlah Komunitas
1	Sangat Miskin	Jalan Kapal Pinisi	14 orang
		Jalan Tari dewa-dewa	10 orang
		Jalan Tari Enggang	17 orang
		Jalan Tari Gantar	35 orang
		Jalan Tari Gong	1 orang
		Jalan Tari Jepen	55 orang
		Pulau Gusung	34 orang
2	Miskin	Jalan Kapal Pinisi	12 orang
		Jalan Tari dewa-dewa	5 orang
		Jalan Tari Enggang	8 orang
		Jalan Tari Gantar	28 orang
		Jalan Tari Gong	4 orang
		Jalan Tari Jepen	29 orang
		Pulau Gusung	19 orang
3	Hampir Tidak Miskin	Jalan Kapal Pinisi	9 orang
		Jalan Tari dewa-dewa	15 orang
		Jalan Tari Enggang	16 orang
		Jalan Tari Gantar	19 orang
		Jalan Tari Gong	4 orang
		Jalan Tari Jepen	29 orang
		Pulau Gusung	9 orang

Sumber: Bappeda Kota Bontang 2014

4) Deskripsi Masalah Sosial

Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam

masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya. Masalah sosial yang ditemukan di Kelurahan Guntung antara lain adalah masih adanya angka pengangguran dan beberapa KK miskin.

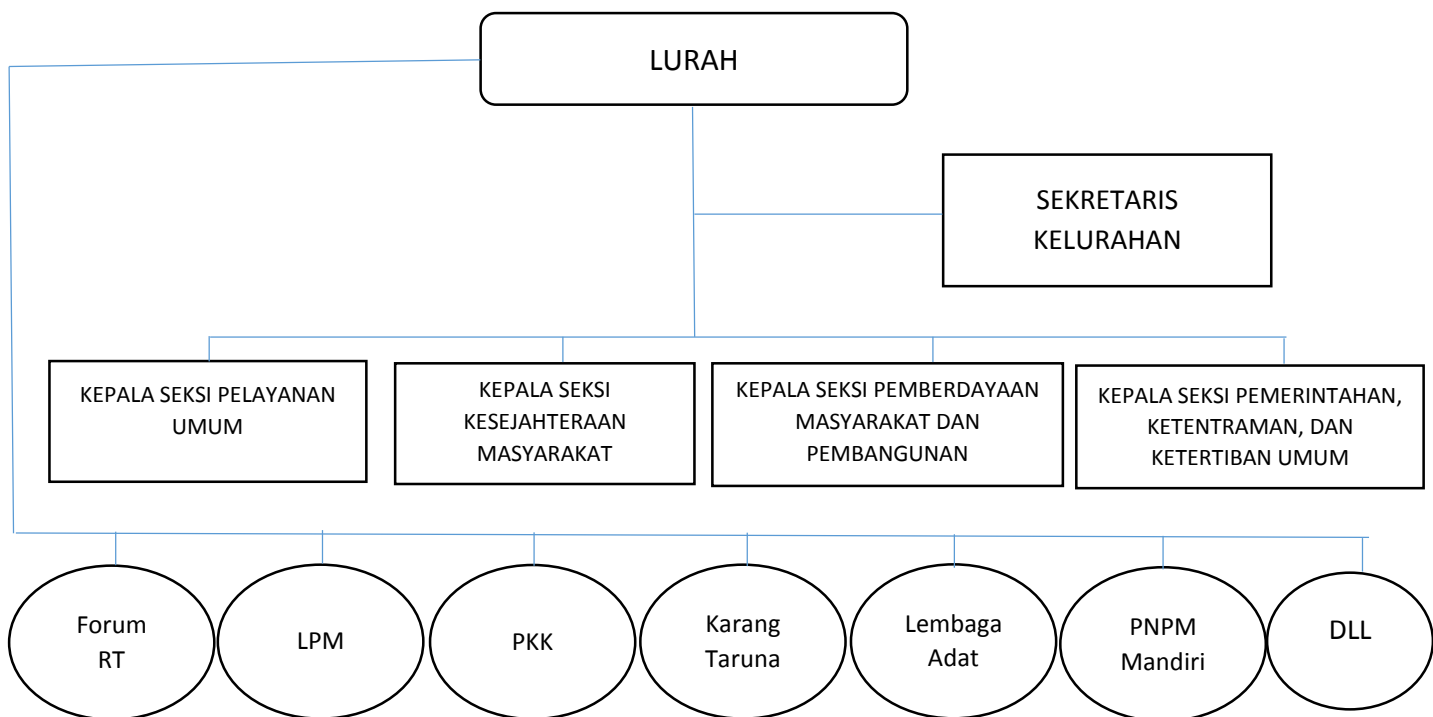
Selain masalah masih adanya angka pengangguran dan keluarga miskin beberapa masalah sosial yang juga muncul di masyarakat kelurahan guntung khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang fisik dan keberadaan perusahaan PT Pupuk Kaltim antara lain :

- Banjir. Kelurahan Guntung berada di muara Sungai Guntung, sehingga air di sungai ini adalah air payau dan terpengaruh pasang surut laut. Di saat surut, air sungai ini tidak lebih dari 1,5 m lebarnya, namun di saat pasang air sungai dapat meluap dan biasanya menimbulkan banjir di wilayah Kelurahan Guntung.
- Bau Amoniak. Polusi udara ini berasal dari terbukanya vessel gas ammonia dari P.T. Pupuk Kaltim, yang terbuka secara otomatis, jika tekanan gas di vessel tersebut melebihi batas kemampuan vessel tersebut.
- Kecemburuan masyarakat terkait perbedaan perlakuan untuk masyarakat Guntung. Menurut masyarakat, PKT tidak mengutamakan penerimaan pegawai dari masyarakat Guntung, padahal mereka adalah tetangga terdekat.
- Terdapat kesenjangan sosial yang cukup tinggi antara warga PT Pupuk Kaltim dengan masyarakat Kelurahan Guntung. Tingkat pendidikan dan daya saing yang rendah menjadi salah satu penyebab. Untuk mengatasi

masalah tersebut, masyarakat kelurahan Guntung menyarankan agar PT. Pupuk Kaltim sering memberikan pelatihan kepada masyarakat yang bersifat produktif yang dapat membantu menunjang perekonomian keluarga dan masyarakat yang ada di Kelurahan Guntung. (Sosial Mapping PT. Pupuk Kalimantan Timur, 2014)

g. Aktor, Kepentingan, Jaringan, dan Posisi Sosial Kemasyarakatan Kelurahan Guntung

1) Struktur Pemerintahan Kelurahan Guntung



Gambar 10. Struktur Pemerintahan Kelurahan Guntung
 Sumber: Profil Kelurahan Guntung 2015

2) Peran dan Posisi Sosial Aktor Institusi di Kelurahan Guntung

Tabel 6. Peran dan Posisi Sosial Aktor Institusi di Kelurahan Guntung

No	Nama Aktor Institusi	Peran/ Kepentingan	Posisi Sosial
1	Lurah Guntung	Otoritas tertinggi kelurahan, berperan sebagai eksekutor program pemerintah. Bekerja sama dengan aparat terkait dan perusahaan dalam menyinergikan program pembangunan.	Tokoh sentral dalam keberhasilan program dan kegiatan pembangunan di Guntung
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Menggerakkan swadaya masyarakat secara partisipatif, mengusulkan program kegiatan kepada perusahaan melalui CSR, membantu pemerintah dalam implementasi kegiatan pembangunan	Berkoordinasi dengan <i>stakeholder</i> lain yang terkait seperti ketua RT, ketua PKK, Kelurahan, pihak perusahaan dan sebagainya
3	PKK	Berperan besar dalam membantu pemerintah melaksanakan program pembangunan terutama dalam hal pemberdayaan dan peningkatan kapasitas perempuan	Institusi formal pendamping pemerintah dalam pembangunan
4	Karang Taruna	Meningkatkan kapastas pemuda/i Guntung, memberikan wadah bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan	
6	Institusi Kelompok Masyarakat	Berperan sebagai penggagas kegiatan, kontrol bagi pemerintah dalam pemerataan pembangunan dan berfungsi sebagai sarana menyalurkan aspirasi masyarakat.	Institusi bentukan masyarakat, mewakili kepentingan kelompok secara luas
7	Kelompok Rentan	Memiliki kepentingan besar sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi karena keterbatasan sumberdaya memiliki peran yang lemah.	Posisi marjinal, kekuatan di masyarakat tidak besar

Sumber: Data Olahan Peneliti 2016

3) Peran dan Posisi Sosial Aktor Individu di Kelurahan Guntung

Tabel 7: Peran dan Posisi Sosial Aktor Individu Kelurahan Guntung

No	Nama	Posisi Sosial	Peranan Sosial
1	Baslan	Lurah Guntung.	Pmpinan tertinggi kelurahan, mengorganisir perangkat dan tokoh masyarakat untuk menjalankan pemerintahan. Aktor penting dalam tata kehidupan bernegara di wilaya Guntung dan berperan sebagai katalisator pembangunan ekonomi dan sosial. Menjalankan program-program pemerintah dan menampung usulan dan aspirasi masyarakat. Bersama-sama dengan aktor lain menjadi <i>problem solver</i> dalam setiap kendala dan tantangan yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
2	Rahmat Haryono	Ketua LPM	Tokoh aktif dalam menggagas dan mengusulkan program yang muncul dari masyarakat untuk ditindak lanjuti oleh CSR perusahaan. Menyusun perencanaan pembangunan dan sebagai motor pembangunan di kelurahan.
3	Khustaniah	Ketua PKK	Melakukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas bagi perempuan khususnya dalam rangka mendukung pembangunan yang ada di kelurahan
4	Musmulyadi	Ketua Karang Taruna	Menyusun perencanaan dan melakukan pemberdayaan pemuda-pemuda yang ada dalam meningkatkan kapasitas pemuda untuk mendukung pembangunan di kelurahan

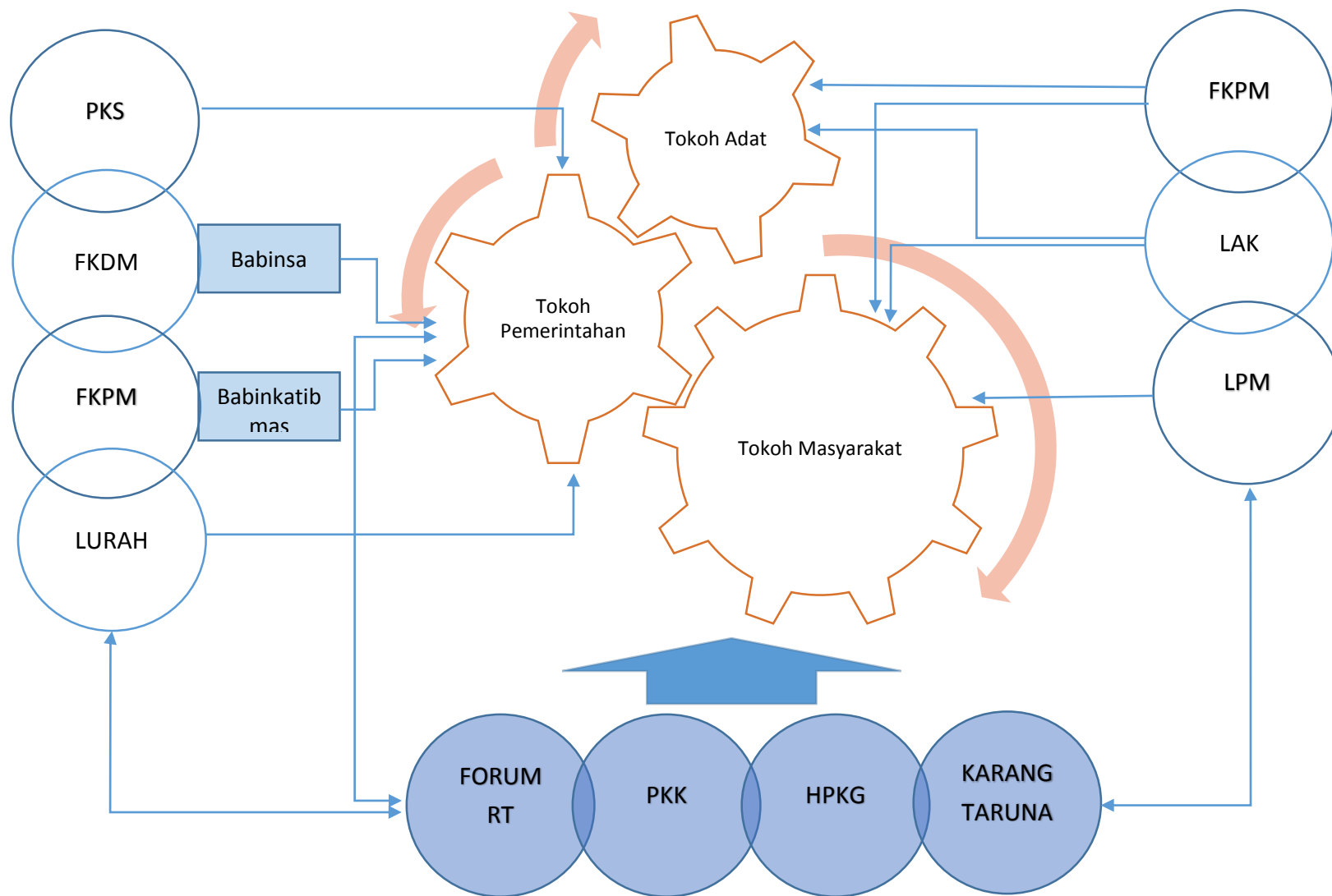
5	Kahar	Ketua Lembaga Kebangkitan Kutai	Mengidentifikasi dan memfasilitasi masyarakat khususnya masyarakat pribumi yang ada di kelurahan Guntung dalam memperoleh akses informasi ketenagakerjaan serta melaksanakan kegiatan sosial yang mendukung pembangunan di kelurahan.
6	Darmawi	Ketua Pokja Kelurahan Sehat	Menampung aspirasi masyarakat dalam rangka mewujudkan kelurahan menjadi bersih, dan sehat.
7	H. Mansyur	Ketua FKPM	Wadah bagi masyarakat berkomunikasi bersama aparat keamanan dalam menciptakan suasana yang aman di lingkungan kelurahan
8	Sutara	Ketua BKM PNPM Mandiri	Menyusun perencanaan pembangunan bagi warga miskin yang ada di kelurahan dan juga sebagai motor pembangunan

Sumber: Data Olahan Peneliti 2016

4) Pemetaan Jaringan Sosial

Jaringan sosial Kelurahan Guntung sebagai salah satu daerah *buffer zone* PT Pupuk Kaltim menjadi penting untuk dipetakan dengan maksud untuk mengenali kondisi sosial ekonomi masyarakat dan budaya masyarakat setempat. Banyak aktor dalam proses interaksi sosial di wilayah ini baik secara individu kelompok, dan institusi. Dalam interaksinya para aktor ini saling terkait dan memiliki karakteristik dan latar belakang sosial yang berbeda-beda. Demikian pula dengan wawasan, orientasi, dan kepentingan yang melandasi setiap aksi dan aktivitas setiap aktor. Output pemetaan jaringan sosial akan menghasilkan data dan informasi mengenai kondisi psikografis, pola komunikasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat

Guntung dengan harapan dapat menjadi pedoman dalam menenukan pendekatan dan pelaksanaan program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur (Lihat Gambar 11).



Gambar 11. Hubungan Individu, Kelompok, dan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan Guntung
 Sumber: *Sosial Mapping Kelurahan Guntung PT. Pupuk Kalimantan Timur 2014*

Berdasarkan gambar pemetaan jaringan sosial Kelurahan Guntung diketahui ada interaksi antar aktor yang sifatnya positif dan negatif. Hubungan yang saling bertolak belakang ini terdapat di hampir setiap garis interaksi antar individu-kelompok-institusi. Hubungan positif antara individu dan kelompok dengan institusi misalnya ditunjukkan oleh peran Lurah Bapak Baslan (representasi institusi) sebagai katalisator berbagai informasi dan kegiatan perusahaan kepada kelompok masyarakat melalui program CSR.

3. PT Pupuk Kalimantan Timur

a. Sejarah Singkat PT Pupuk Kalimantan Timur

PT Pupuk Kaltim berdiri pada 7 Desember 1977 di Bontang Kalimantan Timur, saat ini memiliki kapasitas produksi urea 2,98 juta ton per tahun. Dengan kapasitas tersebut, maka Pupuk Kaltim merupakan produsen urea terbesar di Indonesia. Selain urea dan amoniak, Pupuk Kaltim juga memproduksi pupuk NPK dan pupuk organik, dengan kapasitas produksi NPK total 550 ribu ton, terdiri dari 350 ribu ton NPK blending dan 200 ribu ton NPK fusion. Kapasitas produksi pupuk organiknya adalah 45 ribu ton per tahun. Pembentukan Pupuk Kaltim berawal dari rencana Pemerintah, melalui perusahaan minyak negara Pertamina, untuk membangun proyek pabrik pupuk terapung di atas kapal. Namun karena pertimbangan teknis, maka berdasarkan Keppres No. 43/1975 proyek tersebut dialihkan di darat dan melalui Kepres No. 39/1976 Pertamina menyerahkan pengelolaan proyek kepada Departemen Perindustrian. Bontang, Kalimantan Timur,

dipilih sebagai lokasi, dengan lahan seluas 43 hektar disiapkan untuk proyek tersebut. Gas bumi adalah bahan baku utama yang disalurkan dari Muara Badak dan disalurkan pipa sepanjang 60 kilometer.

Pembangunan Kaltim 1 dimulai pada tahun 1979 sedangkan Kaltim 2 dibangun tahun 1982. Kedua pabrik tersebut diresmikan bersamaan pada tanggal 28 Oktober 1984. Pabrik Kaltim 3 mulai dibangun dua tahun setelah peresmian Kaltim 1 dan 2, serta diresmikan pada 4 April 1989. Pada 20 November 1996, mulai dibangun pabrik urea unit 4 yang disebut dengan Proyek Optimasi Pupuk Kaltim atau POPKA. Pabrik ini adalah pabrik urea granul pertama di Indonesia dan diresmikan pada 6 Juli 2000 bersamaan dengan pemancangan tiang pertama Pabrik Kaltim 4 juga memproduksi urea granul. Pabrik urea tersebut diresmikan pada 3 Juli 2002 sedangkan unit amoniaknya diresmikan pada 28 Juni 2004 oleh Presiden Republik Indonesia.

Mulai tahun 2004, seiring dengan keluarnya SK Menperindag, Pupuk Kaltim bertanggung jawab atas distribusi urea bersubsidi di Kawasan Timur Indonesia. Sejak saat itu Pupuk Kaltim telah membangun jaringan pemasaran di berbagai wilayah Indonesia dan saat ini, wilayah tanggungjawab Pupuk Kaltim meliputi Kawasan Timur Indonesia dan sebagian besar Jawa Timur dan Kalimantan, Kecuali Kalbar. (*Annual Repot Pupuk Kaltim*, 2013)

b. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan di PT Pupuk Kalimantan Timur

Berdasarkan SK direksi No. 09/DIR/II/2009 tentang Visi, Misi, Budaya dan Nilai-nilai Perusahaan tanggal 6 Februari 2009 maka PT Pupuk Kalimantan Timur menerapkan :

1. Visi

“Menjadi Perusahaan Agro-Kimia yang Memiliki Reputasi Prima di Kawasan Asia”

2. Misi

Beberapa misi yang dimiliki antara lain:

- a. Menyediakan produk-produk pupuk, kimia, agro dan jasa pelayanan pabrik serta perdagangan yang berdaya saing tinggi.
- b. Memaksimalkan nilai perusahaan melalui pengembangan sumber daya manusia dan menerapkan teknologi mutakhir.
- c. Menunjang Program Ketahanan Pangan Nasional dengan penyediaan pupuk secara tepat.
- d. Memberikan manfaat bagi Pemegang Saham, karyawan dan masyarakat serta peduli pada lingkungan.

3. Budaya Perusahaan

Untuk mencapai visi dan misi, perusahaan secara terus-menerus disosialisasikan kepada pegawai. Budaya kerja tersebut meliputi:

a. Unggul

Insan Pupuk Kaltim selalu berusaha mencapai keunggulan dalam berbagai aspek kinerja perusahaan dengan menegakkan nilai-nilai: professional, tangguh, visioner.

b. Integritas

Insan Pupuk Kaltim harus dapat dipercaya, sehingga selalu bersifat terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai: jujur, adil, bertanggung jawab, disiplin.

c. Kebersamaan

Insan Pupuk Kaltim merupakan satu kesatuan tim kerja untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengutamakan nilai-nilai: sinergi, bersatu.

d. Kepuasan pelanggan

Insan Pupuk Kaltim selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan memperhatikan nilai-nilai: perhatian, komitmen, mutu.

e. Tanggap

Insan Pupuk Kaltim dalam mengantisipasi perubahan dinamika usaha selalu memperhatikan nilai-nilai: inisiatif, cepat, peduli lingkungan.

c. Unit Produksi

1) Pabrik Amoniak

Penghasil Amoniak dengan bahan baku utama gas bumi, uap air, dan udara. Pupuk Kaltim memiliki empat pabrik Amoniak yaitu Pabrik Amoniak Kaltim 1, Kaltim 2, Kaltim 3 dan Kaltim 4.

2) Pabrik Urea

Penghasil Urea dengan bahan baku Amoniak dan gas karbon dioksida (CO₂). Gas CO₂ merupakan produk samping dari pabrik amoniak. Pupuk Kaltim memiliki lima pabrik Urea yakni Pabrik Urea Kaltim 1, Kaltim 2, Kaltim 3, Kaltim 4, dan POPKA. Urea jenis *prill* diproduksi oleh Pabrik Kaltim 1, Kaltim

2, dan Kaltim 3, sedangkan urea jenis granul diproduksi oleh pabrik Urea Kaltim 4 dan POPKA.

3) Pabrik Utilitas

Penyedia kebutuhan utilitas pabrik Amoniak, Urea, maupun NPK, yang terdiri dari Unit Penyedia Air Laut (*Sea Water Pump*), Unit Klorinasi, Unit Desalinasi, Instrument Air dan *Plant Air*, Unit Demineralisasi, Unit *Sweet Cooling Water System*, Unit Pembangkit Listrik, dan Unit Pembangkit Listrik, dan Unit Pembangkit Uap Air. Unit-unit ini terintegrasi antara satu pabrik dengan pabrik lainnya, termasuk dengan JVC.

4) Pabrik NPK

Pabrik NPK blending berada di 3 lokasi yaitu Bontang, Semarang dan Surabaya. Pabrik-pabrik ini berkapasitas total 350.000 ton per tahun dan berlokasi di Bontang. NPK adalah pupuk majemuk dengan bahan baku Urea, DAP, KCI, dan bahan-bahan lain berupa mikronutrien.

5) Pabrik Pupuk Organik

Pupuk Kaltim mengelola lima buah pabrik pupuk organik dengan merek Zeorganik yang berlokasi di Pare-Pare, Demak, Banyuwangi, Bali, dan Lombok Timur. Semua pabrik tersebut didirikan oleh pengusaha local dengan system lisensi merek, kecuali pabrik di Pare-Pare yang sepenuhnya milik Pupuk Kaltim. Pupuk organik Zeorganik terbuat dari kotoran sapi dan bahan organik lainnya seperti jerami yang digunakan untuk memperbaiki struktur harga tanah.

d. Kegiatan Usaha Utama PT Pupuk Kalimantan Timur

1. Industri

Kegiatan mengolah bahan-bahan mentah tertentu dan bahan-bahan kimia sebagai dasar yang diperlukan menjadi berbagai jenis pupuk dan hasil kimia lain beserta produk-produk turunannya.

2. Perdagangan

Melakukan kegiatan distribusi dan perdagangan, baik dalam maupun luar negeri yang berhubungan dengan produk-produk tersebut diatas dan produk-produk lain yang berhubungan dengan perpupukan, petrokimia dan kimia serta kegiatan-kegiatan impor bahan baku, bahan penunjang peralatan produksi pupuk dan bahan kimia lainnya.

3. Jasa

Mengadakan studi penelitian, pengembangan, rancang bangun dan perekayasaan, pengantongan, konstruksi, pabrikasi, manajemen, operasional pabrik, pemeliharaan, konsultasi dan jasa teknis lainnya dalam sektor industri pupuk, petrokimia dan industry kimia lainnya.

Selain tiga kegiatan utama di atas, perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai penunjang kegiatan utama berupa:

1. Pengangkutan

Menjalankan kegiatan-kegiatan usaha dalam bidang angkutan, ekspedisi dan pergudangan serta kegiatan lainnya sebagai sarana penunjang kelancaran proses kegiatan usaha tersebut.

2. Agribisnis

Menjalankan usaha dalam bidang pertanian dan perkebunan industry pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan, peternakan dan perikanan serta pengolahan hasil peternakan dan perikanan.

3. Pertambangan

Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan dalam rangka pemenuhan bahan baku dan bahan penunjang produksi pupuk, petrokimia dan industry kimia lainnya, seperti gas bimu, batubara, fospat, KCI dan bahan tambang lain.

4. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk kawasan industri, *real estate*, olahraga dan rekreasi, rumah sakit, pendidikan dan penelitian, prasarana telekomunikasi dan sumber daya energy, perkebunan, jasa penyewaan dan perusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau dikuasai perusahaan.

I. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

1. Implementasi Program CSR Penghijauan Kawasan *Barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur.

Sebagai anak perusahaan Pupuk Indonesia *Holding Company* (PIHC), saat ini PT. Pupuk Kalimantan Timur merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi produsen Urea dan Amoniak terbesar di Indonesia (e-media pupuk kaltim, 2015). Dalam pelaksanaan operasional perusahaan PT. Pupuk Kalimantan Timur mengutamakan kesinergian antara produk yang ramah lingkungan dengan kelestarian lingkungan di area sekitar perusahaan. Perusahaan menyadari kegiatan bisnis yang dilakukan memiliki dampak terhadap masyarakat maupun lingkungan di sekitarnya. Mengacu pada Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diperkuat lagi melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, PT. Pupuk Kalimantan Timur telah membuat dan melaksanakan berbagai macam program tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Program-program yang dibuat dan dilaksanakan tersebut selalu dikaitkan dan diiringi dengan memperhatikan kondisi lingkungan yang baik serta mengutamakan sistem pemberdayaan masyarakat disekitarnya. Dengan adanya program tanggung jawab sosial perusahaan yang ada diharapkan dapat memberikan manfaat serta kehidupan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar dengan lebih baik. Selain karena bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kondisi sosial dan lingkungan sekitar, program-program yang

dibuat dan dilaksanakan perusahaan adalah sebagai wujud ketaatan Perusahaan dengan perundang-undangan dan kebijakan negara yang berlaku seperti yang disebutkan sebelumnya. Dalam Master Plan PT. Pupuk Kalimantan Timur nomor: 650/1018/DTRK-B, perusahaan memberikan lebih dari 30% dari seluruh wilayah industrinya untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau atau kawasan *barrier* (*bufferzone*) sebagai media dalam mengantisipasi pencemaran yang terjadi dari proses produksi perusahaan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Staf Kesekretariatan Perusahaan PT. Pupuk Kalimantan Timur Bapak Zaenal yang mengatakan:

“Sesuai dengan peraturan pemerintah yang ditanda tangani oleh kementerian PU kawasan *barrier* yang kita punya disebut RTH, sedangkan menurut peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian LH disebutnya *bufferzone*. Namun itu merupakan sebuah pengertian yang sama bagi kita. Di Pupuk Kaltim sendiri punya pabrik itu tidak hanya satu, tapi ada beberapa. Walaupun tempat pabrik itu terpencar namun semua itu masuk dalam satu kesatuan yang dinamakan kawasan industri. Untuk melihat lebih singkronnya di dalam kawasan industri itu di rencanakan oleh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Bontang yang diturunkan dan disingkronkan di dalam Master Plan PT. Pupuk Kalimantan Timur. Terlepas dari RTRW Kota Bontang, Pupuk Kaltim sendiri pada dasarnya telah memberikan lebih dari 30% kawasan Industri perusahaan untuk dijadikan RTH, hal tersebut dapat kita lihat dari Master Plan PT. Pupuk Kalimantan Timur yang telah di setujui pemerintah pada tahun 2014 lalu” (Wawancara pada hari Selasa, 2 Februari 2016 pukul 14.03 WITA di Kantor Kesekretariatan Perusahaan)

Keterangan yang disampaikan tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya selain dikarenakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kondisi lingkungan sekitar, program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur merupakan wujud dukungan perusahaan kepada kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan Ruang Terbuka hijau yang sesuai dengan Peraturan Daerah

Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang.

PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam pelaksanaan kegiatan program-program perusahaan memiliki konsep *Go Green and Blue Vision* dalam menjalankan segala macam kegiatan perindustrian hingga tanggung jawab sosialnya yang terdapat berbagai macam program untuk menciptakan lingkungan yang hijau dan sehat. Dalam konsep *Go Green and Blue Vision* diharapkan akan tercipta keseimbangan kelestarian alam, baik darat, laut, maupun udara dengan melibatkan karyawan dan masyarakat sekitar perusahaan (e-media pupuk kaltim, 2015). Di dalam proses implementasi program-program CSR perusahaan, PT. Pupuk Kalimantan Timur membuat sebuah kebijakan tentang tata kelola program CSR perusahaan dalam Surat Keputusan Direksi No. 23/DIR/V.2012 tentang Komite Tanggungjawab Sosial Perusahaan PT. Pupuk Kalimantan Timur yang kemudian disempurnakan dan disesuaikan lagi dengan kebutuhan serta keadaan perusahaan yang semakin tinggi melalui Surat Keputusan Direksi No. 30/DIR/VII.2014 tentang Komite *Corporate Social Responsibility* PT. Pupuk Kalimantan Timur yang menjelaskan tentang struktur komite pelaksana program-program CSR perusahaan dan tugas serta tanggung jawab komite CSR perusahaan.

Program CSR perusahaan di dalam penghijauan kawasan *barrier* industri perusahaan sendiri merupakan program yang masuk dalam jargon *Go Green and Blue Vision* perusahaan. Program penghijauan kawasan *barrier* industri ini berada di bawah langsung kendali komite CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dengan melibatkan sumber daya dari Departemen Lingkungan Hidup sebagai tim

perencana, pelaksana, serta tim monitoring dan evaluasi. Namun implementasi di lapangan perusahaan tidak hanya bekerja sendirian karena perusahaan juga melibatkan masyarakat sekitar sebagai implementor lapangan sebagai wujud kepedulian perusahaan kepada masyarakat. Hal ini juga senada dengan hasil wawancara bersama Ibu Sri Djuwani Ekowati sebagai Manajer Departemen Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“Pada dasarnya PT. Pupuk Kalimantan Timur ini memiliki jargon dalam pelaksanaan kegiatan CSR di bidang lingkungan, yaitu *Go Green and Blue Vision*. Apabila dipahami, makna *Go Green* ini adalah fokus utama perusahaan dalam program melestarikan lingkungan di daratan. Kemudian *Blue Vision* sendiri adalah jargon yang memiliki dua fokus. Yang pertama adalah fokus perusahaan dalam menjaga lingkungan serta ekosistem dan biota laut di kawasan perairan sekitar perusahaan. Makna dari *Blue Vision* yang lain adalah perusahaan sadar bahwa udara disekitar perusahaan juga mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dikarenakan dampak polusi dari kegiatan pabrik perusahaan sendiri maupun pabrik-pabrik yang juga berada di sekitar lingkungan perusahaan, maka dari itu PT. Pupuk Kaltim juga membuat suatu program untuk mengatasi perubahan-perubahan kondisi udara agar tetap terlihat biru dan sehat. Lebih lanjut lagi, secara khusus perusahaan dalam program penghijauan kawasan *barrier* ini, dari awal sudah memiliki konsep tentang bagaimana jargon-jargon tersebut dapat dirasakan secara bersamaan. Dengan adanya program penghijauan ini nanti diharapkan dari segi *go green*-nya dapat karena kawasan *barrier* menjadi hijau, asri dan dapat menjadi pagar dalam menyerap polusi yang di hasilkan oleh pabrik, kemudian dari segi *blue vision*-nya juga dapat karena pohon-pohon yang ditanam tersebut dapat menyerap polusi yang dihasilkan oleh perusahaan. Disisi lain di dalam program ini, perusahaan sudah *concern* bahwa masyarakat akan dilibatkan dalam pelaksanaannya di lapangan. Pada dasarnya perusahaan bisa saja menyerahkan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga atau kontraktor. Tapi *goal*-nya bukan disitu. Dengan kita melibatkan masyarakat secara langsung maka perusahaan akan dapat membantu perekonomian masyarakat Guntung, terutama mereka yang menjadi RTM Kelurahan Guntung.” (Wawancara pada hari Kamis, 4 Februari 2016 pukul 16.30 WITA di Kantor Departemen Lingkungan Hidup)

Dalam implementasi program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam proses penghijauan kawasan *barrier* industri untuk mengantisipasi pencemaran dari kegiatan produksi perusahaan ada beberapa fokus yang akan didalami oleh peneliti antara lain fokus dalam implementasi program yang memiliki keterkaitan terhadap kehidupan masyarakat sekitar dalam beberapa aspek, aspek yang dimaksud antara lain aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Selain itu program penghijauan kawasan *barrier* perusahaan PT. Pupuk Kaltim ini juga memiliki pola hubungan antara pihak perusahaan sendiri dengan *stakeholder* yang ada seperti masyarakat sekitar dan pemerintah daerah. Kemudian fokus yang terakhir adalah mengenai bentuk dan proses tahapan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan evaluasi.

a. Keterkaitan Implementasi program CSR Penghijauan Kawasan *Barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur dengan kehidupan masyarakat Guntung.

Diawal perencanaan program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur, perusahaan telah mempertimbangkan dan menghitung keterkaitan program dengan dampak yang ditimbulkan dari implementasi program tersebut. Beberapa keterkaitan yang telah dipertimbangkan dan diprediksikan oleh perusahaan ialah keterkaitan implementasi program penghijauan kawasan *barrier* terhadap aspek ekonomi masyarakat maupun perusahaan kemudian aspek sosial yang muncul antara perusahaan dan masyarakat sekitar, keterkaitannya dengan aspek budaya yang muncul dengan diadakannya program penghijauan dan yang terakhir adalah aspek lingkungan sebagai tujuan serta fokus utama dalam program

CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam proses penghijauan kawasan *barrier* industri untuk mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan.

PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam perencanaan programnya telah memiliki gambaran tentang siapa saja target atau calon pelaksana lapangan program yang akan dilaksanakannya. Dalam keseluruhan program perusahaan yang terkait dengan CSR semuanya telah ditanamkan program pemberdayaan baik bagi karyawan internal maupun masyarakat yang bersinggungan dengan program secara langsung. Seluruh program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur mengutamakan *community development* maupun *sustainable development* yang merupakan komitmen utama perusahaan di dalam melaksanakan program-programnya. Hal tersebut senada dengan perkataan Bapak Wahyudi sebagai Manajer Departemen Hubungan Masyarakat yang juga menjadi koordinator CSR PT. Pupuk Kaltim sebagai berikut:

“...untuk kegiatan CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur juga tidak henti-hentinya memberikan program yang bersifat *charity* maupun infrastruktur kemudian pelatihan dan kapasitas bagi masyarakat pengembangan kapasitas bagi masyarakat. Dan kemudian tidak ketinggalan kami selalu melakukan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk program yang keberlanjutan atau biasa dilihat sebagai bentuk *community development* dan *sustainable development*. Senada dengan itu perusahaan sendiri memiliki Kebijakan tentang CSR yang menjadi dasar bagi kami dalam melaksanakan program-program CSR” (Wawancara pada hari Kamis, 4 Februari 2016 pukul 4.30 WITA di Kantor Departemen Hubungan Masyarakat)

Keterangan tersebut juga diperkuat lagi oleh Ibu Sri Djuwani Ekowati selaku Manajer Departemen Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“Perusahaan dalam program penghijauan kawasan *barrier* dari awal sudah memiliki fokus dan *concern* dengan langkah bagaimana cara kita mengantisipasi dampak atau pencemaran yang sekiranya dapat

terjadi sewaktu-waktu. Meski program yang kita buat ini tidak memiliki hasil yang instan, namun kita paham dengan tujuan program yang kita buat masyarakat akan memahami itikat baik perusahaan. Oia, fokus lain dari program CSR perusahaan ini adalah masyarakat akan kita libatkan di dalam pelaksanaannya. Perusahaan bisa saja menyerahkan pekerjaan atau program tersebut kepada pihak ketiga atau kontraktor. Tapi tidak, kami tidak seperti itu. Kami selalu mengutamakan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat di sekitar perusahaan. Kami selalu menanamkan sistem yang berkelanjutan baik dari sisi program maupun pemberdayaannya agar program yang kami buat ini memiliki manfaat bagi perusahaan sendiri yang nantinya bisa semakin aman, sehat, dan hijau, dan juga memiliki manfaat bagi masyarakat dalam bentuk ekonomi, lingkungan, hingga kesehatan jangka panjang bagi anak cucu mereka nanti.” (Wawancara pada hari Kamis, 4 Februari 2016 pukul 16.30 WITA di Kantor Departemen Lingkungan Hidup)

Melalui keterangan tersebut dapat diperoleh identifikasi bahwa di dalam implementasi program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur untuk mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan juga memiliki orientasi dan tujuan lain kepada pemberdayaan masyarakat dan program yang berkelanjutan. Di dalam implementasi program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur dapat dilihat juga mengenai keterkaitan program dengan beberapa aspek yang ada di masyarakat maupun perusahaan sendiri, aspek-aspek tersebut antara lain ialah:

1) Aspek ekonomi

Dalam keterkaitannya dalam aspek ekonomi baik bagi masyarakat maupun perusahaan, program penghijauan kawasan *barrier* ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Guntung. Dengan bertambahnya pendapatan dan mata pencaharian Masyarakat Guntung merupakan salah satu *goal* dari dilaksanakannya program ini. Meningkatnya pendapatan dan

bertambahnya mata pencaharian Masyarakat Guntung sesuai dengan perkataan yang diungkapkan oleh Bapak Rahmat Haryono selaku ketua LPM Guntung yaitu:

“program penghijauan kawasan *barrier* yang dilakukan oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur ini bagi kami selaku masyarakat yang berada di Kelurahan Guntung ini bersyukur sekali karena dapat terlibat secara langsung didalamnya. Dari proses musyawarah kami dilibatkan secara langsung kemudian dalam proses pelaksanaannya sekarang dari penanaman, perawatan, pemupukan, hingga pembibitan kami yang melakukan semuanya. Hal ini menjadi positif ketika masyarakat ini langsung dilibatkan dan lebih lagi perusahaan melibatkan secara langsung masyarakat yang masuk dalam RTM Guntung. Sebelumnya, masyarakat yang terlibat di dalam program ini telah mendapatkan pelatihan tentang bagaimana cara menanam, merawat, hingga melakukan pembibitan yang baik dan benar. Setelah itu mereka yang mendapatkan pelatihan dapan mengaplikasikan langsung ke dalam program. Dan kini bisa di lihat sudah tertanam kurang lebih 700 pohon dari tahap pertama hingga yang sekarang. Mereka yang bekerja disini di beri upah dari perusahaan dengan sistem kontrak selama enam bulan hingga satu tahun. Selain itu dalam proses pembibitan, hasil dari tanaman yang mereka bibit dari mulai benih hingga cukup untuk di tanam juga di beli oleh perusahaan. Nah, hal ini lah yang membuat kami senang dan bahagia karena dapat mengurangi jumlah pengangguran dan jumlah RTM di Kelurahan Guntung.” (Wawancara pada hari Rabu, 3 Februari 2016 pukul 16.42 WITA di Zona 3 Kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur)

Pernyataan tersebut juga sama seperti yang dikatakan oleh Lurah Kelurahan Guntung Bapak Baslan:

“...dilihat dari segi perekonomian masyarakat dengan adanya program-program CSR dari PT. Pupuk Kalimantan Timur maupun anak perusahaan atau perusaha-perusahaan yang berbatasan langsung deng Guntung memang memiliki pengaruh yang cukup besar. Jika dilihat dari data yang ada setiap tahunnya jumlah pengangguran dan jumlah RTM di Guntung ini terus berkurang. Cukup banyak masyarakat yang terlibat di dalam program-program CSR perusahaan ini membuat mereka menjadi memiliki kegiatan dan pekerjaan baru. Ada yang bekerja tetap sebagai pengelola program ada juga yang kemudian memiliki kemampuan untuk membuka usaha. Jika kita lihat dalam program yang secara khusus seperti program penghijauan seperti yang dilakukan PT. Pupuk Kalimantan Timur ini masyarakat yang terlibat 3 hingga 6 orang

kepala keluarga RTM dengan masa kontrak kerja 6 bulan hingga 1 tahun, belum lagi mereka juga mendapatkan pelatihan budidaya tanaman. Ini semua akan berdampak pada perekonomian masyarakat dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kenapa? Karena dalam jangka pendek mereka dapat memiliki pekerjaan sebagai pelaksana lapangan, sedangkan jangka panjangnya adalah manfaat dari pelatihan budidaya tanaman. Ketika mereka sudah tidak bekerja dalam program, mereka dapat melakukan kegiatan budidaya tanaman secara mandiri, dan hasil dari budidaya tersebut nanti juga dapat mereka jual perusahaan dalam program penghijauan atau mereka jual keluar.” (Wawancara pada hari Jum’at, 5 Februari 2016 pukul 10.00 WITA di kantor Kelurahan Guntung)

Dari kedua pernyataan tersebut didapatkan data mengenai perbedaan jumlah RTM Guntung yang terus berkurang dari tahun ke tahun. Berikut data tentang jumlah RTM yang berada di Kelurahan Guntung dari tahun 2014 hingga tahun 2015:

Tabel 8: Jumlah Rumah Tangga Miskin Kelurahan Guntung

	2014	2015
Rumah Tangga Miskin Kelurahan Guntung	372 Rumah Tangga	321 Rumah Tangga
Jumlah Pengangguran	1320 orang	979 orang

Sumber: Data (Olahan) Peneliti 2016

Apabila mengacu pada data yang ada tersebut cukup sesuai dengan apa yang diharapkan dan telah direncanakan oleh pihak perusahaan dalam merencanakan program-program CSR-nya. Dalam program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur sendiri target utama selain pada hasil hijaunya kawasan industri perusahaan juga memiliki target lain yaitu program yang dibuat perusahaan mampu menjadi salah satu program pemberdayaan masyarakat yang menjadikan masyarakat dapat hidup secara mandiri dari segi ekonomi, sosial, maupun

lingkungan serta program yang ada mampu membantu pemerintah daerah dalam permasalahan pengentasan masyarakat miskin. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Sri Djuwani Ekowati selaku Manajer Departemen Lingkungan Hidup yaitu:

“Perusahaan dalam program penghijauan kawasan *barrier* ini, dari awal sudah memiliki *concern* bahwa masyarakat akan dilibatkan dalam pelaksanaannya di lapangan. Pada dasarnya perusahaan bisa saja menyerahkan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga atau kontraktor. Tapi *goal*-nya bukan disitu. Dengan kita melibatkan masyarakat secara langsung maka perusahaan akan dapat membantu perekonomian masyarakat Guntung, terutama mereka yang menjadi RTM Kelurahan Guntung.” (Wawancara pada hari Kamis, 4 Februari 2016 pukul 16.30 WITA di Kantor Departemen Lingkungan Hidup)

Hal tersebut juga senada dengan pernyataan salah satu anggota koordinator komite CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur yaitu Ibu Esty yang mengatakan:

“Dalam program ini tidak hanya berfokus pada penanaman saja, melainkan juga fokus kepada pembibitan dan yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah mereka semua (RTM). Sehingga mereka melakukan pembibitan yang kemudian bibit tersebut dijual ke penanam. Dan perusahaan adalah salah satu pembelinya karena perusahaan membutuhkan bibit tersebut untuk menghijaukan lingkungannya. Jadi program tersebut dapat memberi nilai ekonomis yang lebih bagi mereka”. (Wawancara pada Selasa, 2 Februari 2016 pukul 08.10 WITA bertempat di ruang Departemen Lingkungan Hidup PT. Pupuk Kalimantan Timur)

Kedua pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh Bapak Wahyudi selaku Manajer Hubungan Masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur yang mengatakan bahwa:

“...pada setiap program CSR yang dilakukan oleh PT. Pupuk Kaltim selalu mengedepankan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat akan dapat menjadi mandiri secara

ekonomi maupun sosial. Selain itu hal tersebut juga akan membantu perusahaan dalam menekan *cost* operasional dan pengawasan program” (Wawancara pada hari Kamis, 4 Februari 2016 pukul 14.30 WITA di Kantor Departemen Hubungan Masyarakat)

Dalam aspek ekonomi yang keterkaitannya dengan program penghijauan kawasan *barrier* ini selain orientasi utamanya adalah kepada pemberdayaan masyarakat, perusahaan sendiri memiliki keuntungan lain dalam bidang ekonomi internalnya. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Sri Djuwani Ekowati selaku Manajer Departemen Lingkungan Hidup PT. Pupuk Kalimantan Timur:

“...dalam program penghijauan ini sebenarnya apabila berhasil dari aspek kesehatan lingkungannya, aspek pemberdayaan kepada masyarakatnya, aspek-aspek yang lain, program ini dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan penilaian dalam PROPERNAS. Saat ini perusahaan baru mendapatkan PROPER HIJAU, sebenarnya untuk hasil yang didapatkan perusahaan tersebut sudah cukup membantu perusahaan dalam menjaga kepercayaan investor terhadap kegiatan yang di lakukan oleh perusahaan selama ini. Namun apabila kegiatan yang kami lakukan, termasuk program penghijauan ini dapat berhasil dan berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang dan juga bisa jalan bersama-sama masyarakat bukan tidak mungkin dalam penilaian PROPER mendatang, perusahaan akan mendapatkan PROPER EMAS. Nah, penilaian PROPER EMAS itu yang nanti akan sangat membantu perusahaan dalam meningkatkan nilai ekonomi perusahaan di depan investor-investor yang ada, baik investor nasional maupun internasional. Dengan naiknya nilai ekonomi perusahaan akan dapat memudahkan perusahaan dalam sistem permodalan maupun sistem produksi dan sistem distribusi bahan baku maupun distribusi produk kepada konsumen.” (Wawancara pada hari Kamis, 4 Februari 2016 pukul 16.30 WITA di Kantor Departemen Lingkungan Hidup)

Jadi, keterkaitan program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur dengan aspek ekonomi ini tidak hanya memiliki dampak kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, melainkan dalam aspek ekonomi yang ada juga memberikan keuntungan terhadap perusahaan dalam pencapaian PROPERNAS. PROPERNAS ini akan sangat membantu perusahaan

dalam menjalankan manajemen bisnisnya dalam lingkup nasional maupun internasional. Apabila perusahaan mampu mendapatkan penilaian PROPERNAS tingkat EMAS maka dengan akan mudah perusahaan mendapatkan investor maupun *customers* baru yang nanti akan meningkatkan daya jual produk perusahaan.

2) Aspek sosial

Keterkaitan program perusahaan dengan aspek sosial lebih memiliki peran pada peningkatan hubungan yang lebih baik dan harmonis antara masyarakat dan perusahaan, melalui hubungan sosial antara masyarakat dan perusahaan yang meningkat ini diharapkan mampu mempermudah kegiatan perusahaan maupun masyarakat sendiri. Selain itu keterkaitan program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur di dalam aspek sosial dengan masyarakat Kelurahan Guntung ialah mengurangi tingkat atau jumlah rumah tangga miskin dan pengangguran yang ada di Kelurahan Guntung. Keterkaitan ini tidak dapat dilepaskan dari program pemberdayaan masyarakat yang diletakan di dalam implementasi program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur. Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh koordinator komite CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur yaitu Ibu Esty yang mengatakan:

“Program ini juga dikaitkan dengan penambahan pemberdayaan masyarakat sekitar terutama mereka yang masuk dalam RTM, jadi program ini tidak hanya berfokus pada penanaman saja melainkan juga fokus kepada pembibitan dan yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah mereka semua (RTM)”. (Wawancara pada Selasa, 2 Februari 2016 pukul 08.10 WITA bertempat di ruang Departemen Lingkungan Hidup PT. Pupuk Kalimantan Timur)

Selain itu dari sisi pemerintahan di dalam program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur juga memiliki harapan terkait pelaksanaan program dari aspek sosial terutama dalam bidang kesehatan seperti yang dikatakan Bapak Baslan selaku Lurah Kelurahan Guntung yaitu:

“...jika dilihat, di dalam program penghijauan ini kami memiliki harapan besar kedepannya terutama dalam hal yang menyangkut kesehatan masyarakat. Apabila lingkungan disekitar masyarakat Guntung ini hijau, maka dengan otomatis akan dapat menyerap polusi yang ditimbulkan oleh kegiatan pabrik-pabrik yang ada. Sehingga dengan lingkungan yang hijau tersebut masyarakat dapat hidup secara normal dan menghirup udara yang segar dan sehat sebagaimana orang pada umumnya”. (Wawancara pada hari Jum’at, 5 Februari 2016 pukul 08.45 WITA di ruang Lurah Kelurahan Guntung)

Sehingga pelaksanaan program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur diharapkan dapat memberikan manfaat dalam jangka pendek melalui proses pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan serta manfaat jangka panjang melalui penanaman, perawatan, monitoring dan evaluasi program penghijauan yang dilakukan dalam proses mengantisipasi segala macam bentuk dampak dan pencemaran kegiatan produksi perusahaan baik dalam bentuk pencemaran bau amoniak maupun bunyi bising dari dalam pabrik pengolahan pupuk perusahaan.

3) Aspek Politik

Dengan adanya program CSR perusahaan yang ada diharapkan dapat memberikan manfaat serta kehidupan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar dengan lebih baik. Selain karena bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kondisi sosial dan lingkungan sekitar, program-program yang dibuat dan dilaksanakan perusahaan adalah sebagai wujud ketaatan Perusahaan dengan

perundang-undangan dan kebijakan negara yang berlaku seperti yang disebutkan sebelumnya. Dalam masterplan PT. Pupuk Kalimantan Timur nomor: 650/1018/DTRK-B, perusahaan memberikan lebih dari 30% dari seluruh wilayah industrinya untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau atau kawasan *barrier* sebagai media dalam mengantisipasi pencemaran yang terjadi dari proses produksi perusahaan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Staf Kesekretariatan Perusahaan PT. Pupuk Kalimantan Timur Bapak Zaenal yang mengatakan:

“Sesuai dengan peraturan pemerintah yang ditanda tangani oleh kementrian PU kawasan *barrier* yang kita punya disebut RTH, sedangkan menurut peraturan yang dikeluarkan oleh kementrian LH disebutnya *bufferzone*. Namun itu merupakan sebuah pengertian yang sama bagi kita. Di Pupuk Kaltim sendiri punya pabrik itu tidak hanya satu, tapi ada beberapa. Walaupun tempat pabrik itu terpecar namun semua itu masuk dalam satu kesatuan yang dinamakan kawasan industri. Untuk melihat lebih sinkronnya di dalam kawasan industri itu di rencanakan oleh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Bontang yang diturunkan dan disinkronkan di dalam Master Plan PT. Pupuk Kalimantan Timur. Terlepas dari RTRW Kota Bontang, Pupuk Kaltim sendiri pada dasarnya telah memberikan lebih dari 30% kawasan Industri perusahaan untuk dijadikan RTH, hal tersebut dapat kita lihat dari Master Plan PT. Pupuk Kalimantan Timur yang telah di setujui pemerintah pada tahun 2014 lalu” (Wawancara pada hari Selasa, 2 Februari 2016 pukul 14.03 WITA di Kantor Kesekretariatan Perusahaan)

Keterangan yang disampaikan tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya selain dikarenakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kondisi lingkungan sekitar, program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur merupakan wujud dukungan perusahaan kepada kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan Ruang Terbuka hijau yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang.

4) Aspek lingkungan.

Aspek lingkungan adalah aspek yang menjadi titik utama dalam pelaksanaan program CSR penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam mengantisipasi pencemaran yang terjadi akibat proses produksi perusahaan. Keterkaitan program dengan aspek lingkungan di kawasan Kelurahan Guntung adalah program ini mampu membuat lingkungan Kelurahan Guntung terutama yang berada di area atau kawasan RT 7, RT 8, dan RT 9 sebagai lokasi utama yang berbatasan langsung dengan kawasan *barrier* perusahaan menjadi lingkungan yang lebih sehat, nyaman, dan menjadi pelindung masyarakat terhadap dampak pencemaran seperti bau amoniak dan bunyi bising dari perusahaan. Lingkungan yang ada pada dasarnya sudah hijau, namun lingkungan tersebut adalah lingkungan yang tidak produktif. Lingkungan di kawasan Guntung akan menjadi lebih hijau, asri, dan produktif apabila program penghijauan di kawasan *barrier* ini dapat terlaksana dengan baik dan tepat. Berikut keterangan yang disampaikan oleh Bapak Rahmat sebagai ketua LPM Guntung :

“...sebagai warga, kami sejak lama telah berharap adanya tindakan penanganan pencegahan dampak produksi perusahaan dari pihak perusahaan sendiri. Dan bersyukur sekali harapan kami tersebut kini terkabul dari bantuan perusahaan. Solusi apalagi untuk dampak seperti ini apabila tidak untuk menanam pohon sebanyak mungkin mulai dari sekarang. Karena hal yang kita lakukan sekarang akan dapat bermanfaat bagi anak cucu kita nanti. Dari sisi lingkungan sendiri dengan adanya program ini nanti akan membuat lingkungan Guntung akan semakin hijau dan semakin sehat. Secara tidak langsung nanti hasil dari program ini juga akan dapat menyerap polusi dari kegiatan produksi pabrik perusahaan baik bunyi bising dan bau amoniak.” (Wawancara pada hari Rabu, 3 Februari 2016 pukul 16.32 WITA bertempat di area zona 3 kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur)

Kemudian pernyataan yang lain mengenai keterkaitan program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur dengan lingkungan di sekitar perusahaan juga disampaikan oleh Ibu Esti Staf Departemen Lingkungan Hidup dan penanggung jawab program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur, yaitu:

“program penghijauan kawasan *barrier* perusahaan ini dari awal kita laksanakan memang karena kebutuhan perusahaan sebagai tembok atau penghalang dampak produksi dari pabrik ke area masyarakat. Kita harapkan seiring berjalannya program penghijauan ini nanti dapat mengurangi rasa khawatir masyarakat terhadap bau amoniak dan bunyi bising dari kegiatan produksi di pabrik. Dan dari sisi lingkungan juga kita harapkan pohon-pohon tersebut dapat membuat lingkungan yang berada di sekitar perusahaan bisa menjadi hijau dan asri. Dengan begitu masyarakat akan bisa menghirup udara segar dan bisa tidur nyenyak dengan meredamnya bunyi bising pabrik kita.” (Wawancara pada hari Selasa, 2 Februari 2016 pukul 08.10 WITA di kantor Departemen Lingkungan Hidup)

Pernyataan tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Sri Djuwani Ekowati sebagai Manajer Departemen Lingkungan Hidup PT. Pupuk Kalimantan Timur sebagai berikut:

“Pada dasarnya PT. Pupuk Kalimantan Timur ini memiliki jargon dalam pelaksanaan kegiatan CSR di bidang lingkungan, yaitu *Go Green and Blue Vision*. Apabila dipahami, makna *Go Green* ini adalah fokus utama perusahaan dalam program melestarikan lingkungan di daratan. Kemudian *Blue Vision* sendiri adalah jargon yang memiliki dua fokus. Yang pertama adalah fokus perusahaan dalam menjaga lingkungan serta ekosistem dan biota laut di kawasan perairan sekitar perusahaan. Makna dari *Blue Vision* yang lain adalah perusahaan sadar bahwa udara disekitar perusahaan juga mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dikarenakan dampak polusi dari kegiatan pabrik perusahaan sendiri maupun pabrik-pabrik yang juga berada di sekitar lingkungan perusahaan, maka dari itu PT. Pupuk Kaltim juga membuat suatu program untuk mengatasi perubahan-perubahan kondisi udara agar tetap terlihat biru dan sehat. Lebih lanjut lagi, secara khusus perusahaan dalam program penghijauan kawasan *barrier* ini, dari awal sudah memiliki konsep tentang bagaimana jargon-jargon tersebut dapat dilrasakan

secara bersamaan. Dengan adanya program penghijauan ini nanti diharapkan dari segi *go green*-nya dapat karena kawasan *barrier* menjadi hijau dan asri, kemudian dari segi *blue vision*-nya juga dapat karena pohon-pohon yang ditanam tersebut dapat menyerap polusi yang dihasilkan oleh perusahaan.” (Wawancara pada hari Kamis, 4 Februari 2016 pukul 16.30 WITA di Kantor Departemen Lingkungan Hidup)

Sehingga keterkaitan program menurut Ibu Sri Djuwani Ekowati sebagai Manajer Departemen Lingkungan Hidup dalam aspek lingkungan begitu kompleks perannya. Karena fokus program yang dilakukan tidak hanya pada lingkungan yang berada di darat saja, namun juga berkaitan dengan lingkungan yang berada di perairan maupun di udara. Selain dari segi kesehatan dan keasrian lingkungan industri perusahaan, *goal* dari program ini juga dapat mengurangi dampak bau ammonia dan bunyi bising yang muncul dari perusahaan.

Di dalam aspek lingkungan yang lain program penghijauan kawasan *barrier* ini juga ikut turut serta dalam meningkatkan jumlah RTH Kota Bontang. Berikut keterangan yang disampaikan Bapak Zaenal sebagai Staf Kesekretariatan Perusahaan:

“...terlepas dari ketetapan RTRW Kota Bontang, Pupuk Kaltim sendiri pada dasarnya telah memberikan lebih dari 30% kawasan Industri perusahaan untuk dijadikan RTH, hal tersebut dapat kita lihat dari Master Plan PT. Pupuk Kalimantan Timur yang telah di setujui pemerintah pada tahun 2014 lalu. Dari pembentukan RTH lebih dari 30% tersebut secara tidak langsung kita sudah mendukung program RTH Kota Bontang, belum lagi kita masih memiliki program yang lain seperti Wanatirta dan Wanalestari” (Wawancara pada hari Selasa, 2 Februari 2016 pukul 14.03 WITA di Kantor Kesekretariatan Perusahaan)

Jadi di dalam Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang beserta UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah dijelaskan bahwa daerah harus memiliki paling tidak 30% wilayahnya

untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berkaitan dengan program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur ini menjelaskan jika perusahaan sendiri dalam melakukan kegiatan atau program CSR dalam bidang lingkungannya selalu melakukan pertimbangan dari segala bidang dan aspek serta selalu mengkoordinasikannya kepada *stakeholder* yang berada di Kota Bontang baik dari pihak pemerintahan beserta dinas-dinas terkait, organisasi atau kelompok kemasyarakatan, hingga masyarakat sendiri.

b. Peran dan Pola Hubungan *Stakeholder*.

Peran dan pola hubungan antar *stakeholder* yang berada di dalam suatu program merupakan faktor penting terhadap berhasil atau tidaknya program tersebut. Hal ini yang membuat PT. Pupuk Kalimantan Timur sadar akan pentingnya menjaga komunikasi yang baik antara pemangku-pemangku kepentingan di daerah dan di lingkungan sekitar perusahaan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Wahyudi selaku Manajer Departemen Lingkungan Hidup PT. Pupuk Kalimantan Timur, yaitu:

“Hubungan yang baik antara perusahaan dengan *stakeholder* di Bontang sangatlah penting, mulai dari pemerintah daerah, lembaga suadaya masyarakat, organisasi sosial atau organisasi-organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat itu sendiri terutama masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar perusahaan. Untuk wilayah pemerintahan sendiri perusahaan berada didalam kawasan Kelurahan Loktuan dan Kelurahan Guntung. Sehingga dalam pola komunikasi dengan pemerintah kami selalu berkomunikasi dengan kedua kelurahan tersebut dalam menjalankan program-program tanggung jawab sosial perusahaan. Selain dari pihak pemerintah kami juga intens berkomunikasi melalui organisasi-organisasi ke masyarakatan yang berada di Loktuan maupun Guntung seperti karang taruna maupun LPM yang berada disana, bahkan tidak jarang juga kami langsung menghampiri masyarakat secara individu untuk melakukan sosialisasi maupun menanyakan tentang problem atau masalah-masalah yang sering mereka rasakan. Jadi pola hubungan

dan komunikasi antara perusahaan dengan *stakeholder* tersebut sangat penting, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap jalannya program-program yang kami buat. Sukses tidaknya program juga tergantung dari komunikasi kami dengan mereka. Jika komunikasi kami tidak baik maka akan sulit bagi perusahaan untuk melaksanakan program-programnya. Duduk bersama, diskusi bersama, minum kopi bersama seperti itulah yang sedang kami lakukan agar hubungan kami dengan mereka tetap terjaga dengan baik” (Wawancara pada hari Kamis, 4 Februari 2016 pukul 14.30 di kantor Departemen Hubungan Masyarakat)

Jalannya segala macam program perusahaan tidak akan dapat berjalan sesuai target dan tujuan yang telah ditentukan jika perusahaan tidak dapat menjaga hubungan yang baik terhadap *stakeholder* yang ada. Maka dari itu tingkat keberhasilan sebuah program tidak dapat dilepaskan dari pola hubungan antara setiap *stakeholder*. Di dalam program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur ini sendiri terdapat beberapa *stakeholder* yang memiliki peran dan pola hubungan yang saling berkaitan, antara lain:

1) PT. Pupuk Kalimantan Timur

PT. Pupuk Kalimantan Timur di dalam program penghijauan kawasan *barrier* berperan sebagai pembuat dan perancang program. Sebagai salah satu *stakeholder* yang memiliki kepentingan paling besar didalamnya dalam menanggulangi dampak-dampak yang terjadi dari kegiatan produksi yang terjadi di lingkungan pabrik memiliki tiga departemen utama dalam suatu struktur yang disebut komite CSR. Ketiga departemen utama tersebut antara lain adalah Departemen Lingkungan Hidup, Departemen Hubungan Masyarakat, dan Departemen Kesekretariatan Perusahaan. Dalam peran ketiga departemen tersebut di dalam program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur

dijelaskan oleh Bapak Wahyudi sebagai Manajer Departemen Hubungan Masyarakat sebagai berikut:

“Program penghijauan kawasan *barrier* ini pada dasarnya merupakan rancangan dari Departemen LH (Lingkungan Hidup). Pada tahap awal dilakukan pada tahun 2014 yang dilakukan di Kelurahan Guntung. Dalam tahap pertama telah ditanami pohon-pohon lindung yang juga produktif. Rencana dari Departemen LH sistem penanaman tersebut akan terbagi menjadi 3 lapis yaitu zona 1, zona 2, dan zona 3. Dan sejauh ini yang sudah berjalan berada di zona 1 di kawasan dalam perusahaan dan zona 3 yang berdekatan langsung dengan masyarakat dan untuk zona 2 sendiri saat ini masih di gagas oleh departemen LH untuk dilaksanakan penanaman kembali. Nah ,pada dasarnya seluruh kegiatan perencanaan dalam program ini langsung dibawah kendali Departemen LH. Sedangkan untuk humas sendiri lebih fokus pada perannya sebagai mediator dan penghubung antara pihak perusahaan dengan pemerintah, LSM, dan masyarakat.” (Wawancara pada hari Kamis, 4 Februari 2016 pukul 14.30 WITA di Kantor Departemen Hubungan Masyarakat)

Lebih lanjut tentang peran yang berkaitan dengan ketiga departemen utama di dalam implementasi program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur ini disampaikan oleh Ibu Esty selaku staf Departemen Lingkungan Hidup yang juga menjadi penanggung jawab program, yaitu:

“...program ini memang menjadi sebuah pilot proyek buat perusahaan untuk mencoba menanggulangi dampak produksi perusahaan seperti bunyi bising dan bau amoniak atau paling tidak bisa mengurangi dampak tersebut. Dari keseluruhan program lingkungan yang bersangkutan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, kami (Departemen Lingkungan Hidup) tidak berjalan sendirian. Dari segi perijinan dan pendanaan kami semua serahkan pada Departemen Kesekretariatan Perusahaan. Karena disana yang mengurus hal-hal seperti itu, mulai dari perijinan seperti amdal dan lain sebagainya dan perhitungan anggaran mereka yang menentukan. Departemen Lingkungan Hidup hanya memiliki kewenangan menyerahkan rencana dan rancangan program yang didalamnya juga sudah kami berikan rencana anggaran program tersebut. Selain itu untuk mediasi maupun koordinator dengan masyarakat dan pemerintah setempat kami serahkan pada Departemen Humas” (Wawancara pada hari Selasa, 2 Februari 2016 pukul 08.10 WITA di kantor Departemen Lingkungan Hidup)

Jadi dari ketiga departemen yang memiliki peran utama dalam implementasi program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur ini memiliki peran-peran yang berbeda, untuk Departemen Lingkungan Hidup di dalam program ini memiliki peran sebagai perancang, pelaksana, pengawas dan evaluator program. Kemudian Departemen Hubungan Masyarakat sebagai koordinator antara perusahaan dengan pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah Departemen Keskretariat yang memiliki peran sebagai bagian terakhir dalam keputusan penganggaran program yang berkaitan dengan perijinan dan pendanaan program.

2) Pemerintah Kota Bontang

Pihak Pemerintah Kota Bontang dalam hal ini yang memiliki peran yang begitu krusial adalah para Birokrat Kelurahan Guntung. Kelurahan Guntung yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah Kota Bontang memiliki peran sebagai salah satu penghubung antara pihak perusahaan sebagai pemilik program dengan masyarakat yang menjadi salah satu objek dan target dalam program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur. Peran menjadi mediator atau penghubung antar *stakeholder* di lingkungan Kelurahan Guntung bukanlah hal yang mudah karena pihak kelurahan juga sekaligus menjadi penengah hubungan antara perusahaan dengan masyarakat. Selain itu pihak kelurahan juga memiliki tugas yaitu mengarahkan langkah-langkah dalam pelaksanaan program untuk mewujudkan program yang berkelanjutan ke arah yang lebih luas.

Keterangan ini disampaikan oleh Bapak Baslan selaku Lurah Kelurahan Guntung yang mengatakan:

“...selama ini program yang ada dikelurahan kebanyakan merupakan kegiatan yang bersifat *charity*. Jarang sekali ada program yang murni program (berkelanjutan), maksudnya adalah adanya keberlanjutan dan adanya sebuah sistem pemberdayaan. Sejak tahun 2012 di kelurahan Guntung telah mencoba merubah pola pikir tersebut untuk menjadikan sebuah program menjadi hal yang benar-benar bisa disebut program dengan adanya dua hal tersebut. Disini yang harus dirubah pada awalnya adalah pola hubungan dan komunikasi antara *stakeholder* yang ada, *stakeholder* itu adalah PT. Pupuk Kalimantan Timur, masyarakat, dan pemerintah sendiri. Disini pihak kelurahan sebagai pemerintahan berperan sebagai penengah antara apa yang ingin dilakukan oleh perusahaan melalui program yang mereka tawarkan dengan apa kebutuhan masyarakat dilapangan. Pas apa tidak? Cocok atau tidak program tersebut dengan kebutuhan masyarakat sekarang? Nah, hal yang seperti ini yang biasanya sedikit susah menemukan titik temunya. Maka dari itu kami sebagai birokrat pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pengarah dan jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan yang sedemikian rupa tersebut. Selain itu kembali ke visi pemerintah di awal, pemerintah disini mengharapkan adanya keberlanjutan di dalam sebuah program. Adanya pemberdayaan yang melibatkan masyarakat-masyarakat sekitar terutama mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lemah atau sering kita sebut RTM (Rumah Tangga Miskin) secara tidak langsung akan berdampak pada aspek ekonomi dan sosial masyarakat.”
(Wawancara pada hari Jum’at, 5 Februari 2016 pukul 08.49 WITA di Kantor Kelurahan Guntung)

Peran pemerintah di dalam program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur ini adalah menjadi mediator antara kepentingan perusahaan dan kepentingan masyarakat. Di dalam mediasi yang dilakukan tidak selamanya berjalan lancar antara perusahaan dengan masyarakat. Namun dengan turun tangannya pemerintah secara langsung setidaknya dapat memberikan jalan keluar demi kepentingan bersama.

3) Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Guntung

Peran masyarakat serta tokoh masyarakat merupakan salah satu faktor penting terhadap kelancaran jalannya program yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. Dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan semua melibatkan peran masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada. Lebih lanjut lagi peran masyarakat di dalam program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur di jelaskan oleh Bapak Rahmat Haryono yang juga salah satu Tokoh Masyarakat Guntung sebagai berikut:

“Peran masyarakat di dalam program penghijauan ini tidak hanya sebagai pelaksana lapangan saja. Kami disini juga ikut dalam tahap perencanaan, di mulai dari koordinasi, analisis, dan tahap penetapan pelaksana kami menyampaikan semua unek unek atau aspirasi kami. Hal ini menjadi sangat penting karena secara tidak langsung perusahaan melakukan ini selain karena itu menjadi kewajiban mereka sebagai bentuk tanggung jawab sosial mereka juga dikarenakan kami merupakan masyarakat binaan mereka. Selain itu saya di sini sebagai salah satu warga yang di percaya oleh warga yang lain untuk menjadi salah satu pemangku bagi mereka juga sering ikut terlibat untuk mensosialisasikan program-program yang dilaksanakan perusahaan di wilayah Guntung. Program yang tidak hanya berkaitan dengan Pupuk Kaltim, namun juga program yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan lain di wilayah Kelurahan Guntung. Selama program-program yang dilaksanakan disini merupakan program yang baik dan tidak merugikan masyarakat saya dan warga Guntung akan selalu siap sedia untuk ikut turun ke lapangan demi melancarkan program-program yang ada. Karena kami juga sadar bahwa perusahaan-peusahaan ini melakukan atau membuat program-program tersebut juga demi kami, warga guntung. Entah niatan itu karena untuk menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan kami atau ada niatan yang lain. Tapi kami selalu menghargai dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi mereka.” (Wawancara pada hari Sabtu, 6 Februari 2016 pukul 19.00 WITA)

Di dalam program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur ini tokoh masyarakat juga menjadi titik sentral selain peran dari pihak kelurahan atau pemerintah daerah. Tokoh masyarakat yang menjadi pemangku

warga menjadi salah satu titik kepercayaan bagi masyarakat untuk ikut turut serta dalam segala macam kegiatan maupun program yang dilaksanakan di lingkungan Guntung. Selain itu tokoh masyarakat Guntung merupakan salah satu cara bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung kepada para *stakeholder* yang ada dalam berbagai macam forum. Sedangkan masyarakat memiliki peran yang beragam di dalam pelaksanaan program seperti penanaman, perawatan, dan pembibitan. Sebagai salah satu pelaksana lapangan program penghijauan kawasan *barrier* Bapak Yusman yang juga salah satu kepala keluarga RTM Guntung mengatakan:

“Saya disini menjadi tukang tanam pohon dan perawat pohon. Sedangkan teman saya yang lain Pak Sahir dan Pak Suwanto punya tugas jadi tukang bersih-bersih lahan seperti motong rumput dan melakukan pembibitan. Saya dan teman-teman sudah bertugas disini sejak tahun 2014. Setiap 2 bulan sekali saya dan teman melakukan perawatan dan membersihkan kawasan penanaman dari rumput-rumput liar” (Wawancara pada hari Rabu, 3 Februari 2016 pukul 17.25 WITA di Kawasan *barrier* Zona 3 PT. Pupuk Kalimantan Timur)

Jadi, dari identifikasi hasil keterangan yang disampaikan oleh masyarakat dan tokoh masyarakat dapat dipahami jika peran dan pola hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak perusahaan sendiri merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan antara satu dengan yang lain. Karena setiap *stakeholder* memiliki perannya masing-masing dan tidak dapat di gantikan oleh siapa pun. Sehingga dengan adanya pembagian peran dan pola hubungan yang baik antar stakeholder yang ada akan dapat memperlancar implementasi program serta membuat pencapaian target-target dan tujuan perusahaan dalam program penghijauan kawasan *barrier*-nya lebih efektif dan optimal.

c. Bentuk kegiatan dan proses program CSR Penghijauan Kawasan *Barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur.

Bentuk program CSR PT. Pupuk Kalimantan dalam penghijauan kawasan *barrier* industri untuk mengantisipasi pencemaran lingkungan akibat proses produksi perusahaan ini adalah program yang mengedepankan sistem pemberdayaan dan berkelanjutan agar di masa yang akan datang bentuk-bentuk polusi atau dampak yang kini dirasakan dapat teratasi. Perusahaan di dalam program CSRnya selalu berupaya untuk terus dapat bergandengan tangan dengan masyarakat sekitar perusahaan dalam segala aktivitasnya. Perusahaan sadar betapa pentingnya keselamatan dan kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar perusahaan sehingga membuat pihak perusahaan melakukan perencanaan sebuah program yaitu Penghijauan Kawasan *Barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur. Program ini ditujukan agar masyarakat dapat tetap merasakan kehidupan yang layak dan sehat agar dapat terus bersama-sama tumbuh dan berkembang antara pihak perusahaan dengan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah di buat oleh perusahaan yang tertuang dalam Kebijakan CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur. Di dalam kebijakan tersebut menyebutkan bahwa:

Dalam rangka mewujudkan keharmonisan antara masyarakat dan perusahaan serta wujud kepedulian perusahaan terhadap pengembangan masyarakat sekitar, maka ditetapkan **Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR)**, sebagai berikut:

1. CSR PT. Pupuk Kaltim terintegrasi dengan Kebijakan Perusahaan, baik dalm perencanaan, implementasi, pelaporan , dan publikasi CSR.
2. CSR PT. Pupuk Kaltim mengedepankan pendekatan kemitraan strategis Academic, Bussiness, Government, dan Community (ABGC)

3. CSR PT. Pupuk Kaltim mengutamakan pemberdayaan masyarakat yang didukung proses pendampingan.
4. Pelaksanaan dan indikator capaian CSR PT. Pupuk Kaltim mengacu pada regulasi nasional dan global (ISO 26000).

Adapun bentuk kegiatan serta proses di dalam program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur terkait penghijauan kawasan *barrier* perusahaan dalam upaya mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan terhadap masyarakat Guntung memiliki beberapa tahap dalam implementasinya, tahap yang dimaksud meliputi:

1) Tahap perencanaan

Sebelum melaksanakan program, di dalam tahap perencanaan ini dirancang dan dilaksanakan oleh staf dan jajaran Departemen Lingkungan Hidup dimana departemen Lingkungan Hidup ini adalah departemen yang fokus menangani dan memiliki peran *support* dalam lingkungan industri perusahaan. Program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur sendiri merupakan salah satu program pelestarian lingkungan yang terdapat pada rencana jangka panjang dan rencana strategis perusahaan. Proses perencanaan ini dapat dijelaskan sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Esty staf khusus yang bertanggung jawab dalam program CSR Departemen Lingkungan Hidup PT. Pupuk Kalimantan Timur yaitu:

“Karena meningkatnya tingkat produksi perusahaan yang semakin besar dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar perusahaan akan udara yang bersih dan sehat perusahaan melakukan diskusi dalam sebuah forum tentang upaya perusahaan dalam mengantisipasi dampak-dampak yang skiranya dapat merusak kesehatan masyarakat sekitar. Akhirnya kami membuat beberapa perencanaan yang kami masukan dalam rencana strategis program CSR PT. Pupuk Kaltim. Didalam renstra tersebut kami cantumkan bagaimana nanti program-program lingkungan ini dilaksanakan dan

apa saja goal-goalnya”. (Wawancara pada Selasa, 2 Februari 2016 pukul 08.10 WITA bertempat di ruang Departemen Lingkungan Hidup PT. Pupuk Kalimantan Timur)

Terkait dengan proses perencanaan program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur, salah satu tim koordinator Komite CSR yaitu Bapak Wahyudi yang juga menjadi Manajer Departemen Hubungan Masyarakat memberikan keterangan yaitu:

“Terkait program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur ini dibuat kan karena untuk mengantisipasi bau amoniak dan bunyi bising di kawasan pabrik. Program penghijauan kawasan *barrier* ini memang merupakan rancangan dari Departemen LH (Lingkungan Hidup). Pada tahun 2014 pelaksanaan dilakukan di Kelurahan Guntung merupakan tahap awal dari program ini. Pada tahap awal yang menjadi target utama penanaman adalah kawasan dibelakang kantor diklat di lingkungan kantor pusat hingga kawasan yang berbatasan dengan pelabuhan guntung di dekat (pabrik) kaltim 5. Dalam tahap pertama tersebut ditanami pohon-pohon lindung yang produktif. Rencana dari Departemen LH sistem penanaman tersebut akan terbagi menjadi 3 lapis yaitu zona 1, zona 2, dan zona 3. Dan sejauh ini yang sudah berjalan berada di zona 3 yang berdekatan langsung dengan masyarakat dan untuk zona 2 sendiri saat ini masih di gagas oleh departemen LH untuk dilaksanakan penanaman kembali. Nah, pada dasarnya seluruh kegiatan perencanaan dalam program ini langsung dibawah kendali Departemen LH” (Wawancara pada hari Kamis, 4 Februari 2016 pukul 14.30 WITA di Kantor Departemen Hubungan Masyarakat)

Tahap perencanaan ini dilaksanakan karena dalam suatu pelaksanaan program perlu adanya tujuan, sasaran, dan anggaran yang jelas. Sebelum melaksanakan Program Penghijauan pada kawasan *barrier*, PT. Pupuk Kalimantan Timur telah melakukan survey dan analisis kondisi lingkungan serta berkoordinasi bersama pemerintah kelurahan dan masyarakat sekitar. Adapun proses survey dan analisis kondisi lingkungan serta kondisi masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a) Melaksanakan patroli rutin di kawasan pemukiman masyarakat serta berkomunikasi langsung kepada masyarakat.
- b) Melakukan pengawasan arah angin menggunakan *wind direction* untuk mengetahui area atau kawasan mana saja yang sering mengalami penurunan kualitas udara akibat proses produksi perusahaan.
- c) Melakukan pengukuran kualitas udara menggunakan beberapa alat indikator kesehatan udara dan alat indikator kebisingan.
- d) Melakukan pendataan daerah mana saja yang tepat dan perlu untuk dilakukan proses penghijauan.
- e) Melakukan pendataan dan persortiran terhadap jenis bibit tanaman yang akan ditanam berdasarkan area dan kawasan *barrier* perusahaan.
- f) Memberikan daftar nomor telepon yang dapat dihubungi oleh masyarakat selama 24 jam untuk melakukan laporan atau memberitahukan kondisi terkini lingkungan mereka.

Dalam proses analisis tersebut maka akan muncul data-data mengenai perkembangan kualitas udara dan lingkungan di sekitar masyarakat. Sehingga dari data tersebut perusahaan dapat menentukan langkah pembuatan program baru baik dalam program antisipasi maupun melakukan perbaikan program perusahaan yang telah ada. Selain kegiatan surevey dan analisis kondisi lingkungan dan kondisi masyarakat di sekitar perusahaan, PT. Pupuk Kalimantan Timur juga membuat tim dalam menyusun *Social Mapping*. *Social Mapping* ini berguna dalam sinkronisasi antara jenis dan pendekatan program dengan sasaran program. Di dalam Pemetaan Sosial (*Social Mapping*) Kelurahan Guntung, Kecamatan Bintang Utara, Kota

Bontang yang dibuat PT. Pupuk Kalimantan Timur pada tahun 2014 menjelaskan tujuan dilaksanakannya pembuatan dan penyusunan *Social Mapping* dalam perencanaan program-program CSR perusahaan. Tujuan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Menganalisis potensi penghidupan berkelanjutan yang mencakup potensi sumberdaya manusia, potensi sumberdaya alam, modal sosial, modal keuangan, kondisi infrastruktur publik.
2. Menyusun peta dan menganalisis actor (*stakeholder*), yang mencakup; deskripsi posisi, peran, dan jaringan hubungan antar actor.
3. Menganalisis derajat kekuatan (*power*) dan kepentingan (*interest*) aktor.
4. Identifikasi mekanisme/forum-forum yang menjadi saran yang dipergunakan masyarakat dalam membahas kepentingan umum/publik.
5. Menganalisis kebutuhan masyarakat untuk mendukung penghidupan berkelanjutan
6. Menganalisis jenis-jenis kerentanan (*vulnerability*) dan kelompok rentan serta masalah sosial.

Dengan disusunnya *Social Mapping* tersebut perusahaan memiliki harapan mengenai *output* atau hasil keluaran yang ingin dicapai pada kegiatan CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur sesuai dengan target yang telah ditetapkan perusahaan dan memberikan manfaat-manfaat antara lain sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait seperti tim manajemen penyusun program CSR di lokasi studi; sebagai bahan manajemen untuk menyusun rencana pengelolaan monitoring dampak sosial; memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat mengelola dampak positif dan mencegah kemungkinan terjadinya dampak negatif yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan.

Proses perencanaan ini juga sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Ibu Sri Djuwani Ekowati sebagai Manajer Departemen Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“Pada proses perencanaan saya selalu meminta staf saya dalam forum diskusi untuk membuat renstra serta renja program tersebut. Dalam proses perencanaan tersebut kami selalu membuat gambaran-gambaran maupun *design* dari rekomendasi-rekomendasi tentang tanaman apa yang cocok untuk program ini, terus berapa jumlah tanaman atau bibit yang akan diserahkan, dan gambaran petanya. Selain dari tim Departemen LH sendiri kami juga melibatkan tim Rekon Perusahaan dalam merencanakan program-program yang akan kami laksanakan. Selain itu sebelum kami menentukan atau mengajukan program ini kepada direksi perusahaan kami melaksanakan beberapa tahapan survey dan analisis lapangan. Selain itu kami juga telah membuat *social mapping* agar kami lebih mudah dalam melihat apasaja yang sekiranya dibutuhkan selama program ini berjalan” (Wawancara pada hari Kamis, 4 Februari 2016 pukul 16.30 WITA di Kantor Departemen Lingkungan Hidup)

Setelah data dari perusahaan disusun dan menjadi sebuah perencanaan program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur, kemudian perusahaan mengkomunikasikan serta memberikan data perencanaan program kepada pihak Kelurahan Guntung karena program tersebut akan dilaksanakan di Kelurahan Guntung dan melibatkan warganya dalam pelaksanaan program tersebut. Sesuai dengan hal ini Bapak Baslan selaku Lurah Kelurahan Guntung memberikan keterangan sebagai berikut:

“...di dalam pola hubungan antara pihak kelurahan dengan perusahaan selalu dilibatkan dalam proses perencanaan. Ketika perusahaan ingin membuat sebuah program di kawasan Kelurahan Guntung maka perusahaan akan berkomunikasi kepada kami. Setelah berkomunikasi dengan kami maka selanjutnya melalui program itu kami mengajak perusahaan untuk duduk bersama dengan kami untuk ikut rembukan bareng bersama warga baik dari RT, LPM, maupun Karang Taruna. Setelah itu kami membicarakan kobiyah apa yang mereka perlukan di dalam program tersebut, pada

awalnya kami tidak membicarakan tentang *cost* dari program yang akan dilaksanakan. Sehingga dengan anggaran yang telah mereka rencanakan dengan jumlah sekian apa yang ingin mereka inginkan dan lakukan. Kami disini hanya akan menyesuaikan dan tidak menuntut lebih, karena semua kembali pada itikad dan kesadaran perusahaan terhadap apa yang ingin mereka lakukan bersama kami disini. Namun jika dalam perjalanan program tersebut memiliki dampak positif bagi masyarakat maka akan dimulai tentang bagaimana *cost* perawatan atau kegiatan selanjutnya”. (Wawancara pada Jum’at, 5 Februari 2016 pukul 08.45 WITA bertempat di Kantor Lurah Kelurahan Guntung)

Hal tersebut juga senada dengan keterangan ketua LPM dalam bidang lingkungan Kelurahan Guntung Bapak Rahmat Haryono yaitu:

“Memang di dalam perancangan program ini kami selalu dilibatkan, baik dalam diskusi bersama perusahaan maupun bersama pemerintahan. Kami sebagai warga juga selalu memberi masukan dan menyampaikan apa kebutuhan dan harapan kami di dalam program tersebut. Sehingga nantinya dalam pelaksanaan program tersebut kami bisa turut membantu perusahaan dan begitu sebaliknya. Kan, untuk program ini sendiri bertujuan untuk kepentingan bersama, baik untuk perusahaan sendiri maupun bagi kami.” (Wawancara pada hari Rabu, 3 Februari 2016 pukul 16.42 WITA di Zona 3 Kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur)

Dalam tahap perencanaan didapatkan bahwa perusahaan selalu berusaha untuk mengkoordinasikan segala rencana yang akan di buat kepada pihak pemerintah, masyarakat, maupun tokoh masyarakat yang ada. Kemudian dari proses koordinasi dan diskusi yang telah dilakukan didapatkan hasil tentang kegiatan utama program, sub kegiatan, tujuan, sasaran kegiatan, dana, waktu realisasi serta lokasi pelaksanaannya yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 9 : Rencana Kegiatan Program Penghijauan Kawasan *Barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur

Program	Pelestarian Lingkungan	Dana	Rp. 75.000.000,00
Sub Kegiatan	Penanaman Pohon Barrier	Lokasi	Kelurahan Guntung
Tujuan	Sebagai penghijauan antara perusahaan dengan pemukiman warga	Realisasi	Tahap pertama pada tahun 2014-2019
Sasaran Kegiatan	Masyarakat Kelurahan Guntung yang di koordinir oleh LPM Guntung		

Sumber: Rencana Strategis PT. Pupuk Kalimantan Timur 2014

Jadi, tahap perencanaan dalam program penghijauan kawasan *barrier* PT, Pupuk Kalimantan Timur tidak muncul begitu saja karena desakan masyarakat tentang kualitas udara yang mereka rasakan. Namun program ini muncul juga karena adanya tindak lanjut yang lebih mendalam melalui pengawasan secara menyeluruh dan sistematis yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang kemudian didiskusikan bersama-sama masyarakat *buffer zone* Kelurahan Guntung.

Namun temuan di lapangan masih belum adanya prosedur operasi yang standar atau SOP (*Standard Operating Procedures*). Pada tahap perencanaan seharusnya juga telah di buat SOP implementasi program penghijauan kawasan *barrier* agar implementor memiliki pedoman dan arahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Temuan ini juga diakui staf Departemen Lingkungan Hidup Ibu Esty selaku penanggungjawab program:

“...di dalam implementasi program penghijauan ini kami belum punya SOP kegiatan. Semua pelaksanaan kita koordinasikan melalui

lisan saja. Sedangkan untuk pelaksanaan di lapangan kami mengandalkan sepenuhnya kepada masyarakat yang menjadi pelaksana lapangan. Karena sebelum mereka melaksanakan penanaman, perawatan, dan pembibitan telah kita beri pelatihan dan pengarahan tentang teknik yang benar dalam melaksanakan tugasnya nanti” (Wawancara pada hari Selasa, 2 Februari 2016 pukul 09.00 WITA di kantor Departemen Lingkungan Hidup)

Dengan adanya keterangan tersebut perusahaan sejauh ini lebih mengandalkan disposisi yang baik dari para implementor dilapangan dengan pembinaan dari pihak LPM Guntung dan dari kegiatan tersebut perusahaan pada tahap pelaksanaan dan monitoring hanya melakukan pengawasan melalui pihak LPM Guntung dan sesekali melakukan peninjauan langsung ke area pelaksanaan program untuk mendapatkan laporan berdasarkan hasil yang telah pelaksana lakukan.

2) Tahap pelaksanaan

Dalam tahapan pelaksanaan ini adalah tahapan yang akan menjelaskan tentang bagaimana hasil yang selama ini telah dirancang dan direncanakan oleh perusahaan. Tahap ini menjelaskan tentang bagaimana proses pelaksanaan tugas dari struktur organisasi pelaksanaan kemudian bagaimana interpretasi pelaksana dalam menjalankan program dan bagaimana bentuk penerapan atau aplikasi yang telah dibuat berdasarkan surat keputusan maupun kontrak yang telah dibuat antara perusahaan dengan pihak ketiga. Adapun tahap pelaksanaan terbagi melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a) Penetapan implementor program dari masyarakat Kelurahan Guntung.

Dalam kegiatan ini pihak perusahaan melibatkan secara langsung masyarakat Kelurahan Guntung sebagai implementor lapangan terkait dengan proses penanaman, perawatan, dan pembibitan tanaman yang akan

ditanam sebagai langkah penghijauan. Hal ini senada dengan keterangan yang diberikan oleh Ibu Esty selaku penanggung jawab program CSR penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur yang juga salah satu staf Departemen Lingkungan Hidup yang mengatakan:

“...program ini tidak hanya berfokus pada kegiatan penanaman saja, melainkan juga fokus kepada pembibitan juga. Dan dalam praktiknya yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah masyarakat Guntung. Sebagian dari pelaksana lapangan ini merupakan masyarakat yang masuk dalam kategori rumah tangga miskin (RTM). Sebenarnya bisa saja kami mengontak pihak kontraktor atau melibatkan pihak lain di dalam program ini. Namun kegiatan di dalam program ini kami juga menanamkan sistem pemberdayaan bagi masyarakat terutama mereka yang tidak mampu dari sisi ekonomi tersebut. Jadi kami cukup selektif untuk memilih pelaksana di lapangan”. (Wawancara pada Selasa, 2 Februari 2016 pukul 08.10 WITA bertempat di ruang Departemen Lingkungan Hidup PT. Pupuk Kalimantan Timur)

Dalam pelaksanaannya, pelibatan masyarakat secara langsung tersebut merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat sekitar seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Sri Djuwani Ekowati selaku manajer Departemen Lingkungan hidup yang mengatakan:

“Perusahaan dalam program penghijauan kawasan *barrier* dari awal sudah fokus dan *concern* bahwa masyarakat akan kita libatkan di dalam pelaksanaannya. Perusahaan bisa saja menyerahkan pekerjaan atau program tersebut kepada pihak ketiga atau kontraktor. Tapi tidak, kami tidak seperti itu. Kami selalu mengutamakan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat di sekitar perusahaan. Kami selalu menanamkan sistem yang berkelanjutan baik dari sisi program maupun pemberdayaannya agar program yang kami buat ini memiliki manfaat bagi perusahaan sendiri yang nantinya bisa semakin aman, sehat, dan hijau, dan juga memiliki manfaat bagi masyarakat dalam bentuk ekonomi, lingkungan, hingga kesehatan jangka panjang bagi anak cucu mereka nanti.” (Wawancara pada hari Kamis, 4 Februari 2016 pukul 16.30 WITA di Kantor Departemen Lingkungan Hidup)

Keterangan tersebut juga diperkuat oleh Bapak Wahyudi selaku Manajer Departemen Hubungan Masyarakat yang mengatakan:

“...di humas sendiri dalam pola kegiatan atau pelaksanaan program ini ialah menjadi koordinator penghubung antara perusahaan dengan pemerintah dan masyarakat. Di dalam program ini pelaksanaannya dari pada kita berikan kepada kontraktor atau pihak luar, kita jauh lebih mengutamakan untuk melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga pelaksana dilapangannya. Dengan begitu masyarakat juga yang lebih menikmati dengan adanya program kita. Selain itu dengan kita melibatkan masyarakat di dalam program kita, perusahaan dapat menekan *cost* untuk biaya penanaman dan perawatan. Jadi kita sebagai perwakilan dari perusahaan langsung kita koordinasikan dengan pihak keluraha. Nanti pihak kelurahan sendiri yang akan menentukan siapa pelaksana dilapangannya, baik itu dari LPMnya, karang tarunanya, maupun masyarakat RTM yang akan dilibatkan dalam program kita.” (Wawancara pada hari Kamis, 4 Februari 2016 pukul 4.30 WITA di Kantor Departemen Hubungan Masyarakat)

Senada dengan pernyataan dari pihak perusahaan, Bapak Rahmat Haryono selaku ketua LPM Guntung juga membenarkan tentang bagaimana cara yang dilakukan dalam pemilihan atau penetapan implementor di dalam program penghijauan kawasan *barrier* milik PT. Pupuk Kalimantan Timur. Beliau mengatakan:

“Dari proses musyawarah kami dilibatkan secara langsung kemudian dalam proses pelaksanaannya sekarang dari penanaman, perawatan, pemupukan, hingga pembibitan kami yang melakukan semuanya. Hal ini menjadi positif ketika masyarakat ini langsung dilibatkan dan lebih lagi perusahaan melibatkan secara langsung masyarakat yang masuk dalam RTM Guntung. Sebelumnya, masyarakat yang terlibat di dalam program ini telah mendapatkan pelatihan tentang bagaimana cara menanam, merawat, hingga melakukan pembibitan yang baik dan benar.” (Wawancara pada hari Jum’at, 5 Februari 2016 pukul 19.42 WITA)

b) Pemilihan lokasi dan zona penghijauan.

Kegiatan pemilihan lokasi ini Perusahaan tidak sembarangan dalam melakukan kegiatan penghijauan karena tidak semua wilayah yang masuk dalam kawasan *barrier* dapat ditanami dengan tanaman-tanaman yang masuk dalam rancangan program. Dalam rancangan program sendiri lokasi dan zona terbagi menjadi 3 zona yaitu, zona 1 adalah area yang memiliki jarak sepanjang 10 meter dari kawasan kantor/pabrik yang mengarah ke pemukiman Kelurahan Guntung, zona 2 adalah area yang memiliki jarak sepanjang minimum 15 meter ditengah-tengah antara perusahaan dan masyarakat, dan zona 3 adalah area yang memiliki jarak sepanjang 15 meter dari kawasan pemukiman masyarakat ke arah perusahaan. Pemilihan dan penentuan zona tersebut sesuai dengan keterangan Ibu Esty selaku anggota komite CSR yang mengatakan:

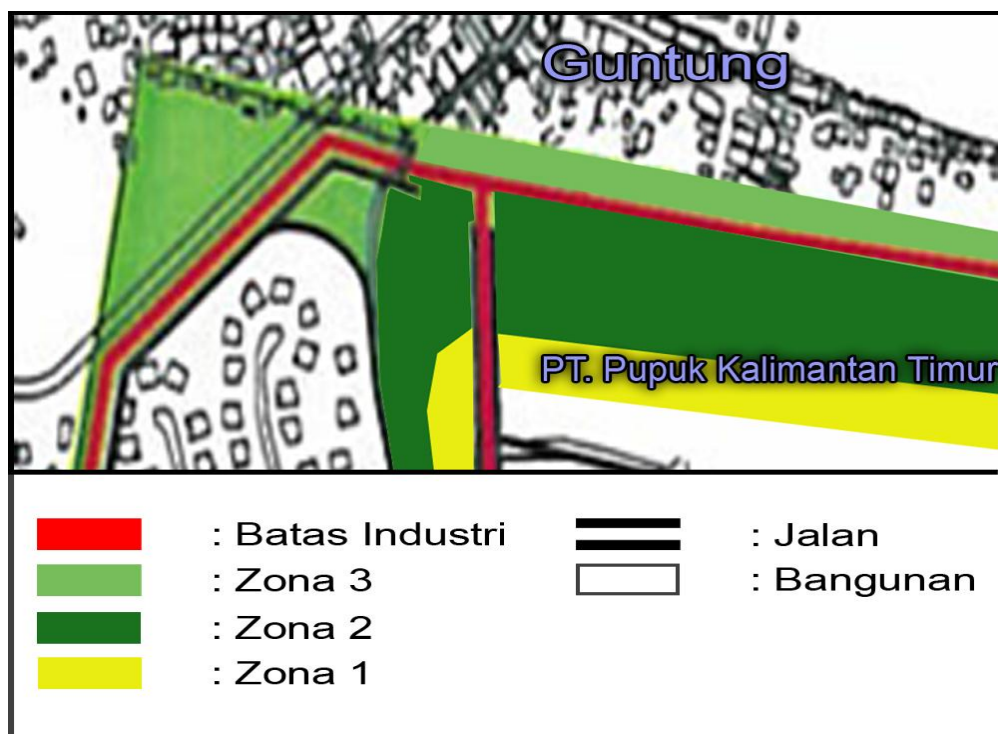
“Program ini telah kami petakan lokasi-lokasi untuk nanti dilakukannya kegiatan penghijauan. Kami telah membagi *barrier* menjadi tiga bagian. Bagian tersebut sudah kami tuangkan pada pertemuan dengan pihak kelurahan dan masyarakat kemarin. Bagian tersebut terbagi menjadi zona 1,2, dan 3. Dengan zoan 1 akan kami tanami bamboo kuning sebagai peredam bunyi bising, zona 2 pepohonan besar, dan zona 3 yang langsung berbatasan denga masyarakat kita tanami pohon-pohon besar produktif dan pohon buah-buahan. Cukup selektif juga kami dalam memetakan lokasi ini dikarenakan kawasan *barrier* memiliki kontur permukaan yang berbeda-beda mulai lading gambut hingga rawa-rawa” (Wawancara pada hari Selasa, 2 Februari 2016 pukul 08.30 WITA di Kantor Departemen Lingkungan Hidup)

Keterangan tersebut juga di sampaikan oleh Bapak Wahyudi manajer Departemen Humas yang juga termasuk dalam komite CSR bahwa sejauh ini rencana dan pelaksanaan program CSR penghijauan kawasan *barrier*

telah berjalan sejalan termasuk dalam pemilihan lokasi pelaksanaan program. Berikut keterangannya:

“...rencana dan pelaksanaan program penghijauan ini sudah sejalan sejauh ini. Pada awalnya rencana dari Departemen LH sendiri adalah menggunakan sistem penanaman yang akan dibagi menjadi 3 lapis yaitu zona 1, zona 2, dan zona 3. Namun dalam pelaksanaan penghijauan tersebut tidak mudah, karena kontur tanaman di setiap zona bermacam-macam jenis dan bentuknya. Sejauh ini pelaksanaan program yang sudah berjalan berada di zona 3 yang berdekatan langsung dengan masyarakat dan untuk zona 2 sendiri saat ini masih di gagas oleh departemen LH untuk dilaksanakan penanaman kembali.” (Wawancara pada hari Kamis, 4 Februari 2016 pukul 4.30 WITA di Kantor Departemen Hubungan Masyarakat)

Apabila dilihat lebih jelas dalam master plan PT. Pupuk Kalimantan Timur tentang pembagian zona dapat digambarkan seperti gambar berikut:



Gambar 12: Pembagian Zona pada kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur

Sumber: Master Plan PT. Pupuk Kalimantan Timur 2014

Kawasan industri atau zona *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur terdapat beberapa kontur tanah yang berbeda. Tidak semua kawasan merupakan lahan yang mudah ditanami tanaman penghijauan. Pada lahan zona *barrier* terdapat juga lahan yang di kelilingi dengan rawa. Sehingga dalam proses pelaksanaan program penghijauan diperlukan pemilihan tanaman penghijauan yang tepat untuk setiap lahan didalam zona *barrier*.

c) Pemilihan jenis tanaman penghijauan

Dalam tahap ini tidak terlalu sulit bagi PT. Pupuk Kalimantan Timur untuk melakukan pemilihan atau penyeleksian jenis tanaman penghijauan bagi program penghijauan kawasan *barrier* perusahaan. Perusahaan sendiri pada dasarnya telah memiliki laboratorium khusus dalam pengembangbiakan dan budi daya tanaman langka dan tanaman khas Kalimantan. Selain itu perusahaan sebelumnya juga telah melakukan kegiatan pembibitan dan penanaman pada program penghijauan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wanatirta dan Wanalestari yang berada di lokasi berbeda . Dalam data yang telah disusun sebagai laporan tahunan tanaman langka dan tanaman khas Kalimantan yang telah dibudidayakan oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 10: Daftar Tanaman Langka dan Khas Kalimantan Milik Perusahaan (Sustainability Report PT. Pupuk Kalimantan Timur, 2014)

NO	NAMA LATIN	IUCN & CITES	SK MENHUT '90	PP 7 '99	ENDEMIK
1	<i>Mangifera casturi</i> Kosterm.	EW			
2	<i>Dipterocarpus chartaceus</i> Symington	CR			
3	<i>Dipterocarpus kerrii</i> King	CR			
4	<i>Dipterocarpus baudii</i> Korth.	CR			
5	<i>Dipterocarpus hasseltii</i> Blume	CR			
6	<i>Hopea beccariana</i> Burck	CR			
7	<i>Hopea bancana</i> (Boerl.) Slooten	CR			
8	<i>Shorea balangeran</i> (Korth.) Burck	CR			
9	<i>Shorea gibbosa</i> Brandis	CR			
10	<i>Shorea hopeifolia</i> (F.Heim) Symington	CR			
11	<i>Shorea johorensis</i> Foxw.	CR			
12	<i>Shorea seminis</i> Slooten	CR	X		
13	<i>Shorea smithiana</i> Symington	CR	X		X
14	<i>Shorea palembanica</i> Miq.	CR		X	
15	<i>Dipterocarpus cornutus</i> Dyer.	CR			
16	<i>Shorea elliptica</i> Burck	CR			
17	<i>Shorea lamellata</i> Foxw.	CR			
18	<i>Agathis borneensis</i> Warb.	EN			
19	<i>Shorea gratissima</i> Ridl.	EN			
20	<i>Swietenia mahagoni</i> (L.) Jacq.	EN/II			
21	<i>Shorea pauciflora</i> King	EN			
22	<i>Vatica pauciflora</i> Blume	EN			
23	<i>Parashorea globosa</i> Symington	EN			
24	<i>Anisoptera costata</i> Korth.	EN			
25	<i>Anisoptera laevis</i> Ridl.	EN			

NO	NAMA LATIN	IUCN & CITES	SK MENHUT '90	PP 7 '99	ENDEMIK
26	<i>Anisoptera marginata</i> Korth.	EN			
27	<i>Dryobalanops beccarii</i> Dyer.	EN			
28	<i>Shorea leprosula</i> Miq.	EN			
29	<i>Eusideroxylon zwageri</i> Teijsm. & Binn.	VU			
30	<i>Cotylelobium lanceolatum</i> Craib	VU			
31	<i>Aquilaria malaccensis</i> Lam.	VU/II			
32	<i>Diospyros celebica</i> Bakh.	VU			
33	<i>Gonystylus bancanus</i> (Miq.) Kurz	VU			
35	<i>Pericopsis mooniana</i> Thwaites	VU			
36	<i>Durio acutifolius</i> (Mast.) Kosterm.	VU			X
37	<i>Durio dulcis</i> Becc.	VU			
38	<i>Durio kutejensis</i> (Hassk.) Becc.	VU			X
39	<i>Mangifera pajang</i> Kosterm.	VU			

Keterangan:

Highlight Ungu:

Jenis Tumbuhan yang ditanam dan telah punah di habitat aslinya (EW)

Highlight Kuning:

Jenis Tumbuhan yang ditanam dan masuk dalam kategori kritis (CR)

Highlight Biru Muda:

Semua Jenis Tumbuhan Alami dan masuk dalam kategori redlist IUCN

Tanpa Highlight (Putih):

Jenis Tumbuhan yang ditanam dan masuk dalam kategori terancam (EN)

Dari jenis-jenis tanaman langka dan khas Kalimantan tersebut kemudian dipilih beberapa jenis tanaman yang sesuai dengan setiap zona kawasan *barrier* yang telah ditentukan. Untuk Zona 1 sendiri dipilih yaitu tanaman bambu kuning (*bambusa vulgaris*) sebagai tanaman utama dan pepohonan hijau (non produktif) sebagai pendukung. Zona 2 adalah zona yang memiliki fokus penghijauan menggunakan tanaman pohon besar seperti pohon ulin (*eusideroxylon zwageri*) khas Kalimantan, pohon

trembesi (*samanean saman*), dan kayu-kayu yang memiliki diameter besar lainnya. Dan zona 3 sebagai zona yang langsung bersinggungan dengan masyarakat ditanami dengan beberapa tanaman dan pohon-pohon produktif seperti pohon durian (*durio kutejenciss*) khas Kalimantan, pohon mangga hingga Kayu Wangi. Penjelasan ini sesuai dengan keterangan Bapak Khusnul Abidini staf Departemen Humas yang juga menjadi anggota Komite CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur, yaitu:

“...terkait dengan program penghijauan kawasan *barrier* ini pada tahun 2014 merupakan tahap pertama pelaksanaan program yang dilakukan di area zona 3 yang berbatasan langsung dengan masyarakat. Disana kita menanam zona 3 dengan penanaman pohon-pohon produktif seperti kayu wangi, pohon durian, pohon mahoni, dan pohon trembesi.” (Wawancara pada hari Kamis, 4 Februari 2016 pukul 14.30 WITA di Kantor Departemen Hubungan Masyarakat)

Dari seluruh jenis tanaman yang ada tersebut semuanya adalah tanaman milik PT. Pupuk Kalimantan Timur sendiri yang kemudian diberikan kepada masyarakat untuk dibudidayakan untuk program penghijauan maupun untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan *barrier* melalui proses pembibitan mandiri masyarakat. Berikut keterangan dari Ibu Esty staf Departemen Lingkungan Hidup:

“...dari seluruh tanaman yang ditanam pada kawasan *barrier* merupakan tanaman milik perusahaan. Mulai dari zona 1 hingga zona 3 merupakan tanaman yang pada awalnya telah dibibit dan dibudidayakan di area wanatirta. Jadi dalam perencanaan dan praktiknya, kebutuhan tentang jenis tanaman apa saja yang akan kita tanam untuk program penghijauan di kawasan *barrier* ini sudah kita persiapkan. Setelah program ini berjalan pada tahap ke-1, ke-2, dan seterusnya masyarakat sendiri yang kita bina untuk dapat melakukan kegiatan budidaya dan pembibitan secara mandiri. Dengan begitu masyarakat nanti dapat menggunakan bibit tanaman tersebut sebagai

penghijauan dikawasan dekat rumah mereka dan tentunya juga kawasan *barrier* perusahaan, selain itu masyarakat dapat melakukan budidaya dengan skala besar yang kemudian nanti hasil tersebut dapat mereka jual baik ke perusahaan maupun pihak lain.” (Wawancara pada hari Selasa, 2 Februari 2016 pukul 08.10 WITA di Kantor Departemen Lingkungan Hidup)

Pemilihan jenis tanaman penghijauan yang dilakukan di dalam pogram penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur telah direncanakan berkaitan dengan kebutuhan dilapangan. Seperti pemilihan tanaman bambu kuning yang ditanam pada zona 1 adalah memiliki fungsi sebagai peredam bungi bising dari mesin dan generator produksi pabrik milik perusahaan. Kemudian pemilihan pohon produktif seperti akar wangi akan dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber pendapatan ekonomi tambahan. Selain itu dalam pemilihan tanaman penghijauan tentunya perusahaan telah memilih tanaman dengan tanaman yang sesuai dengan medan atau kawasan penanaman.

d) Penanaman dan perawatan pohon.

Untuk tahap penanaman dan perawatan pohon PT. Pupuk Kalimantan Timur langsung melibatkan masyarakat secara langsung dalam Implementor lapangannya. Implementor lapangan ini bertugas melakukan kegiatan penanaman, perawatan, hingga pembibitan dan mereka berada dalam naungan atau pengawasan LPM Guntung dan mereka juga merupakan masyarakat yang termasuk di dalam rumah tangga miskin (RTM) Guntung. Berikut keterangan dari ketua LPM Guntung Bapak Rahmat Haryono:

“...proses penanaman ini kami melibatkan 2 hingga 3 kepala keluarga RTM. Mereka masing-masing memiliki tugasnya masing-masing. Bapak yang satu adalah bertugas untuk melakukan penanaman dan pemupukan, bapak yang kedua melakukan pembibitan, dan bapak yang terakhir adalah melakukan perawatan lahan seperti pembersihan rumput liar dan gulma-gulma. Sedangkan

saya sendiri sebagai pengawas sekaligus menjadi evaluator dari kegiatan yang mereka lakukan” (Wawancara pada hari Rabu, 3 Februari 2016 pukul 16.32 WITA bertempat di area zona 3 kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur)

Penanaman dan perawatan pohon ini sesuai dengan laporan yang diterima oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur dari LPM Guntung telah menanam sebanyak 500 pohon terdiri dari pohon mahoni dan pohon trembesi. Dan kegiatan selanjutnya setelah paska tanam adalah kegiatan perawatan berupa pemupukan tanaman dengan pupuk kompos, pengemburan tanah, dan pembersihan lahan dari rumput-rumput liar dan gulma. Selain itu juga dilakukan penyiraman tanaman dan penyulaman tanaman yang mati. Keseluruhan kegiatan penanaman dan pembibitan tersebut dilakukan evaluasi oleh LPM Guntung dalam waktu 3 bulan sekali (Laporan Penghijauan PT. Pupuk Kalimantan Timur, 2015).

e) Pembibitan pohon.

Fokus program penghijauan kawasan *barrier* tidak hanya pada kegiatan penanaman dan perawatan saja. Fokus program ini juga pada kegiatan pembibitan yang di monitoring oleh pihak perusahaan dan dilaksanakan oleh masyarakat di bawah bimbingan LPM Guntung. Tahap pembibitan ini merupakan tahap pengembangan dari program penghijauan kawasan *barrier* perusahaan dan memiliki sistem yang keberlanjutan. Dengan adanya tahap pembibitan diharapkan akan lebih menekan *cost* belanja tanaman penghijauan dan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat yang baik secara perekonomian berbasis lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan

ini sesuai dengan keterangan Bapak Khusnul sebagai anggota komite CSR sekaligus staf Eksternal Departemen Hubungan Masyarakat yaitu:

“Program CSR yang dilakukan oleh PT. Pupuk Kaltim selalu mengedepankan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat akan dapat menjadi mandiri secara ekonomi maupun sosial. Selain itu hal tersebut juga akan membantu perusahaan dalam menekan *cost* operasional dan pengawasan program. Salah satu bentuk keberlanjutan tersebut adalah kegiatan pembibitan di dalam program penghijauan kawasan *barrier* ini.” (Wawancara pada hari Kamis, 4 Februari 2016 pukul 13.30 WITA di Kantor Departemen Hubungan Masyarakat)

Keterangan tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Esty selaku penanggung jawab program yang juga staf Departemen Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“Dalam program ini tidak hanya berfokus pada kegiatan penanaman saja, melainkan juga fokus kepada pembibitan dan yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah mereka semua (RTM). Sehingga mereka melakukan pembibitan yang kemudian bibit tersebut dijual ke penanam. Dan perusahaan adalah salah satu pembelinya karena perusahaan membutuhkan bibit tersebut untuk menghijaukan lingkungannya. Jadi program tersebut dapat memberi nilai ekonomis yang lebih bagi mereka”. (Wawancara pada Selasa, 2 Februari 2016 pukul 08.10 WITA bertempat di ruang Departemen Lingkungan Hidup PT. Pupuk Kalimantan Timur)

Sesuai dengan tujuan program ini, kegiatan pembibitan telah dilakukan selama satu tahun penuh. Kegiatan pembibitan ini dilakukan pada tiga jenis tanaman, yaitu tanaman bambu kuning, pohon trembesi, dan pohon mahoni.

Dalam laporan program penghijauan PT. Pupuk Kalimantan Timur tahun 2015 yang di buat oleh LPM Guntung juga menjelaskan tentang rencana pembibitan di tahap selanjutnya dengan tanaman pohon buah-buahan sebagai

kesepakatan dalam rancangan program sebelumnya. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Rahmat selaku Ketua LPM Guntung sebagai berikut:

“Pada tahap awal ini kami telah melakukan pembibitan kurang lebih 600 pohon yang terdiri dari pohon bamboo kuning, pohon trembesi, dan pohon mahoni. Namun kedepan kami akan melakukan penanaman serta pembibitan tanaman-tanaman produktif seperti tanaman buah-buahan maupun pohon kayu wangi yang merupakan tanaman khas Kalimantan. Hal ini menyikapi dengan fokus dan kesepakatan dalam proses perencanaan program penghijauan ini sebelumnya. Pada rencana awal untuk kawasan *barrier* zona 3 ini nanti akan ditanami pohon-pohon atau tanaman-tanaman produktif yang memiliki nilai ekonomis sebagai langkah yang berkelanjutan agar dapat di manfaatkan oleh masyarakat guntung sebagai mata pencaharian mereka” (Wawancara pada hari Rabu, 3 Februari 2016 pukul 16.32 WITA bertempat di area zona 3 kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur)

Jadi, di dalam tahapan pembibitan ini merupakan tahapan yang memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur. Selain untuk menekan biaya pembelian bibit dari pihak ketiga, kegiatan pembibitan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana pengembangan kegiatan perekonomian mereka. Hasil dari pembibitan selain dilakukan untuk penanaman pada program ini juga dapat di jual kepada pihak di luar perusahaan apabila pembibitan berjalan dengan baik dan menghasilkan banyak bibit-bibit tanaman. Jadi dalam sistem pemberdayaan masyarakat dan program yang berkelanjutan ini benar-benar mampu membuat masyarakat atau pelaksana lapangan program menjadi berdaya dan mandiri secara ekonomi dan mampu keluar dari zona kemiskinan. Selain itu semakin banyak bibit yang dihasilkan maka akan semakin banyak calon-calon tanaman baru yang akan menghijaukan lingkungan baik di kawasan perusahaan dan di kawasan masyarakat sendiri.

3) Tahap Monitoring dan Evaluasi

Di dalam sebuah program yang sedang atau telah dilaksanakan dengan baik pasti tidak dapat dilepaskan dari kegiatan monitoring maupun pengawasan serta evaluasi. PT. Pupuk Kalimantan Timur sendiri dalam tahap ini berpedoman pada Kebijakan Tata Kelola Pemberdayaan Masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur yang telah memberikan arahan terhadap segala program yang memiliki kegiatan pemberdayaan diwajibkan untuk melaksanakan tahap monitoring dan evaluasi. Keterangan yang dijelaskan di dalam kebijakan tersebut mengenai tahap monitoring dan evaluasi tersebut yaitu:

Monitoring atau pengecekan dilakukan secara bertahap untuk program Community Empowerment, sedangkan program Community Service dan Government Relations cukup saat pemberian bantuan. Instrument yang digunakan Community Empowerment monitoring dapat dilakukan pada saat pemberian bantuan berjalan atau pada periodic 1 bulanan dan 2 bulanan. Untuk melakukan hal tersebut sejumlah instrument dibutuhkan diantaranya media control: rapat internal (perusahaan dan kelompok), rapat antara sasaran program dengan perusahaan maupun dengan stakeholder lainnya yang sudah ditentukan dalam rencana kerja; instrument Laporan Kegiatan Program Corporate Social Responsibility (LKPC) tahap pengecekan. Instrument tersebut menjadi dokumen Monitoring.

Kemudian dalam tahap evaluasi perusahaan menggunakan dua metode yaitu metode tindak lanjut hasil monitoring (*action*) dan melakukan penelitian akhir tahun Program. Hal tersebut dituliskan secara terperinci di dalam Kebijakan Tata Kelola Pemberdayaan Masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur yang menjelaskan sebagai berikut:

Tindak Lanjut Hasil Monitoring / Action

Hasil Monitoring akan dievaluasi dengan melibatkan banyak pihak, yaitu: sasaran program, LSM yang terkait, Dinas Pemerintahan terkait, Sasaran Program dan Fasilitator Program. Jika ada indikasi terjadi penyimpangan maka secepatnya ditelusuri penyebab terjadinya penyimpangan tersebut dan mengambil keputusan agar aktivitas kembali mengarah pencapaian

target. Dalam hal ini, kemungkinan kekeliruan yang sering terjadi dan berdampak pada gagalnya pencapaian target adalah:

1. Sasaran tidak memiliki ketua kelompok yang handal (motivasi yang tinggi, aktivitas yang cekatan, kepemimpinan yang memadai),
2. Society baik jaringan, kepercayaan diantara sasaran maupun norma-norma kerjasama cukup rendah sehingga pada saat kegiatan berjalan sering timbul konflik internal,
3. Anggota kelompok tidak memiliki keterampilan yang memadai, sehingga laporan kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik. Pada kondisi ini fasilitator memiliki peranan yang tinggi untuk mengarahkan sasaran.
4. Gangguan dari luar kelompok (lingkungan alam dan individu atau komunitas).

Dokumentasi kegiatan ini berupa

- Laporan kegiatan Program Corporate Social Responsibility (LKPC) tahap perencanaan dan pelaksanaan.
- Foto atau film pelaksanaan kegiatan.
- Record data.

Melakukan Penelitian Akhir Tahun Program

Penelitian ini merupakan evaluasi akhir tahun terkait keberhasilan program.

Ada beberapa penelitian yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang berbeda dengan penelitian tingkat kepuasan. IKM memiliki 7-8 dimensi kepuasan yang dihitung dengan membandingkan antara tingkat kepentingan/kebutuhan setiap dimensi dengan tingkat kepuasan setiap dimensi kepuasan. Jika hasil perbandingan mendekati 1 maka IKM tinggi, namun jika hasil perbandingan menjauhi 1 maka IKM rendah (di bawah 1 = menurut sasaran dimensi kepuasan memiliki tingkat kepentingan yang sangat rendah namun tingkat kepuasan sasaran cukup tinggi – 7 kinerja perusahaan tidak efisien / berlebihan, di atas 1 = menurut sasaran dimensi kepuasan memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi namun tingkat kepuasan sasaran cukup rendah – 7 kinerja perusahaan rendah)
2. Tingkat partisipas dan Institusional Masyarakat (Kelembagaan Ekonomi/Koperasi, Kelembagaan Sosial Lainnya). Dilakuka untuk setiap program dan waktu pelaksanaannya sesuai perencanaan dalam rencana kerja.
3. Valuasi Ekonomi. Menghitung dampak yang diakibatkan oleh proses pembangunan infrastruktur seperti jalan umum, system control udara dll. Hasil hitungan dikonversi dalam bentuk rupiah. Dapat dilakuka untuk setiap program pembangunan infrastruktur dan waktu pelaksanaannya setelah 2 atau 3 tahun pelaksanaan program. Valuasi ekonomi akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun.

Sebagaimana isi dari kebijakan tersebut di dalam implementasi program penghijauan kawasan *barrier* ini telah di buat laporan kegiatan program berdasarkan hasil monitoring. Pada tahap monitoring dilakukan oleh perusahaan dan LPM Guntung, perusahaan disini hanya melakukan kegiatan monitoring dalam waktu yang tidak dapat ditentukan karena perusahaan lebih kepada kegiatan sidak atau peninjauan dadakan dengan tujuan melihat kesiapan implementor program di lapangan. Kemudian LPM Guntung sendiri memiliki tugas sebagai pembuat laporan kegiatan di akhir tahap pelaksanaan berdasarkan hasil monitoring selama ini. Dalam laporan tersebut berisikan tentang data-data pelaksanaan kemudian data tentang jumlah tanaman yang telah di tanam dan jumlah tanaman yang rusak atau mati. Laporan tersebut juga dijadikan rujukan untuk perbaikan program di tahap selanjutnya.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Program CSR Penghijauan Kawasan *Barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur.

a. Faktor Pendukung

Di dalam implementasi program CSR penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur tidak dapat terlepas dari beberapa faktor pendukung baik secara internal maupun eksternal yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, maupun struktur birokrasinya. Berikut adalah beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi progroa penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur yang meliputi:

1) Komunikasi.

Faktor komunikasi sangat berpengaruh di dalam implementasi sebuah program dikarenakan hal tersebut sangat dibutuhkan dalam koordinasi antara *stakeholder*. Hubungan implementor terhadap apa yang harus dilakukan, apa tujuan dilakukannya program, hingga target dari program tersebut sangat tergantung dalam komunikasi yang di bangun oleh tiap-tiap *stakeholder* yang ada. Komunikasi menjadi faktor yang paling mendukung di dalam program ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Rahmat selaku Ketua LPM Guntung yaitu:

“komunikasi yang di bangun oleh PT. Pupuk Kaltim di dalam program ini itu sudah sangat baik jika kita bandingkan dengan beberapa tahun belakangan. Untuk saat ini setiap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kita selalu bisa duduk dan mengopi bersama untuk saling sharing apa yang terjadi di dalam program ini, apa yang kurang dari program ini, apa hambatan dalam pelaksanaan program ini. Nah hal ini yang di tahun sebelum-sebelumnya kita belum merasakan.” (Wawancara pada hari Jum’at, 5 Februari 20.00 WITA)

Senada dengan keterangan tersebut, Lurah Guntung yaitu Bapak Baslan juga menyatakan hal yang sama terhadap pola komunikasi yang terjadi dari pihak perusahaan terhadap implementor di lapangan. Berikut keterangan tersebut:

“sejak tahun 2012 saya memimpin Guntung komunikasi dengan perusahaan Pupuk Kaltim ini semakin berubah, berubahnya ini bukan berubah kepada arah yang negatif melainkan berubah kepada arah yang lebih positif. Artinya adalah pada awal saya memimpin Guntung hubungan antara perusahaan dengan masyarakat ini memiliki jarak yang sangat jauh dimana dalam setiap program yang mereka keluarkan selalu berbentuk sumbangan atau sejenisnya. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak mau turun langsung ke pemukiman untuk mengetahui bagaimana sih kondisi sebenarnya di masyarakat. Jadi, terkadang hal seperti itu kurang tepat dengan kebutuhan masyarakat. Namun setelah tahun 2012 dengan bergantinya beberapa pimpinan internal perusahaan mulai ada

perubahan. Perubahan tersebut adalah dimana para GM (General Manager) perusahaan mau datang langsung kesini untuk berdiskusi tentang kondisi masyarakat disini, bahkan sejak setahun belakangan ini direksi utama mau datang dan melihat langsung bagaimana keadaan masyarakat guntung. Hal ini merupakan perubahan yang sangat positif dan sangat mendukung terhadap jalannya setiap program dari perusahaan” (Wawancara pada hari Jum’at, 5 Februari 2016 pukul 08.49 WITA di kantor Kelurahan Guntung)

Pernyataan-pernyataan tersebut cukup menggambarkan jika dari pola komunikasi yang di bangun telah cukup mendukung berjalannya proses implementasi program ini. Komunikasi yang baik sangat berperan terhadap proses perencanaan dan koordinasi antara perusahaan, pemerintah setempat, dengan masyarakat. Selain dalam aspek perencanaan dan koordinasi, komunikasi juga mendukung implementasi program ini melalui cara perusahaan dalam memberikan bimbingan, arahan, hingga pelatihan kepada para stiap implementor agar mereka dapat memahami apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari program penghijauan kawasan *barrier* ini. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Esty selaku penanggung jawab program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur dari Departemen Lingkungan Hidup:

“untuk mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman maupun masalah di kemudian hari antara pihak perusahaan dengan pihak pelaksana dilapangan, pelaksana lapangan disini adalah masyarakat RTM dari Kelurahan Guntung yang menjadi binaan dari LPM Guntung langsung. Kami selalu menjalankan komunikasi yang intens terhadap mereka. Selain itu sebelum berjalannya program ini, masyarakat yang menjadi pelaksana lapangan tadi kita beri pembekalan dan pelatihan agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan nanti. Selain itu tujuan dari kita beri mereka pelatihan adalah agar mereka lebih paham mengenai apa saja tujuan dan sasaran yang sebenarnya dari program penghijauan ini.” (Wawancara pada hari Selasa, 2 Februari 2016 pukul 08.10 WITA di kantor Departemen Lingkungan Hidup)

Jadi komunikasi merupakan salah satu faktor pendukung bagi perusahaan dalam melaksanakan program-program CSRnya baik dalam bidang lingkungan, sosial, kemitraan, maupun yang lainnya. Secara khusus di dalam program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan ini komunikasi sangat berpengaruh bagi pencapaian tujuan dan sasaran program baik dalam waktu dekat dalam konteks pemberdayaan masyarakatnya maupun waktu jangka panjang dalam menanggulangi dampak produksi perusahaan seperti bunyi bising dan bau amoniak.

2) Sumber daya

Untuk mendukung implementasi program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur lebih efektif, perusahaan dalam praktiknya berusaha untuk selalu mengoptimalkan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansialnya. Dalam praktiknya untuk mendukung implementasi programnya yang pertama, perusahaan mencoba mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dari pihak internal maupun eksternal perusahaan. Pihak internal perusahaan yang dimaksud disini adalah staf dan karyawan perusahaan yang masuk dalam jajaran komite CSR maupun karyawan dari beberapa departemen terkait dengan program penghijauan kawasan *barrier*. Kemudian yang dimaksud pihak eksternal perusahaan yang dimaksud adalah pemerintah setempat, kelompok atau organisasi masyarakat, maupun masyarakat yang langsung terlibat di dalam program. Jika di lihat dari sisi sumber daya internal perusahaan baik dari sumber daya manusia dan sumber daya finansial cukup dapat menjadikan hal tersebut menjadi faktor

pendukung perusahaan. Sumber daya manusia secara internal perusahaan terdapat para staf yang sudah memiliki pengalaman dan masuk di dalam bidangnya. Dari segi perencanaan dan pengawasan program, perusahaan langsung melibatkan Departemen Lingkungan Hidup didalamnya, setelah itu dari segi koordinasi antara perusahaan dengan para *stakeholder* perusahaan melibatkan secara langsung departemen Hubungan Masyarakat baik dari bagian eksternal maupun bagian internalnya. Dan faktor pendukung terakhir yaitu sumber daya keuangan, dijelaskan di dalam rencana kerja program penghijauan kawasan *barrier*, perusahaan di dalam program penghijauan kawasan *barrier* ini mengalokasikan dana sebesar 75 juta pada setiap tahapnya. Untuk setiap tahap yang dilaksanakan berdurasi antara enam bulan hingga satu tahun.

3) Disposisi

Pada pelaksanaan implementasi program tidak dapat dilepaskan dari peran para implementor dilapangan. Dan tiap-tiap implementor memiliki sikap dan disposisi yang berbeda pada setiap individunya. Efektif tidaknya proses implementasi sedikit banyak disposisi dari setiap implementor akan memiliki pengaruh. Untuk mengantisipasi terjadinya disposisi yang kurang baik atau tidak adanya visi atau misi yang sama antara implementor dengan perusahaan, maka perusahaan mengadakan pelatihan bagi setiap implementor di lapangan untuk dapat lebih memahami apa yang harus dilakukan di dalam program, kemudia memahami apa maksud dan tujuan program serta apa sasaran dari program penghijauan kawasan *barrier*. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ibu Esty

sebagai penanggung jawab program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur dari Departemen Lingkungan Hidup:

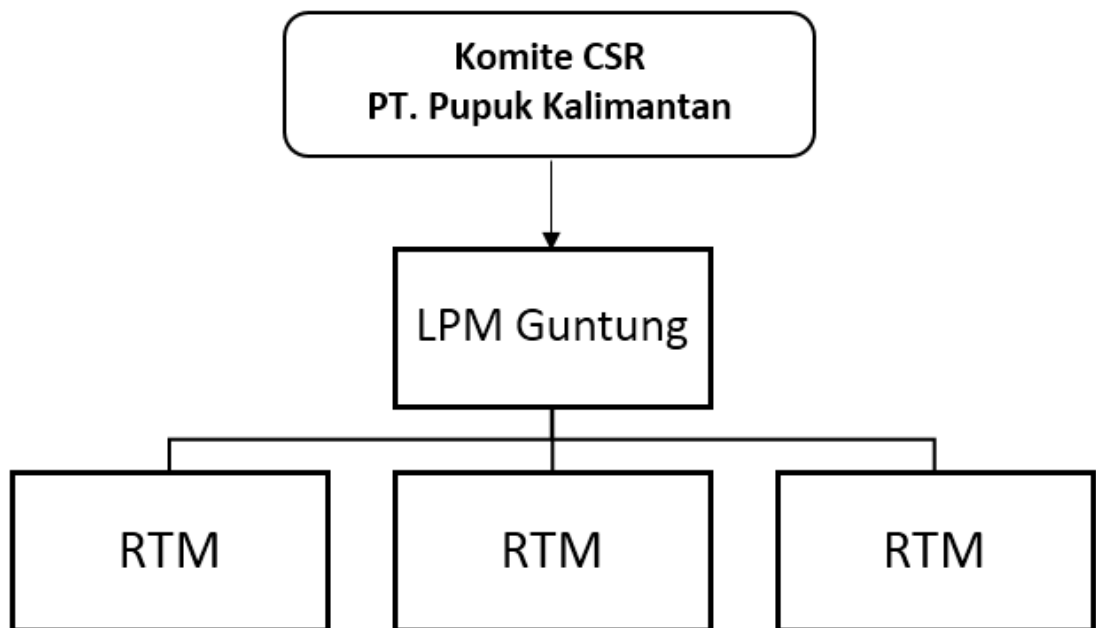
“...untuk mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman maupun masalah di kemudian hari antara pihak perusahaan dengan pihak pelaksana dilapangan. Pelaksana lapangan yang telah ditunjuk LPM tadi kita beri pembekalan dan pelatihan agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan nanti. Selain itu tujuan dari kita beri mereka pelatihan adalah agar mereka lebih paham mengenai apa saja tujuan dan sasaran yang sebenarnya dari program penghijauan ini.”
(Wawancara pada hari Selasa, 2 Februari 2016 pukul 08.10 WITA di kantor Departemen Lingkungan Hidup)

Dengan melakukan pembekalan dan pelatihan bagi implementor tersebut perusahaan berharap setiap implementor memiliki disposisi yang sesuai dengan tujuan dan maksud program penghijauan kawasan *barrier* ini dibuat agar dapat mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi disini merupakan salah satu faktor pendukung juga dalam program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur karena aspek struktur begitu penting dalam pengorganisasian. Struktur birokrasi di dalam pelaksanaan program penghijauan kawasan *barrier* ini, perusahaan tidak langsung melaksanakan keseluruhan kegiatan dilapangan secara mandiri. Dari sisi internal perusahaan, organisasi yang menangani seluruh program CSR perusahaan berada di dalam satu wadah yaitu Komite CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dengan dasar SK Direksi Nomor : 30/DIR/VII.2014 tentang Komite Corporate Social Responsibility PT. Pupuk Kalimantan Timur. Namun dalam pelaksanaan program CSR penghijauan kawasan *barrier* untuk mengantisipasi pencemaran proses produksi perusahaan, di bawah perusahaan

ada lembaga atau organisasi lain yaitu organisasi bentukan dari pihak kelurahan yang disebut sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Pembina kelompok implementor di dalam program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur. Secara garis besar dan umum struktur organisasi yang menjalankan program ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 13. Struktur Organisasi Program Penghijauan Kawasan Barrier PT. Pupuk Kalimantan Timur

Sumber : Data Olahan Peneliti 2016

Dengan adanya peran LPM Guntung tersebut membuat perusahaan lebih mudah berkoordinasi dengan para implementor di lapangan. Selain itu perusahaan sebagai penyedia sumber finansial program tidak perlu mengeluarkan biaya terlalu besar sehingga dapat menyalurkan anggaran yang lain kepada program CSR yang lain.

b. Faktor Penghambat

Implementasi program CSR penghijauan kawasan PT. Pupuk Kalimantan Timur tidak seluruh pelaksanaannya dapat berjalan mulus dan lancar. Ada beberapa hal atau faktor yang sedikit menghambat jalannya implementasi program ini baik secara internal maupun eksternal. Hambatan tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain:

1) Komunikasi

Hambatan dari faktor komunikasi muncul akibat adanya beberapa kesalahan pemahaman antara pihak implementor lapangan dengan pihak perusahaan. Hal ini disampaikan oleh ketua LPM Guntung Bapak Rahmat Haryono yang juga menjadi pembina RTM Guntung dalam program penghijauan kawasan *barrier* yang mengatakan bahwa:

“...hambatan yang terkadang menghambat proses perawatan dan pembibitan di dalam program ini adalah masalah komunikasi yang terkadang tersendat ketika kami membutuhkan bantuan pupuk atau bahan baku lain yang berkaitan dengan kegiatan penanaman maupun perawatan tanaman yang ada. Seperti contoh jika ada tanaman yang layu yang kemudian perlu dilakukan kegiatan pemupukan dan lain sebagainya kami jadi harus menundanya karena pasokan pupuk yang kami minta tidak dapat segera diberikan oleh pihak perusahaan” (Wawancara pada hari Rabu, 3 Februari 2016 pukul 16.32 WITA bertempat di area zona 3 kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur)

Namun dari keterangan tersebut dapat diklarifikasi oleh pihak perusahaan yang disampaikan oleh Ibu Sri Djuwani Ekowati selaku manajer Departemen Lingkungan Hidup, yaitu:

“dalam kasus keterlambatan pemberian pupuk itu mungkin hanya kesalahan pemahaman antara LPM terhadap kami. Bukan kami tidak cekatan atau tidak tanggap. Namun kami di dalam perusahaan memiliki prosedur dalam menindaklanjuti laporan dari hasil

monitoring tersebut. Kami tidak bisa begitu saja secara tiba-tiba memberikan bantuan pupuk atau lain sebagainya karena dalam kasus tanaman yang layu atau tanaman yang mati tersebut kami masih melakukan pengkajian dan analisis lebih lanjut tentang apa penyebab dan bagaimana cara mengatasinya, jadi tidak serta merta kami dimintain bantuan pupuk langsung kami berikan, namun kami melakukan analisis terlebih dahulu dengan tenaga ahli yang kami miliki. Dan hal yang seperti itu terkadang memang membutuhkan waktu, jadi sering dikiranya kami kurang tanggap. Hanya *miss* komunikasi saja kalau hal seperti itu. Tapi endingnya kami juga tetap memberikan bantuan bahan baku untuk perawatan, bahkan kami juga beri tambahan bibit tanaman untuk dilakukan pembibitan lebih lanjut ditingkat pelaksana” (Wawancara pada hari Kamis, 4 Februari 2016 pukul 16.44 WITA di Kantor Departemen Lingkungan Hidup)

Faktor penghambat dalam komunikasi seperti kasus kesalahpahaman antara implemmentor dengan perusahaan selaku perancang program merupakan salah satu bentuk hambatan yang tidak perlu terjadi apabila ada komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dan dapat disampaikan secara rutin dan jelas terhadap maksud dan proses pengajuan bantuan dari pihak implementor kepada perusahaan agar tidak muncul kesalahpahaman yang berlanjut kepada terhambatnya proses implementasi program penghijauan kawasan *barrier* ini.

2) Sumber Daya

Faktor penghambat selanjutnya berkaitan dengan sumber daya manusia yang terlibat di dalam program. Di dalam program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur, perusahaan membuat sebuah komite untuk menangani seluruh kegiatan CSR-nya yang kemudian di beri nama Komite CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur. Pembentukan komite CSR ini berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 30/DIR/VII.2014 tentang Komite Corporate Social Responsibility PT. Pupuk Kalimantan Timur dan pada struktur komite CSR

tersebut berisikan karyawan-karyawan dari departemen yang berbeda. Sehingga dalam implementasi program penghijauan kawasan *barrier* ini berjalan kurang optimal dikarenakan pada setiap sumber daya manusia yang terlibat dalam internal perusahaan memiliki peran dan jabatan yang ganda. Disisi lain para karyawan telah memiliki tugas pokok sebagai karyawan operator pengelola perusahaan dari setiap departemennya masih harus melaksanakan kegiatan lain di luar tugas pokok mereka. Rangkap jabatan pada karyawan perusahaan yang terlibat di dalam pelaksanaan program tersebut yang kemudian menjadi salah satu penyebab sedikit terhambatnya proses implementasi program ini.

3) Disposisi

Pada faktor penghambat selanjutnya adalah disposisi yang ada di dalam implementasi program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur. Penghambat di dalam implementasi program ini berdasarkan temuan dilapang bukan berasal dari implementor di lapangan baik dari internal perusahaan maupun pihak LPM Guntung dan binaannya, melainkan disposisi dari beberapa masyarakat yang tinggal di dekat kawasan *barrier* perusahaan yang masih belum memiliki kesadaran tentang kondisi yang berada disekitar mereka. Disposisi dalam implementasi berjalan dengan baik dan optimal juga tidak bergantung pada disposisi dari implementor saja, namun disposisi dari masyarakat yang belum semuanya memiliki kesadaran akan pentingnya diadakannya program ini juga memiliki pengaruh dalam keberhasilan program. Apabila dilihat dari temuan dilapangan tersebut dengan banyaknya sampah di zona 3 kawasan *barrier* tersebut akan sangat mempengaruhi kualitas tanah yang

berada di kawasan tersebut. Apabila kualitas tanah yang menjadi jelek dan rusak akibat sampah, maka akan sangat susah untuk dilakukan penanaman pohon-pohon atau tanaman-tanaman penghijauan.

4) Struktur Birokrasi

Faktor penghambat yang terakhir di dalam implementasi program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur yang terakhir adalah tidak adanya SOP (*Standard Operating Procedures*) yang jelas di dalam pelaksanaan program terkait struktur birokrasi dan organisasi di dalam kepengurusan program penghijauan kawasan *barrier* ini. Namun hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi implementasi program dari sisi pelaksanaan program dalam beberapa tahap pelaksanaannya, karena di implementor lapangan sebagai pelaksana program sudah mendapatkan pembekalan dan pelatihan program penanaman, perawatan, dan pembibitan tanaman. Keterangan dalam temuan ini disampaikan juga oleh Ibu Esty selaku penanggung jawab program:

“...di dalam implementasi program penghijauan ini kami belum punya SOP kegiatan. Semua pelaksanaan kita koordinasikan melalui lisan saja. Sedangkan untuk pelaksanaan di lapangan kami mengandalkan sepenuhnya kepada masyarakat yang menjadi pelaksana lapangan. Karena sebelum mereka melaksanakan penanaman, perawatan, dan pembibitan telah kita beri pelatihan dan pengarahan tentang teknik yang benar dalam melaksanakan tugasnya nanti” (Wawancara pada hari Selasa, 2 Februari 2016 pukul 09.00 WITA di kantor Departemen Lingkungan Hidup)

Lebih lanjut ketika disinggung mengenai rencana kerja dan rencana strategis program penghijauan kawasan *barrier* untuk mengantisipasi pencemaran produksi perusahaan Ibu Esty memberikan keterangan sebagai berikut:

“untuk renja dan renstra di dalam program CSR ini kita membuatnya secara general kepada seluruh program CSR yang dimiliki

perusahaan. Jika untuk program penghijauan sendiri ini kami belum membuatnya. Mungkin ini menjadi masukan buat kami untuk kedepannya” (Wawancara pada hari Selasa, 2 Februari 2016 pukul 09.00 WITA di kantor Departemen Lingkungan Hidup)

Dengan adanya keterangan tersebut perusahaan sejauh ini lebih mengandalkan disposisi yang baik dari para implementor dilapangan dengan pembinaan dari pihak LPM Guntung. Namun tidak adanya SOP dan rencana kerja yang jelas tersebut sedikit menghambat kinerja perusahaan dalam melakukan pendataan dari keseluruhan kegiatan program penghijauan yang telah dilaksanakan selama lebih dari 2 tahun ini.

C. Analisis Data

1. Implementasi Program CSR Penghijauan Kawasan Barrier PT. Pupuk Kalimantan Timur

Memahami lebih jauh lagi tentang implementasi program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam proses penghijauan kawasan *barrier* industri untuk mengantisipasi pencemaran dari kegiatan produksi perusahaan perlu mencermati makna dari implementasi itu sendiri. Implementasi menurut Syaukani (2004:295) adalah rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Di dalam praktinya PT. Pupuk Kalimantan Timur memahami bahwa dengan adanya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diperkuat lagi melalui PP nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, merupakan sebuah kebijakan negara

yang harus ditaati dan ditindaklanjuti lagi dengan membuat berbagai macam aktivitas-aktivitas yang dapat dirasakan oleh masyarakat seperti yang diharapkan.

Munculnya berbagai macam isu dan temuan yang berkaitan dengan pencemaran kegiatan produksi perusahaan seperti bunyi bising dan bau amoniak, berdasarkan peraturan atau perundang-undangan yang ada perusahaan membuat aktivitas-aktivitas dalam bentuk program CSR yang memiliki dampak terhadap masyarakat sekitar maupun pada lingkungannya. Sesuai dengan hal tersebut, apabila dilihat dari kaca mata administrasi publik kegiatan dari program CSR yang dilakukan oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam pelaksanaannya sama dengan pendapat Jones dan Rohman (2009:101-102) menyebutkan bahwa program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan sebagai upaya yang berwenang dalam mencapai tujuannya. Kemudian untuk CSR dari perusahaan sendiri menurut Johnson dan Johnson, yang menyatakan bahwa CSR pada dasarnya berangkat dari filosofi cara mengelola perusahaan baik sebagian maupun keseluruhan yang memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungannya. Jadi perusahaan harus mampu mengelola operasi bisnisnya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan (Hadi, 2011:46).

Memahami makna tersebut lebih dalam, maka program CSR yang dirancang dan dibuat oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur merupakan komponen dari bentuk tanggung jawab sosial terhadap kondisi sosial dan lingkungannya sebagai interperstasi dari ketaatan perusahaan di dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan dan kebijakan yang berlaku. Namun perancangan dan pembuatan

program CSR akan berjalan lebih baik apabila diikuti dengan proses implementasi yang baik pula. Implementasi yang baik dan benar merupakan pelaksanaan yang dilakukan dengan kejujuran, memiliki kompetensi yang sesuai, komitmen yang tinggi untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuannya, dan benar-benar memperhatikan rambu-rambu pemerintah yang berlaku dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan lingkungan, serta mengutamakan sistem pemberdayaan masyarakat disekitarnya Keban (2004:72).

Implementasi program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur program, yaitu program itu sendiri, organisasi pelaksana, dan kelompok pemanfaat (Akib dan Tarigan, 2000:11). Maka dari itu implementasi program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam penghijauan kawasan *barrier* industri untuk mengantisipasi pencemaran dari kegiatan produksi perusahaan memiliki beberapa fokus yang akan dianalisis oleh peneliti yaitu berkaitan dengan fokus implementasi program memiliki keterkaitan terhadap kehidupan masyarakat sekitar dalam beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan, kemudian pola hubungan antara pihak perusahaan dengan *stakeholder* yang ada, serta yang terakhir adalah bentuk dan proses tahapan implementasi program mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan evaluasi.

a. Keterkaitan Program CSR Penghijauan Kawasan *Barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur dengan Kehidupan Masyarakat Guntung.

PT. Pupuk Kalimantan Timur sebelum melaksanakan program CSRnya di dalam perencanaan programnya telah memiliki target tentang siapa saja atau calon pelaksana program. Keseluruhan program perusahaan yang terkait dengan CSR

semuanya telah ditanamkan program pemberdayaan baik bagi karyawan internal maupun masyarakat yang bersinggungan dengan program secara langsung. Seluruh program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur mengutamakan *community development* maupun *sustainable development* yang merupakan komitmen utama perusahaan di dalam melaksanakan program-programnya. Seluruh hal tersebut telah memiliki dasar pelaksanaan program CSR yang tertuang di dalam kebijakan internal perusahaan yaitu Kebijakan CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur. Sehingga dalam pelaksanaan program-program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur semua berorientasikan kepada pemberdayaan masyarakat dan program yang berkelanjutan. Program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur tersebut sesuai dengan pilar aktivitas CSR yang telah di jelaskan di dalam *Prince of Wales International Bussines Forum*. Pilar aktivitas CSR yang dimaksud antara lain adalah *Building Human Capital*, maksud dari pilar tersebut yaitu secara internal, perusahaan dituntut untuk menciptakan SDM yang andal, kemudian secara eksternal, perusahaan dituntut untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Pilar yang kedua adalah *Strengthening Economies* yang berarti perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin. Oleh karena itu, perusahaan harus memberdayakan ekonomi penduduk sekitar. Pilar ketiga, *Assesing Social Chesion* yaitu perusahaan dituntut untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan konflik. Pilar keempat yaitu *Encouraging Good Governance* pilat ini menjelaskan saat menjalankan bisnisnya, Perusahaan harus menjalankan tata kelola bisnis dengan baik. Dan pilar yang terakhir adalah *Protecting The Environment*, perusahaan dituntut untuk berupaya

keras menjaga kelestarian lingkungan yang menjadi tempat perusahaan itu beroperasi atau tempat-tempat yang berpotensi terkena dampak negatif dari proses produksi perusahaan (Wibisono, 2007:119).

Di dalam program CSR penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur dapat dilihat keterkaitan program dengan beberapa aspek yang ada di masyarakat maupun perusahaan sendiri, aspek-aspek tersebut antara lain ialah:

1) Aspek Ekonomi

Keterkaitan program CSR penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan dalam mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan ini memiliki kaitan yang erat terhadap perekonomian masyarakat di sekitar perusahaan dan juga berkaitan dengan tumbuhkembangnya perekonomian internal perusahaan. Pengaruh di dalam aspek ekonomi baik bagi masyarakat maupun perusahaan dapat dilihat dari meningkatnya dan bertambahnya jumlah mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Guntung menggunakan data yang dikeluarkan bappeda Kota Bontang terkait jumlah RTM Kelurahan Guntung di tahun 2014 dan 2015. Karena tujuan dan pondasi program CSR perusahaan dari awal telah ditujukan selain sebagai program yang mampu mengantisipasi pencemaran dari kegiatan produksi perusahaan juga untuk agar dapat memberdayakan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Dengan bertambahnya pendapatan dan mata pencaharian Masyarakat Guntung merupakan salah satu *goal* dari dilaksanakannya program ini. Meningkatnya pendapatan dan bertambahnya mata pencaharian Masyarakat Guntung ini merupakan kesesuaian implementasi program CSR perusahaan dengan

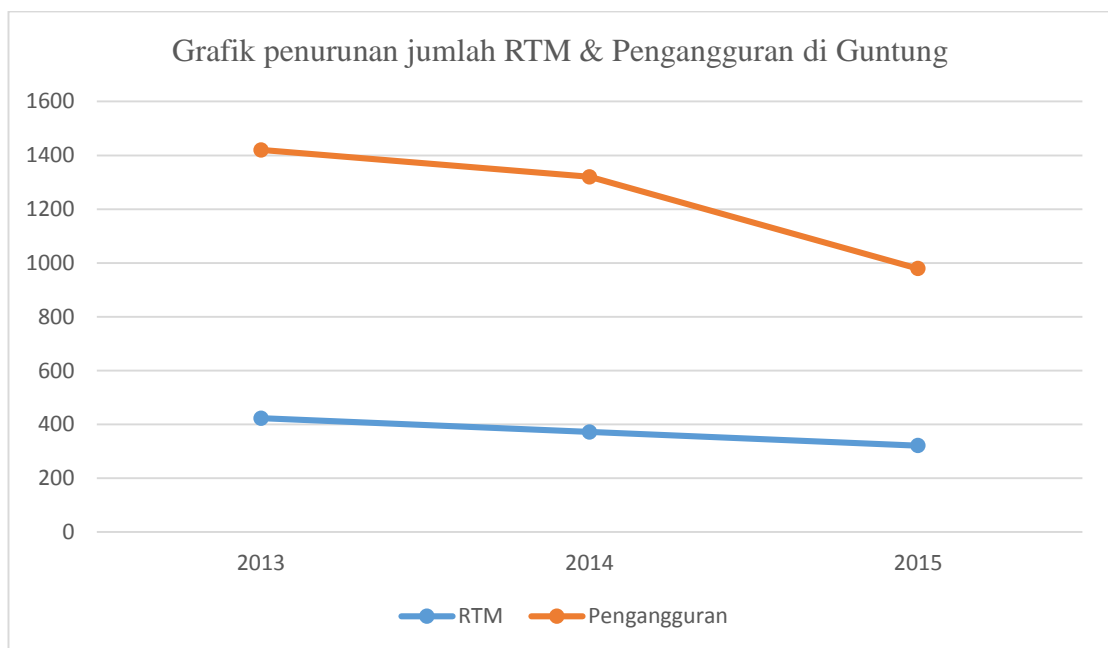
pilar CSR yang dikemukakan di dalam *Prince of Wales International Bussines Forum* yaitu *Building Human Capital* dari sisi eksternal yaitu perusahaan harus melakukan pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya berkaitan dengan pilar CSR *Strengthening Economies* yang berarti perusahaan juga dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin (Wibisono, 2007:119).

Selain itu dari aspek ekonomi internal perusahaan dengan adanya program CSR penghijauan kawasan *barrier* dalam mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan ini mampu menambah aspek dalam penilaian perusahaan terhadap penilaian PROPERNAS. Kini PT. Pupuk Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.557/Menlhk-setjen/2015 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2014-2015 berada di daftar penilaian PROPERNAS dengan peringkat Hijau. Hal tersebut cukup membantu perusahaan dalam menjaga kepercayaan terhadap investor perusahaan sehingga sangat membantu perusahaan dalam menjalankan manajemen bisnisnya dalam lingkup nasional maupun internasional. Apabila perusahaan mampu mendapatkan penilaian PROPERNAS yang terus meningkat maka dengan akan mudah perusahaan mendapatkan investor maupun *customers* baru yang nanti akan meningkatkan daya jual produk perusahaan.

2) Aspek Sosial

Sejalan dengan pilar CSR mengenai *Strengthening Economies* yang dijelaskan dalam *Prince of Wales International Bussines Forum* bahwa perusahaan

dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin (Wibisono, 2007:119). PT. Pupuk Kalimantan Timur telah menunjukkan dari segi hasil secara tidak instan bahwa dengan adanya program CSR yang dilakukan dapat berpengaruh pada turunnya tingkat kemiskinan di Kelurahan Guntung. Dari data yang telah di jabarkan pada penyajian data penelitian dapat dilihat jumlah penurunan RTM setiap tahunnya. Meskipun di dalam program CSR penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan dalam mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan ini baru melibatkan beberapa kepala RTM Guntung, namun hal tersebut sudah cukup membantu mengurangi jumlah RTM yang ada. Berikut grafik penurunan jumlah RTM dan pengangguran mulai dari tahun 2013 hingga 2015:



Gambar 14. Gambar penurunan jumlah RTM dan Pengangguran Kelurahan Guntung

Sumber: Data Olahan Peneliti 2016

Dari grafik tersebut dapat dilihat dari jumlah RTM sebanyak 423RT dan Pengangguran sebanyak 1420 orang berangsur turun dari tahun ke tahun dan dari data terakhir yang diperoleh di tahun 2015 RTM dan pengangguran menjadi 321RT dan 979 orang. Apabila program ini terus dijalankan secara berkelanjutan dengan tetap melihat aspek pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu penunjang keberhasilan program maka akan dapat terus menyerap banyak tenaga kerja di dalam program yang kemudian berimplikasi pada turunnya jumlah pengangguran dan RTM yang ada di Kelurahan Guntung. Hal ini sesuai juga dengan makna pembangunan menurut Soemarwoto (2004:29) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial sehingga masyarakat bergantung padanya.

3) Aspek Politik

Selain karena bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kondisi sosial dan lingkungan sekitar, program-program CSR yang implementasikan perusahaan adalah sebagai wujud ketaatan Perusahaan dengan perundang-undangan dan kebijakan negara yang berlaku maupun peraturan daerah seperti UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang. Di dalam kebijakan tersebut telah dijelaskan bahwa daerah harus memiliki paling tidak 30% wilayahnya untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam masterplan PT. Pupuk Kalimantan Timur nomor: 650/1018/DTRK-B, perusahaan memberikan lebih dari 30% dari seluruh wilayah industrinya untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau atau kawasan *barrier (bufferzone)* sebagai media dalam mengantisipasi pencemaran yang terjadi

dari proses produksi perusahaan. Maka dari itu perusahaan memunculkan program CSR penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur yang juga merupakan wujud dukungan perusahaan kepada kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan Ruang Terbuka hijau yang sesuai dengan Peraturan yang ada. Pelaksanaan program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur ini juga sesuai dengan salah satu prinsip dasar di dalam *Good Corporate Governance* yang disampaikan oleh Pieris dan Wiryawan (2008:141) yang menjelaskan salah satu prinsip yang harus dimiliki perusahaan dalam tata kelola perusahaan yang baik adalah prinsip *Responsibility* atau bentuk tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat disekitarnya.

4) Aspek Lingkungan

Target dan fokus utama dari adanya program CSR penghijauan kawasan *barrier* industri PT. Pupuk Kalimantan Timur ini adalah menjadikan kondisi lingkungan yang berada disekitar perusahaan maupun lingkungan masyarakat yang berada di sekitarnya menjadi sehat dan terhindar dari dampak maupun pencemaran yang terjadi karena proses produksi perusahaan yang muncul dari dalam pabrik PT. Pupuk Kalimantan Timur. Di dalam implementasi program ini yang menjadi penekanan adalah ruang lingkup yang menjadi target dalam menangani dampak pencemaran produksi perusahaan ini tidak hanya di darat melainkan juga lingkungan yang berada di kawasan perairan maupun di udara. Namun dari segi hasil belum dapat dirasakan dalam waktu yang cukup dekat, karena proses penghijauan yang dilakukan masih membutuhkan waktu untuk menjadikan

lingkungan di sekitar masyarakat maupun kawasan *barrier* menjadi hijau dan berfungsi secara optimal dalam mengantisipasi dan mencegah pencemaran dari proses produksi perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Manajer Departemen Lingkungan Hidup yang telah dijelaskan dalam penyajian data dan fokus penelitian. Keterkaitan program CSR perusahaan yang dilaksanakan dengan aspek lingkungan yang dimunculkan ini berkaitan dengan pelaksanaan CSR di Indonesia dalam bidang lingkungan yang didasarkan dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seperti yang tertuang dalam pasal 1 bahwa setiap orang atau korporasi wajib ikut serta menjaga dan tidak melakukan pencemaran maupun pengerusakan lingkungan hidup. Selain itu sebagai komitmen untuk menghijaukan dan menjadikan kawasan industrinya sebagai kawasan yang sehat dan bersih. PT. Pupuk Kalimantan menggunakan program penghijauan kawasan *barrier* ini juga sebagai pendukung mewujudkan ruang terbuka hijau (RTH) sebanyak minimal 30% dari seluruh wilayah industri perusahaan terhadap RTH Kota Bontang dengan dasar Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang.

b. Peran dan Pola Hubungan Stakeholder

Peran dan pola hubungan *stakeholder* menjadi sangat penting dalam berjalannya proses implementasi program karena *stakeholder* adalah semua pihak, internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (Hadi, 2011 : 93). Berdasarkan hal tersebut maka dalam proses implementasi sangat bergantung pada peran dan pola hubungan *stakeholder*. Berhasil tidaknya program tergantung pada

bagaimana peran dan pengaruh yang dimunculkan setiap *stakeholder*. Maka dari itu di dalam implementasi program setiap *stakeholder* juga harus mampu mengolaborasikan tujuan-tujuan mereka menjadi sebuah tujuan bersama dimana tujuan tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masing-masing *stakeholder* baik dalam aspek ekonomi, sosial, politik maupun lingkungan.

Secara teori, *stakeholder* dibagi menjadi tiga kategori (Hadi, 2011:101) yaitu *stakeholder* utama (primer), *stakeholder* pendukung (sekunder), dan *stakeholder* inti. Untuk menganalisis peran dan pola hubungan *stakeholder* di dalam implementasi program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam proses penghijauan kawasan *barrier* industri untuk mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan terdapat beberapa *stakeholder* yang memiliki peran dan pola hubungan yang saling berkaitan, yaitu:

1) PT. Pupuk Kalimantan Timur

Berdasarkan kekuatan, posisi penting dan pengaruh pemangku kepentingan terhadap suatu isu, PT. Pupuk Kalimantan Timur merupakan *stakeholder* utama di dalam program CSR penghijauan kawasan *barrier* industri untuk mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan ini. PT. Pupuk Kalimantan Timur merupakan perancang dan pelaksana utama karena memiliki kepentingan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan sekitarnya agar tetap aman tanpa terpengaruh oleh suatu hal yang mungkin bisa saja terjadi sewaktu-waktu yang muncul dari kegiatan proses produksi perusahaan baik bunyi bising maupun bau amoniak. Peran sebagai *stakeholder* utama ini sesuai dengan Hadi (2011:101) yang

menjelaskan bahwa *stakeholder* utama yang memiliki kaitan penting secara langsung di dalam kebijakan, program, atau sebuah proyek. PT. Pupuk Kalimantan Timur disini menempatkan dirinya sebagai pengambil keputusan utama dan juga bertanggungjawab secara langsung dalam implementasi program, dan juga sebagai sumber daya dana utama dalam perumusan dan implementasi program.

Peran dan pola hubungan PT. Pupuk Kalimantan Timur adalah sebagai perwujudan dari bentuk pelaksanaan prinsip *good corporate governance* (GCG) yaitu *responsibility* atau pertanggungjawaban. Menurut Pieris dan Wiryawan (2008:141) perusahaan memiliki tanggung jawab sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat-masyarakat yang ada disekitarnya. Dengan di terapkan prinsip GCG tersebut, perusahaan mengetahui kebutuhan masyarakat akan kehidupan yang aman dan nyaman dari segala bentuk dampak yang muncul akibat proses produksi industri perusahaan. Maka dari itu perusahaan memunculkan program CSR di dalam proses penghijauan kawasan *barrier* industrinya untuk mengantisipasi pencemaran dari kegiatan produksi perusahaan.

2) Pemerintah Kota Bontang

Peran pemerintah di dalam program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur ini adalah menjadi mediator antara kepentingan perusahaan dan kepentingan masyarakat. Di dalam mediasi yang dilakukan tidak selamanya berjalan lancar antara perusahaan dengan masyarakat. Namun dengan turun tangannya pemerintah secara langsung setidaknya dapat

memberikan jalan keluar demi kepentingan bersama. Hal tersebut merupakan salah satu wujud dari praktik *Good Governance* seperti yang di kemukakan Lembaga Administrasi Negara, wujud *good governance* yaitu penyelenggaraan pemerintah yang efektif, serta solid dan bertanggung jawab, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara, sektor swasta, dan masyarakat (Basuki dan Shofwan, 2006:9). Selain itu peran dan pola hubungan yang di tunjukan pemerintah daerah melalui pihak Kelurahan Guntung merupakan bentuk dari diterapkannya prinsip-prinsip *good governance*. Menurut Giddens (2000:126) terdapat beberapa prinsip *good governance* yang harus dilakukan pemerintah dalam kerangka *good governance* yang ia terapkan, prinsip yang pertama adalah menyediakan sarana untuk perwakilan kepentingan masyarakat yang beragam, menawarkan sebuah forum untuk rekonsiliasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Di dalam prinsip ini pihak kelurahan guntung telah menyediakan forum sebagai sarana PT. Pupuk Kalimantan Timur sebagai *stakeholder* utama untuk menyampaikan maksud dan tujuannya mengadakan program yang mereka akan laksanakan kepada masyarakat Guntung. Di dalam forum tersebut kemudian muncullah pendapat-pendapat dari kedua belah pihak mengenai kepentingan masing-masing. Prinsip kedua, pemerintah harus menjamin perselisihan ditangan secara adil atau tidak diskriminatif. Dalam kemunculan program penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur tidak dapat dipungkiri muncul berbagai macam pendapat mengenai kepentingan masing-masing *stakeholder* tidak sedikit dari perbedaan pendapat yang dikeluarkan berpotensi menimbulkan perselisihan,

namun dengan beberapa pendekatan yang dilakukan pihak pemerintah kepada pemangku kepentingan dapat di ambil keputusan yang adil dan tidak diskriminatif. Dan prinsip yang terakhir adalah pemerintah dapat memproteksi lingkungan agar tidak dieksploitasi secara sembarangan. Melalui proses perijinan dan proses analisa dampak lingkungan yang di lakukan oleh pemerintah dan pihak perusahaan menjadikan bentuk-bentuk kegiatan CSR perusahaan lebih tepat sasaran. Salah satunya adalah program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam penghijauan kawasan *barrier* industri untuk mengantisipasi pencemaran dari kegiatan produksi perusahaan.

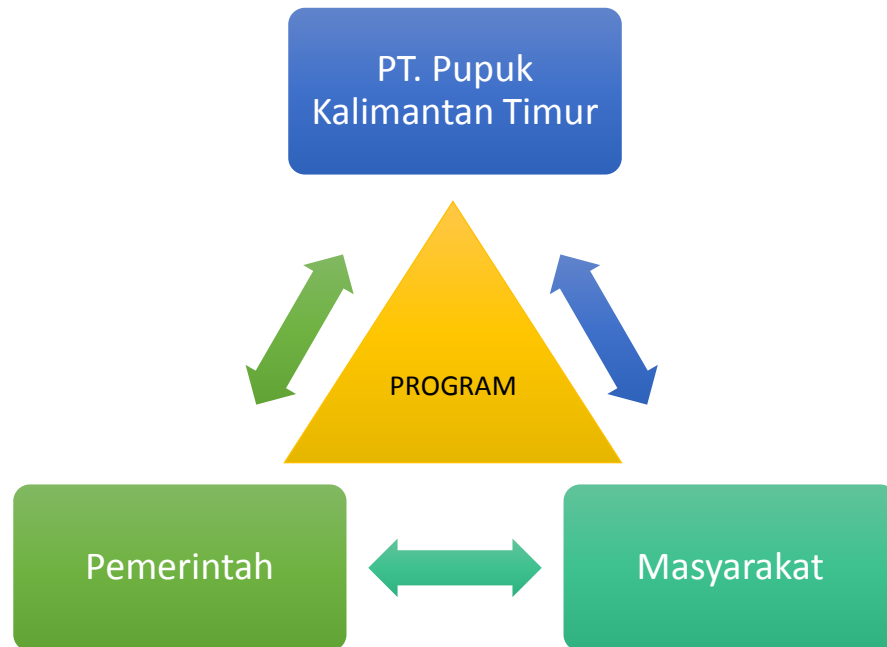
3) Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Guntung

Masyarakat maupun tokoh masyarakat yang berada di Kelurahan Guntung di dalam program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam penghijauan kawasan *barrier* ini menjadi titik sentral selain peran dari pihak kelurahan atau pemerintah daerah. Tokoh masyarakat yang menjadi pemangku warga menjadi salah satu dimana kepercayaan masyarakat ditempatkan agar dapat ikut serta dalam segala macam kegiatan maupu program yang dilaksanakan di lingkungan Guntung. Selain itu tokoh masyarakat Guntung merupakan salah satu cara bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung kepada para *stakeholder* yang ada dalam berbagai macam forum. Peran yang dimiliki masyarakat serta tokoh masyarakat adalah faktor penting terhadap kelancaran jalannya program yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. Apabila dilihat dari teori implementasi program yang di kemukakan oleh David Korten tentang tiga elemen yang berada di dalam implementasi program yaitu

program itu sendiri, organisasi pelaksana, dan pemanfaat (Akib dan Tarigan, 2000:11). Apabila dilihat dari teori tersebut, masyarakat merupakan pemanfaat program karena perusahaan sebagai *stakeholder* utama yang juga membentuk organisasi pelaksana memiliki tujuan mewujudkan program penghijauan kawasan *barrier* untuk mengantisipasi pencemaran yang ditimbulkan karena proses produksi perusahaan seperti bunyi bising dan bau amoniak. Sehingga sebagai elemen pemanfaat seperti yang diungkapkan David Korten, masyarakat dan tokoh masyarakat sudah menggambarkan kesesuaian yang sepadan bagi program dan organisasi pelaksana karena ikut serta dan juga berperan langsung di dalam pelaksanaan program. Dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan semua melibatkan peran masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada sehingga perusahaan sebagai pembuat program dapat memahami output program harus sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Kemudian dari pelibatan peran masyarakat sebagai pemanfaat dan pelaksana program secara langsung maka dengan adanya forum diskusi dan koordinasi antara setiap *stakeholder* telah mengetahui tentang syarat atau ketentuan yang telah ditetapkan agar dalam proses pelaksanaannya seluruh *stakeholder* terutama masyarakat sebagai pemanfaat program dapat merasakan *output* program (Akib dan Tarigan, 2000:12).

Dari peran dan pola hubungan antara *stakeholder* yang ada di dalam implementasi program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam proses penghijauan kawasan *barrier* untuk mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan dapat di analisis bahwa setiap *stakeholder* memiliki pola hubungan

yang berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Berikut peran dan pola hubungan *stakeholder* yang dapat di gambarkan:



Gambar 15. Pola hubungan *stakeholder* di dalam implementasi program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam proses penghijauan kawasan *barrier*
 Sumber: Data Olahan Peneliti 2016

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pola hubungan setiap *stakeholder* memiliki pengaruh pada setiap yang dilaksanakan. Koordinasi yang dilakukan tidak hanya melibatkan satu atau dua aktor saja, namun melibatkan seluruh aktor yang ada dari berbagai macam peran yang dimiliki. Sebagai aktor atau *stakeholder* utama PT. Pupuk Kalimantan Timur telah dapat melaksanakan prinsip dasar *corporate governance* dengan melaksanakan prinsip *responsibility* yang diwujudkan melalui berbagai macam implementasi program CSR-nya yang di koordinasikan dan dilaksanakan secara beriringan dengan *stakeholder* yang ada sebagai bentuk kepatuhan salah satu anggota masyarakat yang taat kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat disekitarnya (pieris dan

Wiryawan, 2008:141). Kemudian peran yang dimiliki pemerintah di dalam implementasi program ini adalah sebagai koordinator dan penengah terkait komunikasi pemilik program dengan target atau tujuan program. Dan masyarakat disini memiliki peran sebagai sumber informasi dan objek yang harus dijamin kehidupannya untuk memiliki kehidupan yang layak dan sehat serta terlindungi dari pencemaran atau dampak yang terjadi karena proses produksi perusahaan disekelilingnya. Peran dan pola hubungan yang terjadi diantara *stakeholder* ini sesuai dengan fungsi peran dan pola hubungan *stakeholder* menurut Hadi (2011:93) adalah untuk dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh *stakeholder* utama secara langsung maupun tidak langsung.

c. Bentuk kegiatan dan proses Program CSR Penghijauan Kawasan *Barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur

PT. Pupuk Kalimantan Timur merupakan salah satu perusahaan BUMN yang pelaksanaan operasional perusahaannya mengutamakan kesinergian antara produk yang ramah lingkungan dengan kelestarian lingkungan di area sekitar perusahaan yang juga diwujudkan melalui program-program CSR perusahaan. Sesuai dengan pengertian program yang dikemukakan oleh Jones dalam Rohman (2009: 101-102) menyebutkan bahwa program adalah salah satu komponen dalam suatu kebijakan dimana program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan dari diadakannya kebijakan tersebut. Untuk menganalisis bentuk kegiatan dan proses dari program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam penghijauan kawasan *barrier* dapat melihat pilar aktivitas pengoperasian program menurut Charles O. Jones (Suryana, 2009: 28), yaitu pengorganisasian struktur

oganisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Kemudian interpretasi para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dan adanya penerapan atau aplikasi perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Untuk melihat pilar aktivitas pengoperasian program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam penghijauan kawasan *barrier* industri terdapat beberapa bentuk kegiatan serta proses tahapan di dalam upaya mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan terhadap masyarakat Guntung, tahapan di dalam implementasi program yang dimaksud yaitu:

1) Tahap Perencanaan

Sebagai salah satu perusahaan milik Negara yang memiliki kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, dengan dasar adanya UU nomor 40 tahun 2009 tentang perseroan terbatas yang mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial ditambah lagi dengan UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang juga mewajibkan korporasi untuk ikut serta menjaga dan tidak mencemari atau merusak lingkungan hidup yang ada dan diperkuat lagi dengan tata cara penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dalam PP nomor 47 tahun 2012 menjadikan

kebijakan-kebijakan tersebut sebagai dasar perencanaan program CSR dalam bidang lingkungan yang dilakukan oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur.

Munculnya isu-isu lingkungan ditengah masyarakat menjadi bagian lain dan salah satu indikator dalam perencanaan program CSR perusahaan. Di dalam perencanaan program, PT. Pupuk Kalimantan Timur melibatkan seluruh sumber daya manusia dari seluruh departemen yang berkaitan dengan tujuan dan target yang di buat. Departemen Lingkungan Hidup yang menjadi perancang dan pelaksana program merupakan departemen yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam pengelolaan lingkungan hidup di kawasan perusahaan terutama di dalam zona-zona penting perusahaan. Selain itu departemen lingkungan hidup juga berperan dalam tahap perumusan dan analisis kondisi lingkungan baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, serta terlibat langsung dalam pembuatan *social mapping* Kelurahan Guntung sebagai sinkronisasi antara jenis pendeatan program dengan sasaran program. Sehingga dalam proses perencanaan terdapat target dan tujuan yang jelas dalam proses pembuatan program. Kemudian ada departemen hubungan masyarakat dengan bagian eksternalnya yang menjadi salah satu koordinator bagi perusahaan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap seluruh *stakeholder* yang berkaitan dengan program CSR penghijauan kawasan *barrier* industri ini. Dan yang terakhir adalah kesekretariatan perusahaan yang berperan penting dalam alokasi sumber daya anggaran program. Dengan demikian dapat dilihat bahwa praktik yang dilakukan oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur telah melakukan salah satu pilar aktivitas pengoperasian program di dalam proses perencanaan yaitu pengorganisasian struktur organisasi yang jelas dalam

mengoperasikan program dengan tenaga pelaksana dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas (Suryana, 2009: 28).

Namun dalam tahap perencanaan ini didapatkan temuan-temuan yang dapat menghambat berjalannya proses implementasi program. Salah satu temuan yang paling berpengaruh dan mendasar yang dapat menghambat implementasi program adalah tidak adanya prosedur operasi yang standar atau SOP (*Standard Operating Procedures*). Di dalam tahap perencanaan seharusnya telah dirancang SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak kedepannya. Namun dalam praktik perencanaan program yang dilakukan perusahaan hanya bersifat pembicaraan dan minimnya kegiatan notulensi didalamnya. Sebenarnya dalam notulensi tersebut dapat dijadikan dasar sebagai pembuatan SOP maupun rencana strategis dan rencana kerja yang lebih dikhususkan di dalam setiap jenis program CSRnya. Karena SOP, rencana strategis, dan rencana kerja yang baik, tepat, dan efektif merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu program (Winarno, 2005:159).

2) Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan pilar aktivitas pengoperasian yang selanjutnya. Di dalam tahap ini akan dilakukan analisis terhadap interpretasi para pelaksana dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Kemudian aktivitas yang lain adalah adanya penerapan atau aplikasi tentang pembuatan prosedur kerja. Tahapan pelaksanaan dalam program CSR penghijauan kawasan *barrier* industri PT. Pupuk Kalimantan Timur memiliki beberapa kegiatan sebagai berikut:

a) Penetapan implementor program dari masyarakat Kelurahan Guntung

Dalam tahap pelaksanaan penentuan implementor merupakan faktor paling penting di dalam keberhasilan maupun kegagalan suatu program. Terlepas dari implementor yang berasal dari dalam perusahaan yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program, masyarakat juga ikut dilibatkan untuk ikut didalam pelaksanaan lapangannya. Program penghijauan yang dilakukan dalam mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan adalah melakukan kegiatan penanaman tanaman yang telah ditentukan, perawatan, dan pembibitan tanaman sebagai bentuk keberlanjutan program dalam jangka waktu panjang. Dari kegiatan lapangan tersebut, perusahaan melibatkan LPM Guntung sebagai pembina pelaksana lapangan, sedangkan untuk pelaksana lapangan sendiri adalah kepala RTM Guntung. LPM Guntung disini memiliki peran dalam menggerakkan swadaya masyarakat secara partisipatif dan membantu membina pelaksana lapangan dalam implementasi program. Sedangkan kepala RTM memiliki peran sebagai penanam, perawat, dan pembibit tanaman penghijauan. Kepala RTM sebelum menjadi pelaksana lapangan telah mendapatkan pelatihan dari pihak perusahaan tentang bagaimana cara menanam, merawat, dan membibit tanaman yang baik dan benar sehingga mampu menghasilkan tanaman-tanaman yang diharapkan dan sesuai dengan target program agar dapat mencapai tujuan utama sebagai sarana antisipasi dampak dari proses produksi perusahaan. Sejauh ini temuan dilapangan para implementor program dari pihak internal

perusahaan maupun dari pihak LPM dan Kepala RTM sendiri sesuai dengan tujuan program. Sehingga pilar aktivitas pengoperasian program tentang interpretasi para pelaksana dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai telah dilaksanakan (Suryana, 2009:25). Hanya saja pilar aktivitas pengoperasian program tentang penerapan atau aplikasi tentang pembuatan prosedur kerja dalam pemilihan implementor lapangan masih terhambat pada tidak adanya prosedur kerja yang tertulis sebagai panduan pelaksanaan yang *valid* karena sejauh ini implementor di lapangan melakukan kegiatannya berdasarkan proses pelatihan yang dilakukan sebelumnya.

b) Pemilihan lokasi dan zona penghijauan

Pemilihan lokasi dan zona penghijauan dilakuakn dengan proses analisi lapangan dan pemetaan kawasan yang tidak sembarangan. Di dalam melakukan kegiatan penghijauan perlu memperhatikan beberapa hal termasuk jenis kontur permukaan tanah karena tidak semua wilayah yang masuk dalam kawasan *barrier* dapat ditanami dengan tanaman-tanaman yang masuk dalam rancangan program. Dari 30% luas kawasan industri yang masuk dalam Master Plan PT. Pupuk Kalimantan Timur nomor: 650/1018/DTRK-B, prioritas pelaksanaan proses penghijauan berada pada zona 3 yang langsung berbatasan dengan pemukiman masyarakat serta zona 1 yang menjadi area paling dekat dengan kawasan pabrik perusahaan. Langkah prioritas ini adalah sebagai langkah perusahaan menjaga citra positif di masyarakat dan meminimalisir terjadinya potensi resiko sosial

apabila tidak ditanggapi dengan baik. Hal ini sesuai dengan Rencana Kerja Program CSR Pupuk Kalimantan Timur tahun 2013-2018. Maka aktivitas implementasi pengoprasian program melalui penerapan atau aplikasi prosedur kerja pada program kerja dapat berjalan sesuai dengan lokasi atau kawasan yang sudah ditentukan. Dengan adanya pemilihan lokasi dan zona penghijauan yang menjadi prioritas perusahaan tersebut perusahaan telah melaksanakan salah satu tuntutan didalam pilar CSR yang telah dikemukakan dalam *Prince of Wales Internasional Bussines Forum* yaitu *protecting the environment* yang berarti perusahaan harus mampu menjaga kelestarian lingkungan yang menjadi temoat perusahaan itu beroperasi atau tempat-tempat yang berpotensi terkena dampak negatif dari proses produksi perusahaan (Wibisono, 2007:119)

c) Pemilihan jenis tanaman penghijauan

Pemilihan jenis tanaman ini tidak terlepas dari kebutuhan dan target dari program CSR di dalam penghijauan kawasan *barrier* industri untuk mengantisipasi dampak proses produksi perusahaan. Seperti halnya pemilihan tanaman bambu kuning sebagai sarana peredam bunyi bising yang muncul dari mesin produksi dan generator pabrik milik perusahaan. Kemudian pemilihan tanaman trembesi sebagai penghalau debu material bahan baku perusahaan dan penyerap bau amoniak yang terbawa angin. Dan yang terakhir pemilihan pohon atau tanaman produktif yang ditanam pada zona 3 atau zona yang langsung berbatasan langsung dengan masyarakat adalah untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai

sumber pendapatan ekonomi tambahan. Sehingga dalam pemilihan jenis tanaman penghijauan ini ada dua pilar aktivitas CSR yang dapat diterapkan, yaitu: *Strengthening Economies*, perusahaan pada aktivitas ini dapat memberdayakan ekonomi penduduk sekitar sehingga mampu mendorong masyarakat mandiri secara ekonomi. Kemudian aktivitas pilar CSR yang terakhir adalah *Protecting The Environment*, pada aktivitas ini perusahaan telah menunjukkan upayanya dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan yang menjadi tempat perusahaan beroperasi dan juga tempat-tempat yang berpotensi terkena dampak negatif dari proses produksi perusahaan melalui pemilihan tanaman penghijauan yang sesuai dengan kebutuhan (Wibisono, 2007:117-120).

d) Penanaman dan perawatan pohon

Tahap penanaman dan perawatan pohon dilakukan oleh implementor lapangan yang beranggotakan kelapa RTM dibawah binaan LPM Guntung. Dalam tahap 1 dan tahap 2 pelaksanaan program telah tertanam 500 pohon mahoni dan trembesi yang berada di zona 3. Namun dalam pelaksanaan perawatan tanaman didapatkan beberapa temuan terkait komunikasi yang berjalan kurang baik antara pihak LPM selaku pembina implementor lapangan dengan perusahaan sebagai *stakeholder* utama. Hal ini terkait dengan proses permintaan jumlah pupuk untuk perawatan tanaman yang diminta oleh pihak LPM tidak segera di realisasikan oleh pihak perusahaan yang menyebabkan beberapa tanaman menjadi layu. Namun hal tersebut mendapat klarifikasi dari perusahaan jika proses realisasi permohonan

pupuk harus mengalami beberapa tahapan karena mekanisme di perusahaan mengharuskan adanya analisis kondisi tanaman yang melibatkan beberapa ahli tanaman agar perusahaan dapat memberi bantuan perawatan dengan bahan baku atau peralatan yang tepat. Temuan ini yang menjadikan salah satu penghambat implementasi, dalam implementasi program variabel komunikasi antara *stakeholder* merupakan variabel utama dalam keberhasilan sebuah program. Komunikasi diartikan sebagai penyampaian informasi komunikator kepada komunikan (Winarno, 2005:149). Dengan kata lain seharusnya pihak pemilik program yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur dapat menyampaikan informasi lebih dalam dan mendetail lagi terhadap segala macam proses yang dilaksanakan di dalam implementasi program CSR yang dijalankannya kepada implementor di lapangan. Sehingga temuan kesalahpahaman ini dapat teratasi di awal proses implementasi.

e) Pembibitan pohon

Tahap pembibitan pohon merupakan bentuk dari keberlanjutan program penghijauan kawasan *barrier* dalam jangka panjang. Dalam waktu 2 tahun pelaksanaan pembibitan pohon di dalam program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur belum ditemukan pengaruh yang signifikan. Namun dalam waktu beberapa tahun atau beberapa tahap pelaksanaan program ini dapat dirasakan pengaruh dari proses pembibitan baik pengaruh dalam menekan *cost* pengeluaran perusahaan di dalam program ini maupun pengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat dalam menumbuhkan kemandirian ekonomi. Dengan begitu perusahaan tidak hanya memperkaya

diri dalam proses bisnisnya, tapi juga dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat miskin di sekitar lingkungan perusahaan dengan menyediakan mata pencaharian baru dalam program-program CSRnya. Kegiatan ini jika terlaksana dengan baik dan benar-benar terealisasi maka perusahaan telah melaksanakan aktivitas pilar CSR yang berkaitan dengan *Strengthening Economies* (Wibisono, 2007:19).

3) Tahap Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi adalah aktivitas yang tidak dapat dipisahkan di dalam implementasi program yang memiliki sifat keberlanjutan dan jangka panjang. Aktivitas monitoring dan evaluasi akan menjadi salah satu bentuk rujukan serta perbaikan suatu program. Monitoring mempunyai empat fungsi, yaitu mengetahui ketaatan implementor program dan seluruh *stakeholder* yang terkait dengan program, pemeriksaan sumber daya dan layanan yang diperuntukan untuk pelaksanaan program telah terpenuhi atau tidak, laporan perhitungan yang menghasilkan informasi mengenai hasil perubahan pada sebuah implementasi program di periode waktu tertentu, dan fungsi terakhir adalah monitoring menghasilkan penjelasan mengenai pelaksanaan program selama ini. Kemudian untuk evaluasi sendiri merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi

berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. (Dunn, 2000:161-164).

Dari fungsi monitoring dan evaluasi program yang telah dijelaskan sebelumnya, di dalam praktik implementasi program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur di dalam penghijauan kawasan *barrier* industri untuk mengantisipasi pencemaran dampak produksi perusahaan masih ditemukan beberapa kegiatan yang masih belum efektif dan optimal. Di dalam implementasi program yang ada, kegiatan monitoring dan evaluasi hanya dilakukan oleh pihak LPM Guntung saja yang kemudian diserahkan kepada perusahaan dalam bentuk laporan kegiatan, sedangkan dari pihak perusahaan hanya melakukan monitoring berupa kunjungan lapangan tanpa adanya kegiatan pengambilan informasi atau data tertulis terkait pelaksanaan program penghijauan sebagai pegangan bagi perusahaan sendiri. Dalam temuan ini hasil dari monitoring masih memiliki potensi kurang akurat dan optimalnya informasi dan data yang dilaporkan kepada perusahaan. Jika perusahaan memiliki informasi dan data yang diambil sendiri dengan melibatkan sumber daya internal perusahaan dapat dijadikan sebagai bahan pemeriksaan dan pencocokan laporan yang di buat oleh pihak LPM dengan laporan milik perusahaan sendiri. Dengan begitu dari kegiatan tersebut dapat ditemukan bahan-bahan temuan atau informasi yang lebih optimal dan akurat untuk dilakukan proses evaluasi program.

Dari hasil analisis yang telah dijelaskan tentang bagaimana proses implementasi program dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap monitoring dan evaluasi dapat diperoleh proses dan bentuk implementasi program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam proses penghijauan kawasan *barrier* industri untuk menanggulangi pencemaran kegiatan produksi perusahaan yang saling berkaitan pada setiap tahapannya, seperti pada gambar berikut:



Gambar 16. Proses dan bentuk kegiatan dalam Implementasi Program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam proses penghijauan kawasan *barrier* industri perusahaan.

Sumber: Data Olahan Peneliti (2016)

Dari gambar tersebut menjelaskan tentang bagaimana alur proses kegiatan implementasi program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam proses penghijauan kawasan industrinya. Tahap pertama adalah proses perencanaan dengan adanya proses koordinasi yang dilakukan oleh setiap *stakeholder* dan adanya proses analisis kondisi lingkungan dan sosial di dalam maupun di luar kawasan perusahaan untuk memperoleh formulasi perencanaan program yang tepat dan optimal. Tahap kedua adalah proses pelaksanaan dengan melaksanakan beberapa kegiatan antara lain penetapan implementor, pemilihan lokasi dan zona penanaman, pemilihan jenis tanaman, penanaman dan perawatan pohon, dan pembibitan tanaman yang telah di tentukan sebagai bentuk keberlanjutan program. Dan tahap terakhir adalah proses monitoring dan evaluasi, di dalam proses ini pembina implementor lapangan yaitu LPM memiliki tugas laporan pelaksanaan program yang diserahkan setiap trimuwal maupun tiap tahap pelaksanaannya. Namun dalam proses ini masih memiliki potensi kurang sesuai data di dalam laporan dengan di lapangan karena perusahaan tidak melakukan kegiatan pelaporan kegiatan secara internal sebagai bahan perbandingan laporan pelaksanaan agar dapat memiliki hasil monitoring dan evaluasi yang lebih optimal.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Pembahas dalam Implementasi Program CSR Penghijauan Kawasan *Barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dipengaruhi oleh beberapa variabel implementasi seperti yang kemukakan oleh George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Winarno, 2005:149-160). Berikut analisis dari temuan-temuan dilapangan tentang faktor pendukung berdasarkan variabel-variabel implementasi tersebut:

1) Komunikasi

Pengaruh terbangunnya komunikasi yang baik di dalam implementasi program CSR penghijauan kawasan *barrier* dalam upayanya mengantisipasi pencemaran yang muncul dari kegiatan produksi perusahaan adalah mampu mensinergikan setiap *stakeholder* yang terlibat didalamnya. Pola komunikasi yang baik antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat telah mendukung implementasi program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur berjalan sesuai rencana dan tujuan program. Perubahan cara berkomunikasi pihak perusahaan yang tidak hanya melibatkan staf dalam koordinasi perencanaan program namun juga melibatkan langsung Direksi Perusahaan. Kegiatan ini menggambarkan tentang bagaimana proses implementasi yang ada tidak lagi bersifat *top-down* tapi lebih kepada arah *bottom-up*. Selain itu proses pelatihan dan pengarahan merupakan bentuk komunikasi perusahaan pada setiap implementor yang merupakan wujud dari cara menyampaikan informasi-informasi terkait program penghijauan kawasan

barrier kepada implementor agar mereka dapat memiliki interpretasi yang sesuai dengan teknis pelaksanaan agar tujuan dari program dapat tercapai.

2) Sumber Daya

Faktor pendukung dari sisi sumber daya yang berperan di dalam implementasi program baik internal maupun eksternal perusahaan teridentifikasi ke dalam dua variabel, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Faktor pendukung dalam sumber daya manusia yang digunakan PT. Pupuk Kalimantan Timur untuk melaksanakan implementasi program dalam lingkup internal berasal dari karyawan-karyawannya yang bekerja di departemen lingkungan hidup, departemen hubungan masyarakat, dan kesekretariatan perusahaan. Karyawan yang berasal dari departemen lingkungan hidup telah memiliki kompetensi yang cukup di dalam masalah lingkungan hidup. Selain itu sumber daya manusia lain yang berasal dari departemen hubungan masyarakat berperan dalam menjalin komunikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan implementasi program seperti pemerintah daerah maupun masyarakat Guntung. Dan dari segi sumber daya finansial perusahaan melibatkan kesekretariatan perusahaan sebagai tim verifikasi anggaran untuk program CSR. Dengan alokasi anggaran sebesar 75 juta rupiah pada setiap tahapnya pelaksanaan program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam proses penghijauan kawasan *barrier* industri untuk mengantisipasi pencemaran akibat proses produksi perusahaan menjadi faktor pendukung yang dapat memperlancar implementasi program. Sedangkan faktor pendukung dari sumber daya eksternal adalah terlibatnya masyarakat dan LPM Guntung sebagai implementor lapangan.

Dengan terlibatnya masyarakat sebagai implementor lapangan membuat perusahaan tidak perlu mengeluarkan *cost* dengan jumlah besar jika dibandingkan perusahaan harus melibatkan pihak kontraktor di dalam implementasi program.

3) Disposisi

Menurut George C. Edward III disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki implementor sehingga apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor akan dapat melaksanakan kegiatan program sesuai ketentuan dan tujuan program dibuat (winarno, 2005:157). Temuan terkait disposisi implementor di dalam implementasi program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam proses penghijauan kawasan *barrier* bila dilihat dilapangan cukup positif. Kesadaran dan karakteristik implementor yang juga masyarakat setempat membuat mereka menyadari tentang pentingnya program yang dibuat oleh perusahaan di lingkungan mereka. Kesadaran mereka tentang pentingnya penghijauan di kawasan mereka dalam mencegah segala macam pencemaran cukup besar, selain itu mereka juga memahami bahwa program CSR yang dilakukan perusahaan tersebut juga demi kepentingan mereka.

4) Struktur Birokrasi

Dari indentifikasi di lapangan mengenai struktur birokrasi implementasi program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam proses penghijauan kawasan *barrier* industri hanya ditemukan sedikit faktor yang mendukung implementasi program. Temuan tersebut adalah terlibatnya LPM Guntung yang kemudian

menjadikan alokasi anggaran untuk program CSR ini lebih efisien dan tidak menghabiskan banyak biaya dalam proses implementasi.

b. Faktor Penghambat

Variabel dalam menganalisis faktor penghambat sama halnya dengan variabel analisis faktor pendukung. Faktor penghambat dalam implementasi program ini dipengaruhi oleh beberapa variabel implementasi yaitu variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut hasil identifikasi dan temuan-temuan dilapangan tentang faktor penghambat berdasarkan variabel implementasi yang ada:

1) Komunikasi

Identifikasi dilapang menunjukan masih adanya kesalahpahaman dalam penyampaian informasi antara pihak perusahaan dengan implementor. Komunikasi dilakukan untuk dapat menjadikan tujuan dan sasaran program dapat ditransmisikan kepada target yang kemudian dapat mengurangi distorsi implementasi. Distorsi yang muncul dalam temuan dilapangan adalah kurangnya pemahaman implementor lapangan terhadap mekanisme koordinasi di dalam proses perawatan dan pengajuan bahan baku sebagai media perawatan tanaman di dalam pelaksanaan program. Kurangnya pemahaman terhadap mekanisme koordinasi ini dikarenakan dari awal pihak perusahaan juga belum menjelaskan secara menyeluruh mengenai proses pengajuan tambahan anggaran maupun bahan baku yang berkaitan dengan program yang tengah di implementasikan. Hal ini terkait dengan proses permintaan jumlah pupuk untuk perawatan tanaman yang diminta oleh pihak LPM tidak segera di realisasikan

oleh pihak perusahaan yang menyebabkan beberapa tanaman menjadi layu. Namun temuan tersebut mendapat klarifikasi dari perusahaan jika proses realisasi permohonan pupuk harus mengalami beberapa tahapan karena mekanisme di perusahaan mengharuskan adanya analisis kondisi tanaman yang melibatkan beberapa ahli tanaman agar perusahaan dapat memberi bantuan perawatan dengan bahan baku atau peralatan yang tepat. Pada dasarnya distorsi implementasi ini tidak perlu terjadi apabila pada awal perencanaan dan koordinasi mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan segala macam mekanisme seperti yang menjadi temuan peneliti tersebut.

2) Sumber Daya

Pemilihan sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi sebagai implementor di lapangan dapat menjadikan implementasi program menjadi efektif. Namun implementasi program tersebut akan sedikit terhambat ketika kompetensi dan profesionalisme implementor atau sumber daya manusia yang dilibatkan di dalam proses implementasi memiliki tugas dan fungsi yang ganda. Berdasarkan identifikasi dari temuan di lapangan adalah sumber daya manusia yang dilibatkan oleh perusahaan terutama pada organisasi internal perusahaan yang masuk di dalam program CSR rata-rata memiliki tugas dan fungsi pekerjaan yang ganda. Selain mereka bekerja untuk melaksanakan fungsi dan tugas utamanya sebagai karyawan perusahaan, mereka juga dituntut untuk melakukan kegiatan diluar tugas utama mereka. Sehingga hal seperti ini dapat sedikit menghambat implementasi program menjadi kurang efektif.

3) Disposisi

Dari hasil identifikasi di lapangan tidak ditemukan disposisi negatif terkait karakteristik yang dimiliki implementor lapangan yang dapat menghambat implementasi program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam penghijauan kawasan *barrier* industri dalam mengantisipasi pencemaran proses produksi perusahaan. Pada dasarnya seluruh implementor memiliki kesadaran dan karakter yang sama dalam mencapai tujuan jangka panjang program CSR PT. Pupuk Kalimantan untuk mengantisipasi pencemaran dari kegiatan produksi perusahaan melalui program penghijauan di kawasan *barrier* industri maupun di lingkungan mereka sendiri.

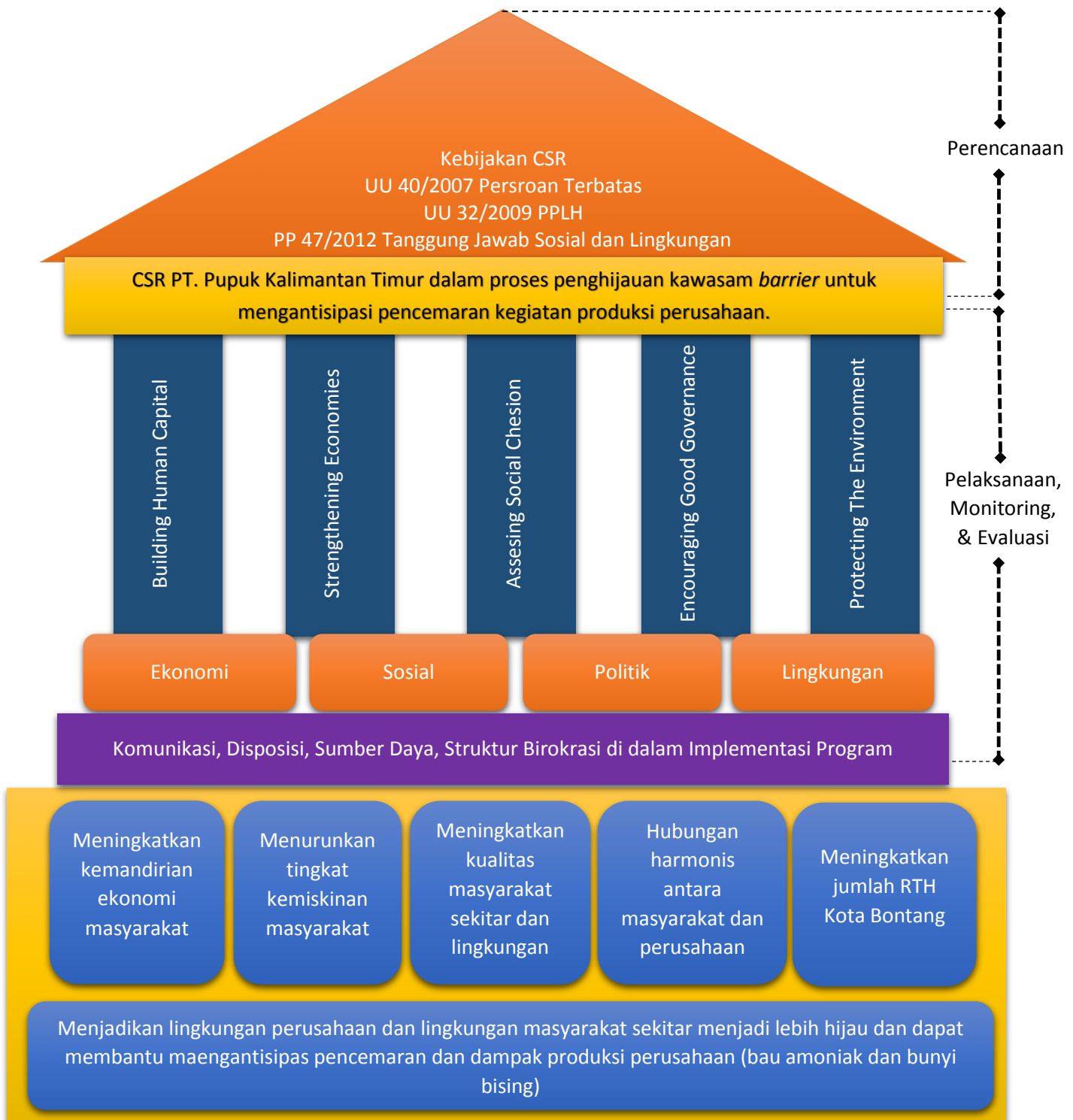
4) Struktur Birokrasi

Secara umum di dalam implementasi program struktur birokrasi memiliki tugas mengimplementasikan kebijakan dan memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar atau SOP (*Standard Operating Procedures*). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Selain SOP struktur birokrasi dan struktur organisasinya terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, sehingga menimbulkan struktur yang tidak fleksibel (Winarno, 2005:158-160). Dengan pendapat seperti itu temuan di lapangan menjelaskan tentang masih banyaknya faktor penghambat yang muncul dari struktur birokrasi yang berada di dalam implementasi program CSR ini. Faktor penghambat pertama di dalam struktur birokrasi adalah perencana,

pelaksana, dan pengawas program dilakukan oleh departemen-departemen yang telah ditunjuk oleh pimpinan perusahaan melalui suatu komite yang diberi nama Komite CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dengan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor : 30/DIR/VII.2014 tentang Komite *Corporate Social Responsibility* PT. Pupuk Kalimantan Timur. Komite CSR yang dibentuk memiliki susunan personalia yang berasal dari seluruh departemen yang berada di dalam perusahaan. Hal ini yang kemudian membuat program CSR yang dilaksanakan menjadi kurang fokus terhadap tujuan dan target yang diharapkan oleh perusahaan karena komite CSR yang dibentuk memiliki kelemahan dari segi sumber daya manusia yang berada didalamnya yang kemudian memiliki tugas ganda selain tugas pokok dan utamanya sebagai staf dan karyawan dalam suatu departemen untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan kegiatan yang berada di dalam departemennya, staf dan karyawan tersebut masih harus melaksanakan kegiatan lain di luar tugas pokok dan utama mereka. Dengan adanya rangkap jabatan seperti itu mengakibatkan kompetensi yang dimiliki oleh para staf dan karyawan perusahaan tidak dapat digunakan secara optimal dan efektif. Faktor penghambat dari struktur birokrasi yang kedua adalah tidak adanya rencana kerja, maupun SOP yang secara khusus dan berkaitan langsung dengan program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam proses penghijauan kawasan *barrier* industri. Rencana kerja maupun rencana strategis yang dibuat oleh perusahaan mencakup secara general dari program-program CSR perusahaan. Seharusnya untuk mencapai tujuan dan target dari setiap program perlu dibuat rencana kerja maupun SOP yang lebih

spesifik dan dikhususkan pada setiap program agar implementasi program dapat menghasilkan output yang sesuai dari apa yang telah direncanakan. Karena dengan adanya rencana kerja maupun rencana strategis yang kemudian di dukung dengan SOP yang jelas pelaksana lapangan atau implementor akan memiliki pedoman dalam melaksanakan tugas dan bertindak didalam implementasi program. Dan faktor penghambat dari struktur birokrasi yang terakhir adalah struktur organisasi yang berada dalam implementasi program CSR PT. Pupuk Kalimantan timur dalam penghijauan kawasan *barrier* untuk mengantisipasi pencemaran produksi perusahaan terlalu panjang dan cenderung dapat melemahkan pengawasan dan sedikit menimbulkan prosedur yang rumit. Hal ini diakibatkan karena pelaksana internal perusahaan masih belum menerapkan sistem satu pintu bagi implementor lapangan dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan proses implementasi program di lapang. Sehingga tidak heran jika dalam identifikasi permasalahan yang ada masih ditemukan kesalah pahaman dalam proses berkomunikasi karena struktur birokarasi yang ada masih belum fleksibel.

Dari analisis kedua fokus penelitian yang telah dijelaskan, lebih lanjut lagi peneliti memiliki kontruksi pemikiran terhadap temuan-temuan dan hasil selama penelitian terkait implementasi program CSR dalam proses penghijauan kawasan industri yang telah di analisis dengan memperbandingkan beberapa teori yang terkait dengan Implementasi Program CSR berdasarkan beberapa pemikiran para ahli. Berikut kontruksi pemikiran peneliti terhadap impelementasi program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam proses penghijauan kawasan barrier industri:



Gambar 17. Kontruksi Implementasi Program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam proses penghijauan kawasan *barrier* industri untuk mengantisipasi pencemaran produksi perusahaan.

Sumber: Data Olahan Peneliti 2016

Dari konstruksi pemikiran tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam implementasi program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam proses penghijauan kawasan *barrier* industri untuk mengantisipasi pencemaran produksi perusahaan., dengan adanya UU no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan di perkuat PP no. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menjadikan kebijakan-kebijakan tersebut sebagai payung hukum dan salah satu dasar perencanaan dan pelaksanaan program CSR perusahaan sebagai bentuk tanggung jawabnya di dalam mengantisipasi pencemaran produksi perusahaan seperti bau amoniak dan bunyi bising terhadap masyarakat. Namun di dalam implementasi program CSR tersebut harus tetap memperhatikan beberapa pilar yang menjadikan dasar pelaksanaan CSR perusahaan. Sesuai dengan lima pilar aktivitas CSR yang dikemukakan *Prince of Wales International Bussines Forum* dalam Wibisono (2007:119) yaitu: *Building Human Capital* (menciptakan SDM handal); *Strengthening Economies* (memperkuat ekonomi masyarakat sekitar); *Assesing Social Chesion* (menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat); *Encouraging Good Governance* (melaksanakan tata kelola peusahaan yang baik); *Protecting The Environment* (menjaga kelestarian lingkungan), PT. Pupuk Kalimantan Timur telah dapat menerapkan seluruh pilar aktivitas CSR tersebut dan mampu menimbulkan dampak terhadap aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Namun dari temuan di lapangan dengan hasil analisis yang telah dilakukan ada beberapa hal yang dianggap belum optimal dalam beberapa pilar aktivitasnya. Hal yang dimaksud ialah belum maksimalnya penerapan *Encouraging*

Good Governance oleh perusahaan. Di dalam tata kelola pelaksanaan program CSR perusahaan masih belum terdapat badan maupun departemen yang memiliki wewenang secara penuh dalam pelaksanaan program CSRnya. Masih adanya tumpang tindih tupoksi staf dan karyawan yang terlibat di dalam organisasi atau komite CSR perusahaan membuat kurang maksimalnya peran perusahaan di dalam implementasi program yang dijalankannya. Selain itu belum adanya SOP yang secara khusus yang dapat menjadi dasar pelaksanaan program CSR penghijauan kawasan *barrier* industri yang mengakibatkan potensi kesalah pahaman antara pihak implementor dengan perusahaan terkait pelaksanaan penanaman pohon, perawatan, hingga pembibitan tanaman.

Terlepas dari faktor penghambat program yang ada, program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam proses penghijauan kawasan *barrier* industri dalam mengantisipasi pencemaran produksi perusahaan ini akan dapat menjadi program yang baik dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan sendiri maupun masyarakat yang berada di sekitarnya apabila program ini dapat dikelola dengan baik dengan memperhatikan keberlanjutan pelaksanaan program dalam jangka panjang. Dengan adanya rencana kerja, rencana strategis serta SOP yang secara khusus dan fokus di dalam setiap program CSR perusahaan juga akan dapat lebih mengoptimalkan proses implementasi program. Namun seluruh perencanaan dan pembuatan SOP tersebut tidak akan dapat terlaksana dengan baik apabila struktur birokrasi yang menangani program CSR masih belum satu pintu atau di bawah kuasa badan maupun departemen yang secara khusus menangani dan mengurus seluruh program CSR perusahaan.

Sedangkan dari sisi eksternal program, masyarakat sebagai pemanfaat program dan yang juga berperan sebagai pelaksana program dilapangan juga dituntut untuk selalu berperan aktif berkomunikasi terhadap segala bentuk masukan maupun aspirasi yang berbentuk teknis dan substantif dalam pelaksanaan program kepada perusahaan. Apabila hasil masih dirasa kurang dalam jangka waktu yang telah ditentukan, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan suara tentang apa yang mereka dapatkan dan rasakan, namun dalam menyampaikan suara apabila hal tersebut lebih kepada arah kritik atau pembahasana sebuah masalah baru harus tetap diiringi dengan saran untuk solusi bersama.

Apabila seluruh pilar dan aktivitas serta tahap-tahap implementasi tesebut dapat dilaksanakan maka tujuan dan target utama program CSR dalam proses penghijauan kawasan *barrier* industri perusahaan akan dapat tercapai yaitu Menjadikan lingkungan perusahaan dan lingkungan masyarakat sekitar menjadi hijau dan mampu maengantisipasi pencemaran dan dampak produksi perusahaan. Selain itu manfaat lain dengan adanya program CSR perusahaan juga akan dapat dirasakan seperti kemandirian ekonomi masyarakat *bufferzone*, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran masyarakat *bufferzone*, meningkatnya kualitas SDM masyarakat maupun kualitas lingkungan, menjadikan hubungan antara perusahaan dan masyarakat lebih harmonis, hingga meningkatkat jumlah RTH Kota Bontang. Dengan begitu seluruh kegiatan implementasi program dapat dilaksanakan lebih optimal, efektif, dan tepat sasaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan tentang temuan-temuan implementasi program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam proses penghijauan kawasan *barrier* industri untuk mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan sebagai berikut:

1. Implementasi program CSR Penghijauan Kawasan *Barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam upaya mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan:
 - a. Keterkaitan Implementasi yang dilihat dari beberapa aspek:
 - 1) Aspek ekonomi, meningkatnya dan bertambahnya jumlah mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Guntung dan membantu perusahaan dalam pencapaian penilaian hijau PROPERNAS 2014-2015.
 - 2) Aspek sosial, jumlah RTM di Kelurahan Guntung setiap tahunnya mengalami penurunan.
 - 3) Aspek politik perusahaan ikut berperan dalam bertambahnya luas RTH Kota Bontang yang juga telah disesuaikan dengan Perda nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang.

- 4) Aspek lingkungan, dari segi hasil belum dapat dirasakan secara optimal bagi seluruh masyarakat guntung, karena proses penghijauan yang dilakukan masih membutuhkan waktu untuk menjadikan lingkungan di sekitar masyarakat maupun kawasan *barrier* menjadi hijau dan berfungsi secara optimal.
- b. Peran dan Pola Hubungan *Stakeholder*:
- 1) PT. Pupuk Kalimantan Timur, merupakan *stakeholder* utama di dalam program CSR penghijauan kawasan *barrier* industri ini. PT. Pupuk Kalimantan Timur merupakan perancang dan pelaksana utama karena memiliki kepentingan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan sekitarnya agar tetap aman dari dampak dan pencemaran yang terjadi dari proses produksi perusahaan seperti bunyi bising dan bau amoniak.
 - 2) Pemerintah Kota Bontang, berperan sebagai mediator antara kepentingan perusahaan dan kepentingan masyarakat. Serta menyediakan sebuah forum diskusi bagi masyarakat, kelompok masyarakat, dan perusahaan untuk saling bertukar pikiran dan menyampaikan segala keluhan dan harapan mereka.
 - 3) Masyarakat dan tokoh masyarakat Kelurahan Guntung, masyarakat di dalam implementasi program CSR PT. Pupuk Kalimantan ini memiliki peran sebagai objek dimana perusahaan harus turut ikut serta memberdayakan dan melindungi mereka dari segala macam dampak maupun pencemaran yang terjadi dari kegiatan produksi perusahaan

- 4) berdasarkan peraturan dan kebijakan yang ada. Kemudian tokoh masyarakat Guntung menjadi media bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada para *stakeholder* yang ada baik dari pihak pemerintah, organisasi atau kelompok di luar wilayah guntung, maupun pihak perusahaan-perusahaan yang berada di Kelurahan Guntung.
- c. Proses dan bentuk kegiatan yang dilakukan dalam implementasi program CSR Penghijauan Kawasan *Barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam upaya mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan meliputi:
- 1) Tahap perencanaan, perusahaan berpedoman pada UU nomor 40 tahun 2009 tentang perseroan terbatas, UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan PP nomor 47 tahun 2012 tata cara penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Kemudian dalam pelaksanaan proses perencanaan program tersebut perusahaan membuat *sosial mapping* untuk sebagai sinkronisasi antara jenis pendeatan program dengan sasaran program. Setelah itu perusahaan melalui departemen terkait melakukan analisis kondisi lingkungan di masyarakat maupun di kawasan industri perusaan sebagai langkah lebih lanjut dalam tahap perencanaan program. Dan terakhir adalah melakukan koordinasi terhadap pemerintah daerah dan masyarakat terkait rencana program.
 - 2) Tahap pelaksanaan, pada tahap ini perusahaan melakukan beberapa kegiatan yaitu: menetapkan implementor program dilapangan dari

masyarakat Kelurahan Guntung, memilih lokasi dan zona penghijauan, memilih jenis tanaman penghijauan pada setiap zona penanaman, melaksanakan penanaman dan perawatan pohon di setiap zona yang telah ditentukan, dan pembibitan tanaman penghijauan bersama implementor lapangan yang ada.

- 3) Tahap monitoring dan evaluasi, dengan adanya tahap ini menjadi salah satu bentuk rujukan serta perbaikan program CSR perusahaan dalam tahap pelaksanaan selanjutnya. Namun dalam praktik yang ditemukan lapangan hasil monitoring dan evaluasi program dalam bentuk laporan kegiatan hanya dilakukan oleh pihak LPM. Sedangkan pihak perusahaan hanya melakukan pengawasan langsung ke lapangan tanpa melakukan pendataan secara pribadi sebagai data perusahaan sendiri. Sehingga dengan kegiatan pelaporan di tahap monitoring dan evaluasi seperti itu akan berpotensi terjadinya distorsi implementasi.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program CSR Penghijauan Kawasan *Barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam upaya mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan terhadap masyarakat *buffer zone* dapat dilihat berdasarkan indikator implementasi berikut:

- a. Komunikasi

Perubahan cara berkomunikasi pihak perusahaan dalam berkoordinasi dengan masyarakat dari *top-down* menjadi *bottom-up* menjadi salah satu faktor pendukung implementasi program CSR perusahaan. Kemudian terbangunnya pola komunikasi yang baik antara perusahaan, pemerintah,

dan masyarakat juga mendukung implementasi program ini berjalan sesuai rencana dan tujuan program. Hanya saja dari segi komunikasi ini memiliki temuan yang sedikit menghambat implementasi program, yaitu adanya kesalahpahaman dalam memberikan dan menerima informasi dari perusahaan kepada implementor dilapangan.

b. Sumber daya,

Terdapat dua sumber daya yang mendukung implementasi program ini, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia yang dilibatkan perusahaan di bidang internal berasal dari staf departemen lingkungan hidup, departemen hubungan masyarakat, dan kesekretariatan perusahaan. Namun pelibatan staf internal perusahaan ini juga menjadi salah satu penghambat implementasi karena staf yang terlibat memiliki tugas dan fungsi ganda. Sedangkan sumber daya manusia dari bidang eksternal perusahaan melibatkan LPM Guntung dan RTM yang telah memiliki keahlian dalam proses pelaksanaan program dengan pelatihan dari pihak perusahaan sebelumnya. Dan untuk sumber daya finansial, perusahaan mengalokasikan dana sebesar 75 juta rupiah pada setiap tahap pelaksanaannya.

c. Disposisi

Faktor pendukung paling besar muncul dari disposisi setiap implementor yang terlibat di dalam program ini. Kesadaran dan karakteristik implementor yang juga masyarakat setempat membuat mereka menyadari

tentang pentingnya program yang dibuat oleh perusahaan di lingkungan mereka.

d. Struktur birokrasi.

Dengan terlibatnya LPM Guntung yang kemudian menjadikan alokasi anggaran untuk program CSR ini lebih efisien dan tidak menghabiskan banyak biaya dalam proses implementasi menjadi salah satu faktor pendukung program. Kemudian penghambat yang ada di dalam implementasi program ini adalah tidak adanya satuan bagian atau department yang berwenang secara khusus di dalam tata kelola maupun pelaksanaan program CSR perusahaan yang mengakibatkan munculnya tugas ganda terhadap staf yang terlibat. Dan terakhir tidak adanya rencana kerja maupun SOP yang secara khusus dibuat dalam pelaksanaan program ini membuat implementor tidak dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya secara optimal.

B. Saran

Dalam implementasi program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam proses penghijauan kawasan *barrier* industri untuk mengantisipasi pencemaran kegiatan produksi perusahaan masih terdapat beberapa hambatan dan permasalahan dari segi internal maupun eksternal perusahaan. Maka dengan hambatan dan permasalahan yang terjadi tersebut peneliti memberi beberapa rekomendasi dan saran agar implementasi program dapat berjalan lebih optimal dan efektif serta mampu mencapai tujuan dan target perusahaan:

1. Harus adanya badan atau kepala bagian maupun sebuah departemen sendiri yang memiliki wewenang khusus terkait kegiatan program CSR perusahaan. Hal ini diperlukan agar adanya sistem satu pintu dalam koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program CSR perusahaan. Dengan memiliki organisasi tersendiri yang menangani program CSR perusahaan, sumber daya manusia atau staf yang bekerja didalamnya memiliki tugas dan fokus utama terkait kompetensinya di dalam program CSR perusahaan. Dengan tidak adanya tugas ganda di dalam pelaksanaan implementasi program akan membuat fokus dan kinerja pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal dan juga jarak birokrasi implementasi tidak lagi jauh yang berarti prosedur birokrasi menjadi lebih mudah dan struktur organisasi lebih fleksibel.
2. Departemen maupun komite terkait implementasi program CSR perusahaan harus mampu menyampaikan segala macam informasi secara detail dan terperinci terhadap implementor yang berada dilapangan baik dari tahap penanaman, perawatan, hingga pembibitan tanaman. Selain itu pihak internal perusahaan yang terkait dengan program ini juga harus dapat menyampaikan informasi dari segala macam mekanisme perawatan seperti pengajuan bahan baku perawatan seperti pupuk maupun penambahan jumlah pelaksana lapangan hingga menangani permasalahan-permasalahan yang berpotensi terjadi saat proses implementasi sedang dilakukan. Dengan begitu informasi yang telah disampaikan tersebut dapat di gunakan implementor lapangan sebagai dasar berkomunikasi dan berkoordinasi terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan.

3. Perusahaan perlu membuat *Standar Operating Procedures* (SOP) dan rencana kerja yang lebih khusus terhadap program yang akan dilaksanakan. SOP dan rencana kerja ini akan dapat membantu perusahaan serta implementor lapangan untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai fungsinya dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
4. Perusahaan harus lebih aktif dalam melakukan kegiatan monitoring di lapangan serta melakukan pendataan secara mandiri sebagai data pegangan perusahaan sehingga tidak mengandalkan laporan dari hasil monitoring pihak LPM saja. Dengan begitu perusahaan akan dapat mensinergikan dan memadukan dua laporan pengawasan yang berbeda sekaligus untuk melakukan evaluasi program demi perbaikan program yang lebih baik, optimal dan efektif di tahap-tahap pelaksanaan program selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiffudin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung : Alfabeta.
- Akib, Haedar dan Tarigan, Antonius. 2000. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal Baca, 1(1): 12 13
- Akib, Muhammad (2014) *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andreas, Lako. 2011. *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*. Jakarta. Erlangga.
- Annie, Yusuf. 2000. *Bising Bisa Timbulkan Tinnitus dan Tuli*, Intisari, Jakarta
- Ardianto, Elvinaro dan Dindin Machfudz. 2011. *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Arief, Barda Nawawi. 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Banerjee, Subhabrata Bobby. 2007. *Corporate Social Responsibility: The Good, The Bad, and The Ugly*. Cheltenham : Edward Elgar.
- Basuki dan Shofwan. 2006. *Penguatan Pemerintah Desa Berbasis Good Governance*. Malang : SPOD FE-UB.
- Cheema, G.S. 2007. *Linking Governments and Citizens through Democratic Governance dalam Public Administration and Democratic Governance: Government Serving Citizens*. New York: 7th Global Forum on Reinventing Government Building Trust in Government, United Nations.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Kelima. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daniri, Mas Achmad. (2008), *Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, dikutip pada tanggal 11 November 2015 dari: www.csrindonesia.com.
- Djuwendah, E., A. Anwar, J. Winoto, K. Mudikdjo. 1998. *Analisis Keragaan Ekonomi dan Kelembagaan Penanganan Sampah Perkotaan*.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga.

- Dunn, William N. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA). 2000. *From Government to Governance: Reflections on the 1999 World Conference on Governance*. Quezon City: EROPA.
- Effendi, Muh. Arief. 2009. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ernawati, Yutik dan Sunarsih. 2008. Sistem Pengendalian Persediaan Model Probabilistik dengan “*Back Order Policy*”, FMIPA UNDIP. Diakses pada 7 Agustus 2015 dari eprints.undip.ac.id/1949/2/6._Yutik_E_%26_Sunarsih.pdf.
- Giddens, Anthony. 2000. *The Third Way : Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Hadi, Nor. 2011. *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Indradi, S.S. 2006. *Kepemerintahan dan Kemitraan*. Malang : Agritek YPN.
- Islamy, M Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Juanda, Agus. 2011. *Ammonia dan Kesehatan*. Diakses pada tanggal 24 Desember 2015 dari www.kesehatankerja.com.
- Kakabadse, Nada Korac and Andrew K Kakabadse and Alexander Kouzmin. (2000). *Board Governance and Company Performence: Any Correlations ?*. MCB University Press.
- Keban, Yeremias T, 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media.
- Kementrian Lingkungan Hidup. 2015. *Proper*, diakses pada tanggal 24 Desember 2-15 dari www.menlh.go.id.
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada perusahaan Bandan Usaha Milik Negara.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.557/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2014-2015.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-50/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebauan.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas (NAB) Kebisingan di Tempat Kerja.

- Khairandy, Ridwan, dan Malik, Camelia, *Good Corporate Governance, Perkembangan Pemikiran Dan Implementasinya Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Kotler, Philip dan Lee, Nancy. 2005. *Corporate Social Responsibility : Doing the Most Good for Your Company and Your Couse*. Wiley.
- Lako, Andreas. 2011. *Dekontruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*. Jakarta : Erlangga.
- Lawrence, Anne T. dan Weber, James. 2011. *Business and Society: Stakeholder, Ethics, Public Policy*. Thirteenth Edition. International Edition. Singapore: McGraw-Hill Education (Asia).
- MacRae, Jr. 1976. *The Social Functions of Social Science*. New Haven, CT : Yale University Press.
- Maria, Diaan, N., dan Mas Achmad Daniri, (2007), “Menuju Standarisasi CSR”, *Harian Bisnis Indonesia*, diakses pada tanggal 11 November 2015 dari www.csrindonesia.com.
- Mawardi, M. 2012. *Rekayasa Konsentrasi Tanah dan Air*. Yogyakarta : Bursa Ilmu.
- Miles, Mathew B.A., Michael Huberman, Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nainggolan, R., Elsa, Musadad A., 2008. *Kajian Pengelolaan Limbah Padat Medis Rumah Sakit*. Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Otto, Soemarwoto. 2004. *Buku Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Jakarta; Djambatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Pieris, John dan Nizam Jim Wiryawan, 2008, *Etika Bisnis dan Good Corporate Governance*, Edisi pertama. Jakarta : Penerbit Pelangi Cendekia,
- PKT-UNDIP, 2004. “*Pemetaan Kebisingan Lingkungan PT. Pupuk Kaltim*”, Bontang.
- PT. Pupuk Kaltim. 2014. *Annual Report 2014*. Bontang.
- PT. Pupuk Kaltim. 2013. *Suistanable Report 2013*. Bontang.
- Quadrant Utama, AcET Service Indonesia. 2002, “*Modul Pelatihan Noise Control Management*”, Bandung.

- Rohman, Arif. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama Yogyakarta.
- Sasongko D.P, A. Hadiarto, Sudharto P Hadi, Nasio A.H, A. Subagyo, 2000, *Kebisingan Lingkungan*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance, Kepemerintahan yang Baik, Bagian Dua*. Bandung: Mandar Maju.
- Shofyan, M., 2010. *Jenis Limbah Rumah Sakit Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Serta Lingkungan*, UPI.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Siagian, Matias dan Agus Suryadi, 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR Perspektif Pekerjaan Sosial*, Medan:FISIP USU PRESS.
- Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta : Salemba Empat.
- Suma'mur. 2009. *Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana, 2006. *Penerapan Good Corporet Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Uasaha*. Jakarta : kencana.
- Suryana, Siti Erna Latifi, 2009. *Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang*. Tesis. Program magister Studi Pembangunan , Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara .
- Susiyanto, Moch. (2007), *Antisipasi PT. Pupuk Kaltim Terhadap Bahaya Kebocoran System Tanki Penyimpan Amoniak*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sutikno dan Maryunani*. 2006. *Ekonomi Sumberdaya Alam*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Syafiie, Inu kencana. 2003. *Sistem Administrasi negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syaukani, ad all. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tarigan, Antonius. 2000. *Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial: StudiKasus Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Dati II Lebak, Jawa Barat*, Tesis Magister Administrasi Publik UGM, Yogyakarta.

- Tjokroamidjojo. Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : LP3S.
- Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta : Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Gresik:Fascho Publishing.
- Winarno, Budi. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Media Pressindo (Anggota IKAPI).
- www.bontangkota.go.id

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Riset



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 405 /UN10.3/PG/2016
Lampiran :
Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Manajer Departemen Diklat dan Manajemen Pengetahuan
PT. Pupuk Kalimantan Timur
Kota Bontang
di tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu /Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Rochmat Sudiarjo
Alamat : Jalan Natrium No. 2-G RT.07 / RW.10 Kel. Purwantoro Kec. Blimbing
Kota Malang
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Prodi : Administrasi Publik
Judul : Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Pupuk Kaltim dalam Proses Penghijauan Kawasan *Barrier* Industri Untuk Mengantisipasi Pencemaran Kegiatan Produksi Perusahaan. (Studi Pada Kelurahan Guntung Sebagai Kawasan *Buffer Zone* PT. Pupuk Kaltim)
Lamanya : 1 Bulan
Peserta : 1 Orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Malang, 11 Januari 2016

an Dekan



Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Instansi
2. Mahasiswa
3. Jurusan
4. Arsip TU



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 405 /UN10.3/PG/2016
 Lampiran :
 Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Lurah Kelurahan Guntung
 Kecamatan Bontang Utara
 Kota Bontang
 di tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu /Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Rochmat Sudiarjo
 Alamat : Jalan Natrium No. 2-G RT.07 / RW.10 Kel. Purwantoro Kec. Blimbing
 Kota Malang
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Prodi : Administrasi Publik
 Judul : Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Pupuk Kaltim dalam Proses Penghijauan Kawasan *Barrier* Industri Untuk Mengantisipasi Pencemaran Kegiatan Produksi Perusahaan.
 (Studi Kasus Pada Kelurahan Guntung Sebagai Kawasan *Buffer Zone* PT. Pupuk Kaltim)
 Lamanya : 1 Bulan
 Peserta : 1 Orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Malang, 11 Januari 2016

Dr. Dekan
 Ketua Prodi Administrasi Publik

 Dr. Endang Indah Mindarti, M.Si.
 NIDP 19690524 200212 2 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Instansi
2. Mahasiswa
3. Jurusan
4. Arsip TU



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 405 /UN10.3/PG/2016
Lampiran :
Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Timur
di tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu /Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Rochmat Sudiarjo
Alamat : Jalan Natrium No. 2-G RT.07 / RW.10 Kel. Purwantoro Kec. Blimbing
Kota Malang
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Prodi : Administrasi Publik
Judul : Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Pupuk Kaltim dalam Proses Penghijauan Kawasan *Barrier* Industri Untuk Mengantisipasi Pencemaran Kegiatan Produksi Perusahaan.
(Studi Pada Kelurahan Guntung Sebagai Kawasan *Buffer Zone* PT. Pupuk Kaltim)
Lamanya : 2 Bulan (18 Januari 2016 – 18 Maret 2016)
Peserta : 1 Orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Malang, 11 Januari 2016

dan Dekan

Ketua Prodi Administrasi Publik



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si.

NIP. 19690524 200212 2 002

Tembusan :

1. Pemerintah Kota Bontang
2. Kelurahan Guntung Kota Bontang

Lampiran 2. Daftar Wawancara Penelitian

Daftar pertanyaan untuk Manajer LH

1. Apa sebenarnya latar belakang munculnya program penghijauan kawasan barrier PT. Pupuk Kaltim?
2. Bagaimana proses pelaksanaan program penghijauan kawasan barrier PT. Pupuk Kaltim yang ditujukan untuk meredam atau meminimalisir munculnya bau ammonia di kawasan pemukiman?
3. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program penghijauan tersebut?
4. Bagaimana peran dan pola hubungan para *stakeholder* dalam pelaksanaan program penghijauan kawasan barrier PT. Pupuk Kaltim?
5. Bagaimana sistem pengorganisasian struktur pelaksana/implementor dalam pelaksanaan program penghijauan tersebut?
6. Berapa anggaran yang dialokasikan perusahaan dalam program penghijauan ini?
7. Apa saja yang menjadi sasaran utama dari program ini?
8. Apakah hasil dari program ada kesesuaian dari segi pemanfaatan yang dibutuhkan kelompok sasaran?
9. Bagaimanakah proses dan bentuk program penghijauan kawasan *barrier* ini terkait dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi?
10. Apa hambatan yang dialami dalam internal maupun eksternal perusahaan dalam pelaksanaan program penghijauan kawasan barrier ini?
11. Langkah apa saja yang telah diambil dalam mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut?

Daftar pertanyaan untuk Manajer Humas / Kabag. Humas Eksternal

1. Bagaimana citra perusahaan di mata masyarakat terutama masyarakat gantung tentang kaitannya dengan program perusahaan dalam mencegah / mengantisipasi kebocoran gas yang sewaktu-waktu dapat menimpa mereka?
2. Apakah perusahaan pernah menerima complain dari masyarakat yang keterkaitan bau ammonia di lingkungan mereka? Jika ada apa yang kemudian dilakukan oleh perusahaan?
3. Bagaimana perusahaan menumbuhkan hubungan yang baik masyarakat dalam meminimalkan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak-dampak negatif yang sekiranya muncul dari perusahaan?
4. Apa tanggapan mengenai program penghijauan kawasan barrier industri perusahaan yang pernah disampaikan masyarakat kepada perusahaan?

Daftar pertanyaan untuk Ketua LPM Guntung selaku pembina implementor lapangan Program Penghijauan kawasan *barrier* industri PT. Pupuk Kalimantan Timur

1. Apa saja yang menjadi sasaran utama dari program ini?
2. Apakah hasil dari program ada kesesuaian dari segi pemanfaatan yang dibutuhkan kelompok sasaran?
3. Bagaimanakah proses dan bentuk program penghijauan kawasan *barrier* ini terkait dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi?
4. Apa hambatan yang dialami dalam internal maupun eksternal perusahaan dalam pelaksanaan program penghijauan kawasan *barrier* ini?
5. Langkah apa saja yang telah diambil dalam mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut?

Daftar pertanyaan untuk Lurah Kelurahan Guntung

1. Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah daerah, kelurahan sebagai pelayan serta penampung aspirasi masyarakat (Guntung) bagaimana menyikapi pelaksanaan program penghijauan kawasan *barrier* yang dilakukan oleh perusahaan PT. PKT?
2. Apakah kelurahan pernah mendapatkan complain terkait munculnya bau ammonia di kawasan guntung?
3. Bagaimana pola hubungan pihak kelurahan dengan perusahaan terkait program csr perusahaan?
4. Apakah dengan berkembangnya masyarakat guntung yang sejajar serta berbatasan langsung dengan Perusahaan PT. Pupuk Kaltim membuat perubahan yang signifikan terhadap kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya masyarakat Guntung?

Daftar pertanyaan untuk Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Guntung

1. Sesering apa masyarakat mencium bau gas ammonia dan bunyi bising dari perusahaan?
2. Adakah dampak yang dirasakan masyarakat dari bunyi bising dan bau ammonia apabila dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan?
3. Apakah dengan berkembangnya masyarakat guntung yang sejajar serta berbatasan langsung dengan Perusahaan PT. Pupuk Kaltim membuat perubahan yang signifikan terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat Guntung?

Lampiran 3. Kebijakan Corporate Social Responsibility



**KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan keharmonisan antara masyarakat dan perusahaan serta wujud kepedulian perusahaan terhadap pengembangan masyarakat sekitar, maka ditetapkan **Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR)**, sebagai berikut :

1. CSR PT Pupuk Kaltim terintegrasi dengan Kebijakan Perusahaan, baik dalam perencanaan, implementasi, pelaporan dan publikasi CSR.
2. CSR PT Pupuk Kaltim mengedepankan pendekatan kemitraan strategis Academic, Bussiness, Government dan Community (ABGC).
3. CSR PT Pupuk Kaltim mengutamakan pemberdayaan masyarakat yang didukung proses pendampingan.
4. Pelaksanaan dan indicator capaian CSR PT Pupuk Kaltim mengacu kepada regulasi nasional dan global (ISO 26000).

Kebijakan ini ditinjau secara periodik dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan.

Bontang, 4 September 2012
PT Pupuk Kalimantan Timur,

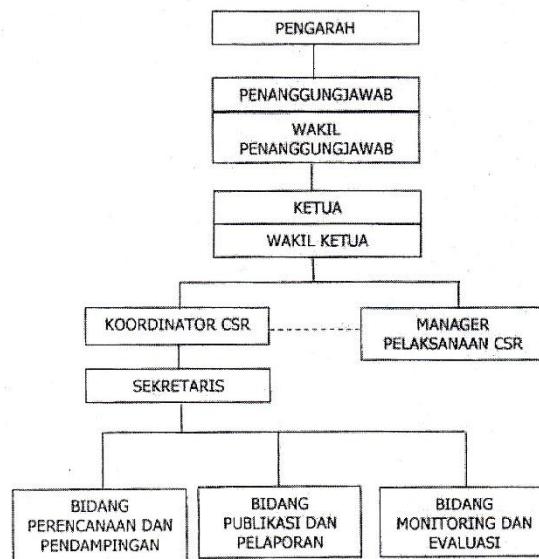

Aas Asikin Idat
Direktur Utama

Lampiran 4. Struktur Organisasi Komite CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur

SALINAN

Lampiran I Surat Keputusan Direksi
Nomor : 30/DIR/VII.2014

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE CSR PKT



Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 10 Juli 2014

PT Pupuk Kalimantan Timur,
Dito.
Aas Asikin Idat
Direktur Utama


Bontang, 16 Juli 2014
Disalin sesuai aslinya oleh :
Dep. Kesekretariatan,

Johny Janwarie Moeis
Manager

SALINAN

Lampiran II Surat Keputusan Direksi
Nomor : 30/DIR/VII.2014SUSUNAN PERSONALIA
KOMITE CSR PKT

No	Jabatan	Nama	Bertanggung Jawab kepada
1.	Pengarah	Direksi PKT	Pemegang Saham
2.	Penanggung Jawab	Direktur SDM & Umum	Pengarah
3.	Wakil Penanggung Jawab	Direktur Produksi	Pengarah
4.	Ketua	Sekretaris Perusahaan	Penanggung Jawab /Wakil Penanggung Jawab
5.	Wakil Ketua	GM Umum	Ketua
6.	Koordinator CSR	Manager PKBL	Ketua/Wakil Ketua
7.	Manager Pelaksana CSR	- Manager Kesekretariatan - Manager Humas - Manager Lingkungan Hidup - Manager K3 - Manager Diklat & MP - Manager Pelayanan Umum - Manager Rekons - Manager Promosi & Pelayanan	Ketua/Wakil Ketua
8.	Sekretaris	Staf Sekper Bidang CSR	Koordinator CSR
9.	Bidang Perencanaan & Pendampingan	- Kabag Bina Lingkungan – Dep. PKBL - Kabag Eksternal – Dep. Humas	Sekretaris
10.	Bidang Publikasi & Pelaporan	- Kabag Pubdok – Dep. Humas - Kabag Administrasi – Dep. Kesekretariatan	Sekretaris
11.	Bidang Monitoring & Evaluasi	- Kabag Pemantauan & Pelaporan – Dep. LH - Kabag Perencanaan & Evaluasi Diklat – Dep. Diklat & MP	Sekretaris

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal :PT Pupuk Kalimantan Timur,
Dito.
Aas Asikin Idat
Direktur UtamaBontang, 16 Juli 2014
Disalin sesuai aslinya oleh :
Dep. Kesekretariatan,


Johnny Janwarie Moeis
Manager

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



Gambar 18. Kondisi Kawasan Barrier PT. Pupuk Kalimantan Timur Zona 1
Sumber : Dokumentasi Peneliti 2016



Gambar 19. Kondisi Kawasan Barrier PT. Pupuk Kalimantan Timur Zona 2
Sumber : Dokumentasi Peneliti 2016



Gambar 20. Kondisi Kawasan Barrier PT. Pupuk Kalimantan Timur Zona 3
Sumber : Dokumentasi Peneliti



Gambar 21. Foto penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur
Zona 1 dengan penanaman Pohon Trembesi.
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2016



Gambar 22. Foto penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur Zona 1 dengan penanaman Bambu Kuning.

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2016



Gambar 23. Foto penghijauan kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur Zona 3 dengan penanaman Pohon Trembesi dan Pohon Mahoni.

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2016



Gambar 24. Foto kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur Zona 3 setelah dilakukan penghijauan selama 2 tahun dengan penanaman Pohon Trembesi dan Pohon Mahoni.

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2016



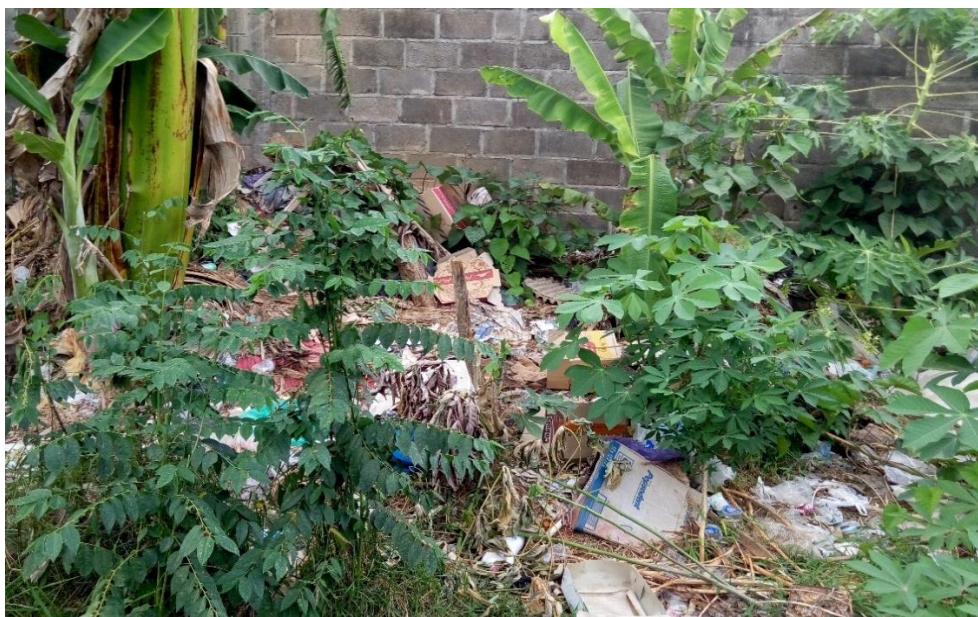
Gambar 25. Bibit Tanaman Mahoni dan Trembesi dari Program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam Proses Penghijauan Kawasan *Barrier* Industri

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2016



Gambar 26 . Bibit Tanaman Bambu Kuning dari Program CSR PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam Proses Penghijauan Kawasan *Barrier* Industri

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2016



Gambar 27 : Kondisi lingkungan di beberapa area zona 3 kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur dilihat ke arah pemukiman penduduk yang berbatasan langsung dengan lingkungan masyarakat Guntung

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2016



Gambar 28 : Kondisi lingkungan di beberapa area zona 3 kawasan *barrier* PT. Pupuk Kalimantan Timur dilihat ke arah perusahaan yang berbatasan langsung dengan pemukiman masyarakat Guntung
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2016



Gambar 29 : Foto peneliti bersama masyarakat, ketua LPM Guntung dan salah satu pegawai lapangan program penghijauan kawasan *barrier* industri PT. Pupuk Kalimantan Timur.
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2016

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

NAMA : ROCHMAT SUDIARJO
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : MALANG, 31 MARET 1993
ALAMAT : JL. NATRIUM NO.2-G RT.07 RW.10
KEL.PURWANTORO KEC.BLIMBING
KOTA MALANG
EMAIL : rochmat.sudiarjo@gmail.com
NO. TELP : 08123444431
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
AGAMA : ISLAM
STATUS : BELUM KAWIN
TINGGI/BERAT BADAN : 182 cm / 82 Kg
GOLONGAN DARAH : O+
KEWARGANEGARAAN : INDONESIA
PUBLIKASI / KARYA ILMIAH : **Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR)
PT. Pupuk Kalimantan Timur Dalam Proses Penghijauan Kawasan
Barrier Industri Untuk Mengantisipasi Pencemaran Kegiatan Produksi
Perusahaan**
(Studi Pada Kelurahan Guntung Kota Bontang Sebagai Kawasan Buffer
Zone PT. Pupuk Kalimantan Timur)



PENDIDIKAN

Formal
1999-2005 : SD NEGERI PANDANWANGI IV
2005-2008 : SMP NEGERI 14 KOTA MALANG
2008-2011 : SMK NEGERI 8 KOTA MALANG
(Program Kejuruan: Teknologi Komputer dan Jaringan)
2012-2016 : UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
(Jurusan: Ilmu Administrasi Publik)
Non-Formal
2009 : PELATIHAN KEPEMIMPINAN
2011 : PELATIHAN KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN
2011 : PELATIHAN KETERAMPILAN KOMPUTER DAN
PENGELOLAAN INFORMASI

PENGALAMAN BERORGANISASI

Organisasi Internal
2006 : WAKIL KETUA II MPK SMP NEGERI 14 MALANG
2009 : KETUA OSIS SMK NEGERI 8 MALANG
Organisasi Eksternal
2010-2011 : KETUA VERRANIA MALANG
2010 : KETUA PELAKSANA KOORDINATOR GATHERING
VIERRANIA JAWA TIMUR

PRESTASI NON AKADEMIK

2005 : JAMBORE PRAMUKA JAWA TIMUR NGANTANG,
KABUPATEN MALANG
2006 : JAMBORE PRAMUKA NASIONAL DI JATINANGOR,
JAWA BARAT

PENGALAMAN BEKERJA

2015 : PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR, KOTA BONTANG
(Juli-September) Departemen Hubungan Masyarakat
(Bagian: HUMAS Eksternal)

